



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang disebabkan sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang- ...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua ...

- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
 24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2013 yang meliputi:

- a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. prioritas dan sarana pembangunan;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;
- b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5....

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Juli 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above the printed name.

H. ISRAN NOOR



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2013**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2013**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Sistematis Dokumen Perubahan RKPD	I-9
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-13
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN	 II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	2-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	2-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan wilayah	2-5
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	2-15
2.1.1.4 Aspek Demografis	2-16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-20
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	2-20
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	2-39
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2-52
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	2-53
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	2-53
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	2-98
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-112
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-113
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	2-114
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	2-121
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-124
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	2-126
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	2-155
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	2-155
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	2-171

BAB III	PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 Dan Perkiraan Tahun 2012.....	3-4
3.1.2	Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014	3-8
3.1.3	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 Dan Tahun 2014	3-11
3.2.	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-14
3.2.1	Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	3-15
3.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	3-21
3.2.3	Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-26
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	4-1
4.2.	Prioritas dan Pembangunan Daerah	4-12
BAB V	PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1	Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	5-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
6.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	6-1
6.2	Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan	6-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur	2 - 2
Tabel 2.2	Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur	2 - 4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Penggunaan Lahan [ha] Tahun 2001	2 - 5
Tabel 2.4	Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur	2 - 7
Tabel 2.5	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur	2 - 9
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 17
Tabel 2.7	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 17
Tabel 2.8	Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 18
Tabel 2.9	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008-2012	2 - 19
Tabel 2.10	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012	2 - 22
Tabel 2.11	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008- 2012 (Juta Rp)	2 - 26
Tabel 2.12	Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2008-2012	2 - 28
Tabel 2.13	PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2012	2 - 29
Tabel 2.14	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 32
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012	2 - 34
Tabel 2.16	IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012	2 - 36
Tabel 2.17	Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun ke atas	2 - 40
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2008-2012	2 - 40
Tabel 2.19	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 41
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2012	2 - 42
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2012	2 - 44

Tabel 2.22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2012	2 - 45
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012	2 - 46
Tabel 2.24	Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012	2 - 48
Tabel 2.25	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2008-2012	2 - 51
Tabel 2.26	Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2006-2009	2 - 52
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 54
Tabel 2.28	Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 55
Tabel 2.29	Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 55
Tabel 2.30	Jumlah Guru per Kelas Rata-rata Terhadap Murid di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 56
Tabel 2.31	Persentase Siswa Jenjang PAUD/TK di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 57
Tabel 2.32	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 59
Tabel 2.33	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 60
Tabel 2.34	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 61
Tabel 2.35	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 62
Tabel 2.36	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 63
Tabel 2.37	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 64
Tabel 2.38	Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 65
Tabel 2.39	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 65
Tabel 2.40	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 66
Tabel 2.41	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 67
Tabel 2.42	Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 67
Tabel 2.43	Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 68
Tabel 2.44	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 68

Tabel 2.45	Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Kutai Timur Per Satuan Penduduk Tahun 2008-2012	2 - 69
Tabel 2.46	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 70
Tabel 2.47	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 71
Tabel 2.48	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 71
Tabel 2.49	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 72
Tabel 2.50	Data Angkutan Kota, AKDP dan Travel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010	2 - 72
Tabel 2.51	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 73
Tabel 2.52	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 73
Tabel 2.53	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 74
Tabel 2.54	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 74
Tabel 2.55	Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012	2 - 75
Tabel 2.56	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2008-2012	2 - 76
Tabel 2.57	Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 76
Tabel 2.58	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007-2011	2 - 77
Tabel 2.59	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 78
Tabel 2.60	Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akte lahir, Akte Nikah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 78
Tabel 2.61	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 79
Tabel 2.62	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 80
Tabel 2.63	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 80
Tabel 2.64	Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten di Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 81
Tabel 2.65	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 82
Tabel 2.66	Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2006-2009	2 - 83
Tabel 2.67	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 84

Tabel 2.68	Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 84
Tabel 2.69	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 85
Tabel 2.70	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 86
Tabel 2.71	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 87
Tabel 2.72	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 88
Tabel 2.73	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 88
Tabel 2.74	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 89
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 90
Tabel 2.76	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 90
Tabel 2.77	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 91
Tabel 2.78	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 93
Tabel 2.79	Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 93
Tabel 2.80	Persentase PKK dan Posyandu Aktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 94
Tabel 2.81	Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012 (dalam juta Rp)	2 - 94
Tabel 2.82	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 95
Tabel 2.83	Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 96
Tabel 2.84	Jumlah Surat Kabar, Radio, Televisi Lokal/Nasional di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 97
Tabel 2.85	Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 97
Tabel 2.86	Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Dengan Migas Tahun 2008-2012	2 - 99
Tabel 2.87	Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tanpa Migas Tahun 2008-2012	2 - 98
Tabel 2.88	Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 101
Tabel 2.89	Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 102
Tabel 2.90	Perkembangan Komoditas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 103

Tabel 2.91	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tanpa Migas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 104
Tabel 2.92	Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 105
Tabel 2.93	Jumlah Produksi Daging Dan Telur di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 106
Tabel 2.94	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 107
Tabel 2.95	Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Kutai Timur	2 - 108
Tabel 2.96	Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 109
Tabel 2.97	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur 2008-2012	2 - 109
Tabel 2.98	Kunjungan Wisata di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 110
Tabel 2.99	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 111
Tabel 2.100	Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 113
Tabel 2.101	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 114
Tabel 2.102	Kepadatan Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur 2009-2011	2 - 115
Tabel 2.103	Jumlah Penumpang Pesawat Udara di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 115
Tabel 2.104	Jumlah Armada, Penumpang, Dan Jumlah Bongkar Muat Pelabuhan Laut di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 116
Tabel 2.105	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif, Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 116
Tabel 2.106	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 117
Tabel 2.107	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 118
Tabel 2.108	Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 119
Tabel 2.109	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 120
Tabel 2.110	Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 dan 2010	2 - 120
Tabel 2.111	Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 121
Tabel 2.112	Lama Proses Perijinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 122
Tabel 2.113	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 123

Tabel 2.114	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 124
Tabel 2.115	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 125
Tabel 2.116	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD	2 - 126
Tabel 2.117	Keterpaduan Prioritas RPJMN, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur	2 - 167
Tabel 2.118	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	2 - 171
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	3 - 5
Tabel 3.2	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kabupaten Kutai Timur	3 - 13
Tabel 3.3	Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2013	3 - 20
Tabel 3.4	Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2013	3 - 25
Tabel 3.5	Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2013	3 - 27
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah	4 - 12
Tabel 4.2	Penjelasan program Prioritas Pembangunan Daerah	4 - 24
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD	5 - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Perencanaan	1 - 1
Gambar 2.1	Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur	2 - 6
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012	2 - 23
Gambar 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012	2 - 24
Gambar 2.4	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012	2 - 27
Gambar 2.5	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012	2 - 29
Gambar 2.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2012	2 - 31
Gambar 2.7	Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012	2 - 32
Gambar 2.8	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 dan 2011	2 - 36
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011	2 - 38
Gambar 2.10	Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 38
Gambar 2.11	Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota, Rata-rata Provinsi dan Nasional Tahun 2009	2 - 58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu implementasi pembangunan. Perencanaan diperlukan untuk menentukan tindakan pada masa depan secara tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini mengingat perencanaan diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman maupun acuan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan terpadu serta menyeluruh, diharapkan akan membuahkan hasil pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatulingkungan wilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Substansi RKPD mengacu kepada RPJMD dan RPJPD serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai

komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Timur Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2011-2015 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

- a. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadilandakan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun perkembangan dalam tahun berjalan terjadi perubahan-perubahan asumsi, maka dapat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam pasal 285 dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:



- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan RKPD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan adanya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan guna menyesuaikan perubahan perkembangan keadaan yang terjadi serta pertimbangan karena adanya perubahan asumsi keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013.

Adapun perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan perubahan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- c. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD;
- d. Penetapan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

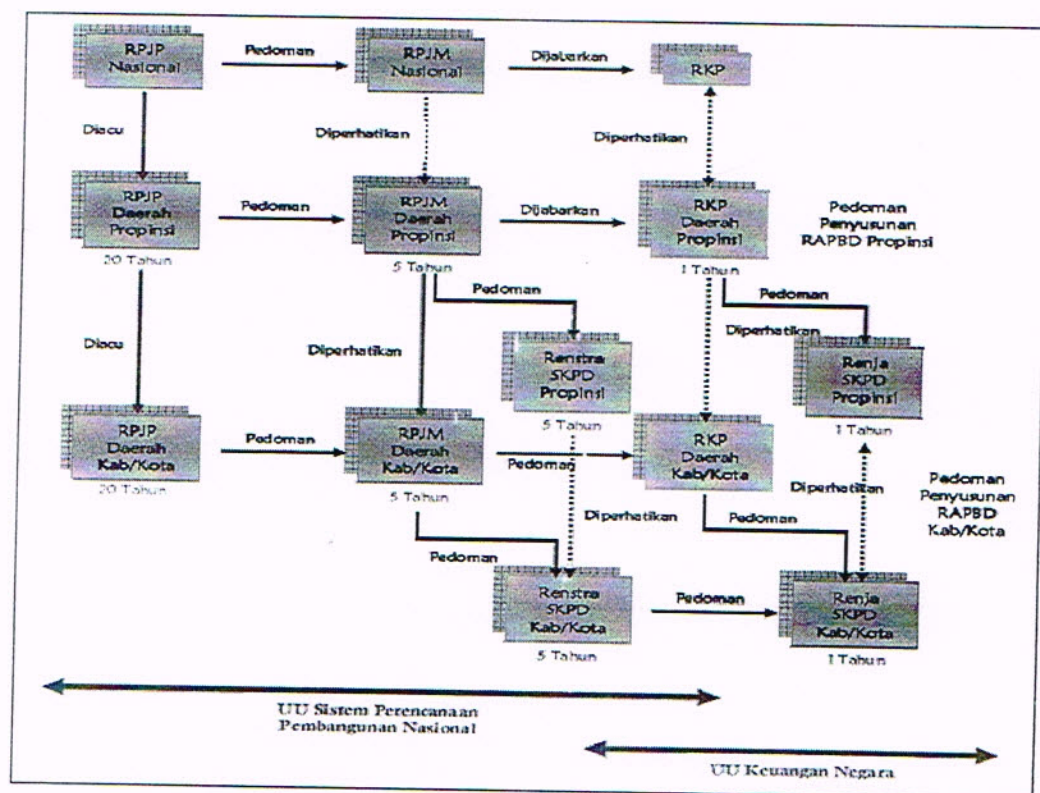
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2013;
32. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 06);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
40. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini, RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Gambar 1.1
Bagan Alur Perencanaan



Sumber : UU SPPN No 25 Tahun 2004

RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut



menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah **bersifat mengikat** yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, yang mengimplemen tasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bagian ini menguraikan tentang penjelasan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan RKPD.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini mengemukakan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, terutama tentang perubahan RKPD Tahun 2013.

I.3 Hubungan antar dokumen

Bagian ini menguraikan tentang dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD

I.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bagian ini mengemukakan penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya

I.5 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2013 dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Mendesripsikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2012 dan tahun 2013 Triwulan 2. Hal ini dilakukan untuk:

- a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;
- b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2013 triwulan II,
- c) Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tahun 2013 triwulan II.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengemukakan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah meliputi :

- a) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- b) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

III. PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan :

- a. Perubahan asumsi indikator makro ekonomi daerah
- b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan perubahan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah berdasarkan analisis.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat penjelasan tentang analisis dan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan;
- b) Uraian arah kebijakan berkaitan dengan perubahan target pendapatan daerah.
- c) Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai target.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dengan melihat perkembangan tahun berjalan. Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan serta sasaran pembangunan lima (5) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

Mengemukakan bahwa prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunandan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana perubahan program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi menjelaskan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km² atau sekitar 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Batas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebelah utara adalah Kabupaten Berau, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa
di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa	Luas	
			Km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muara Ancalong	9	2.739,30	7,66
2	Busang	6	3.721,62	10,41
3	Long Mesangat	7	526,98	1,47
4	Muara Wahau	9	5.724,32	16,01
5	Telen	7	3.129,61	8,75
6	Kombeng	7	581,27	1,63
7	Muara Bengkal	7	1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	6	204,50	0,57
9	Sangatta Utara	4	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11	3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6	831,00	2,32
12	Rantau Pulung	8	1.660,85	4,65
13	Sangatta Selatan	4	143,82	0,40
14	Kaliorang	7	3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	13	438,91	1,25
16	Sandaran	7	3.419,30	9,57
17	Kaubun	8	257,45	0,72
18	Karangan	7	3.064,36	8,57
	Kabupaten Kutai Timur	135	35.747,50	100,00

Sumber:SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. 115°58'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan [Kota Orde II]- Tanjung Redeb ke Samarinda [Kota Orde I-Ibu Kota Provinsi] - Balikpapan [Kota Orde I] - Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang



mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur.

- b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa daratan landai, bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai, dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah dataran mencapai 46%, pegunungan 30%, perbukitan 16% dan lainnya mencapai 8%.

Di antara variasi topografi yang dimaksud adalah:

- a) Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman, pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan prioritas untuk pengembangan lapangan terbang.
- b) Kawasan pegunungan kapur terdapat di daerah Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong, sesuai untuk pengembangan pertanian tanaman tertentu seperti jati dan karet.
- c) Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan terutama Sungai Sangatta, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Sungai-sungai di daerah tersebut airnya dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai sumber air minum dan jalur transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Sedangkan danau terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang, berpotensi sebagai sumber mata air maupun pengembangan perikanan budidaya air tawar.
- d) Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten dengan ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai kemiringan lereng datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan.



4. Geologi

Kabupaten Kutai Timur, secara geologi sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar disepanjang pantai. Disamping itu terdapat kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwartier. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat.

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi. semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur

No	Fisiografi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.840
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber:
Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

5. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26°C, di mana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°-7°C. Jumlah curah hujan antara 2000-4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 sebanyak 38,6% merupakan kawasan hutan, yaitu hutan primer, hutan bekas tebangan, hutan belukar, hutan kerangas, hutan di karst, hutan sejenis (HTI), hutan rawa, dan mangrove. Hutan primer banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kabupaten Kutai Timur juga terdapat 2 danau sebagai sumber mata air, yaitu Danau Ngayau (1900 ha) dan Danau Karang (750 ha) yang semuanya terdapat di Muara Bengkal



Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 52,01% didominasi oleh belukar [32,2%] dan alang-alang [13,2%]. Kawasan pertanian sebanyak 3,5% atau sekitar 106.056 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Sedangkan penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi sangat besar, baik untuk budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lahan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 0,22% atau sekitar 7.113 Ha.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Menurut Penggunaan Lahan (ha) Tahun 2001

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Hutan Primer	443.035	13,40	13	Belukar	1.062.811	32,15
2	Hutan Bekas Tebangan	562.816	17,03	14	Padang rumput	28.819	0,87
3	Hutan Belukar	84.465	2,56	15	Alang-Alang	437.488	13,24
4	Hutan Kerangas	1.382	0,04	16	Perkebunan	29.083	0,88
5	Hutan di karst	106.338	3,22	17	Sawah	3.479	0,11
6	Hutan rawa	11.788	0,36	18	Tambak	78	0,00
7	Mangrove	34.318	1,04	19	Tambang Batubara	7.113	0,22
8	HTI	30.865	0,93	20	Pemukiman	18.902	0,57
9	Ladang	15.775	0,48	21	Danau	304	0,01
10	Lahan Basah	38.740	1,17	22	Sungai	14.506	0,44
11	Lahan Terbuka Karst	53.124	1,61	23	Awan	8.682	0,26
12	Lahan terbuka	9.019	0,27	24	Tidak ada data	302.538	9,15
					Jumlah	3.305.469	100,00

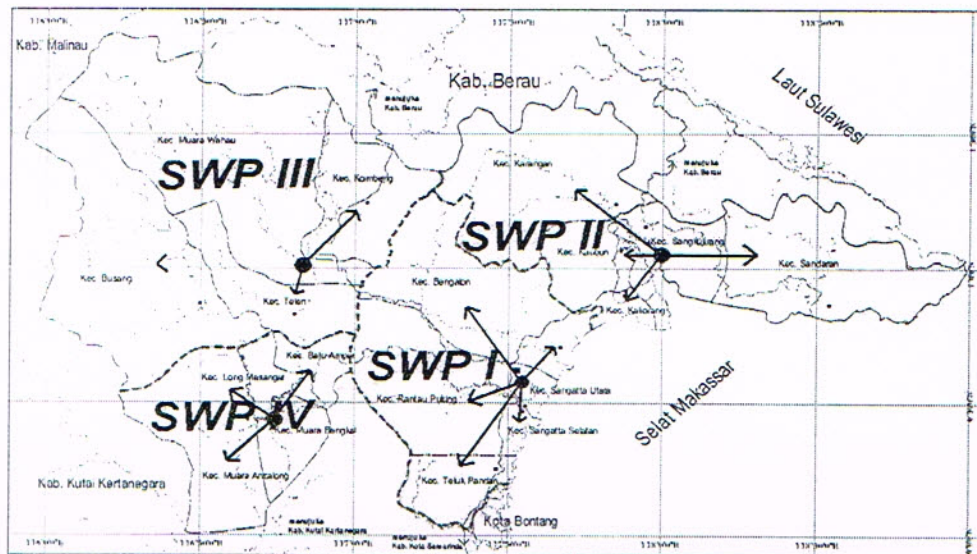
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan kawasan yang berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada Ibukota Kabupaten yaitu Sangatta karena posisi geografisnya berada di kawasan pesisir pantai yang memudahkan transaksi barang dan jasa lebih mudah. Tetapi seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karakteristik yang ada tersebut mengalami penggeseran sehingga

menciptakan kluster-kluster perkembangan.

Gambar 2.1
Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur



Sumber:Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

Pengembangan wilayah yang berpotensi di dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007, selain memperhatikan adanya pergeseran tersebut diatas, juga direncanakan terdapat 4 SWP [Subwilayah Pengembangan]. Adapun SWP tersebut terdiri dari:

- SWP I :Berpusat di Sangatta Utara
- SWP II :Berpusat di Ibukota Kecamatan Sangkulirang
- SWP III :Berpusat di Ibukota Kecamatan Muara Wahau
- SWP IV:Berpusat di Muara Bengkal



Potensi masing-masing kawasan perencanaan di 18 kecamatan pemekaran Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No (1)	Kecamatan (2)	Potensi (3)
1	Muara Ancalong (Ibukota Kecamatan: Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir)	Terdapat potensi perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh PT. 3 S (Sawit Sukses Sejahtera).
2	Busang	Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi lading Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk, dan pisang Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
3	Long Mesangat (Ibukota Kecamatan: Sumber Sari)	Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani, dengan komoditi pada umumnya adalah: Padi, Kacang, Jagung. Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku yang berasal dari Indonesia Timur, Bali, Jawa, dan Sunda yang memiliki budaya bertani dan bercocok tanam. Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber sari (komoditi ikan Patin) di Sungai Long Mesangat bantuan merupakan salah satu program dari Pemkab.
4	Muara Wahau	Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat Memiliki hamparan dominan yang landai (0-7%) dengan ketinggian yang variatif antara 0 - 1000 dpl dan pegunungan kapur sehingga sangat kondusif untuk pengembangan perkebunan jati dan karet.
5	Telen	Memiliki perkebunan produktif dengan komoditas utama kelapa sawit dan coklat Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6	Kongbeng	Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit Sektor Peternakan dengan komoditas sapi
7	Muara Bengkal (Ibukota Kecamatan: Muara Bengkal Ulu)	Danau kecil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku dan sudah terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM-nya berasal dari danau tersebut. Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Gunung putra daerah yang berasal dari Muara Bengkal). Potensi perikanan dengan jenis komoditi Ikan: Pipija, Baong, Saleh, Patin, Jelawat, Ikan Betutu (orientasi ekspor berdasarkan survei wawancara).
8	Batu Ampar (Ibukota Kecamatan: Batu Timbau)	Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9	Sangatta Utara	KPC (Kaltim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan 'kota mandiri' di Kawasan Perkotaan Sangatta merupakan potensi sebagai pusat pertumbuhan khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa. Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sangatta yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir. Sungai Sangatta sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.
10	Bengalon	Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsung dan Keraitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat
11	Teluk Pandan (Ibukota Kecamatan: Teluk Pandan)	Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi sawah, pisang, dan coklat.



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Kecamatan	Potensi
(1)	(2)	(3)
		Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kecamatan ini adalah: Jeruk Martadinata, Pinili, Nenas, Salak
12	Rantau Pulung (Ibukota Kecamatan: Margo Mulyo)	Memiliki potensi pertanian karena pada umumnya masyarakatnya adalah transmigran yang sudah terlatih untuk membudidayakan lahan pertaniannya (sawah tadah hujan dan buah-buahan) Memiliki kandungan tambang batu bara.
13	Sanggata Selatan (Ibukota Kecamatan: Sanggata Selatan)	Potensi sektor pertanian yaitu sayur-sayuran dan produksi ikan segar khususnya ikan bandeng dan ikan kakap. Potensi perikanan tersebut lebih banyak dibudidayakan di tambak dan sebagian lagi dari hasil tangkap nelayan laut. Memiliki potensi wisata lokal di Teluk Lombok maupun Teluk Kabak. Pusat pertumbuhan di kecamatan ini adalah pasar ikan yang terdapat di Desa Sanggata Selatan.
14	Kaliorang	Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa, coklat, kopi dan pisang Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan tangkap Pernakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum serta pasir kuarsa
15	Sangkulirang (Ibukota Kecamatan: Benua Baru Ulu)	Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut dan <i>outlet</i> barang se-kabupaten. Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan komoditi adalah udang lobster.
16	Sandaran	Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama kelapa, pisang, coklat, lada Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayur Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik tambak, kolam ataupun perikanan tangkap
17	Kaubun (Ibukota Kecamatan: Bumi Etam)	Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang terlatih untuk bertani dan berkebun sehingga memudahkan untuk pengembangan program pertanian.
18	Karangan (Ibukota Kecamatan: Karangan Dalam)	Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari. Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan milik perusahaan. Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara yang saat ini sudah mulai eksplorasi, pariwisatanya yaitu wisata air panas (desa mukti lestari) dan goa kelelawar, walet serta terdapat air panas dan air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).

Sumber:

- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Kabupaten Kutim Tahun 2008
- Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007
- Data diolah

Potensi permintaan hasil produksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya hasil produksi yang berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui, diantaranya adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumberdaya



alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya mencakup kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan, pariwisata, kawasan Hankam dan kawasan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kabupaten Kutai Timur terdapat di 11 wilayah kecamatan dengan peruntukan perkebunan yang dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur

No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan	No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Bengalon		8	Sandaran	
	- Tepian Langsung	Sawit		- Susuk Dalam	Sawit, Karet
	- Keraitan	Sawit		- Susuk Luar	Sawit
	- Sekerat	Kakao		- Manubar	Karet
2	Kaliorang			- Marukangan	Karet
	- Selangkau	Kakao	9	Sangatta	
	- Bumi Rapak	Sawit, Kakao		- Rantau Pulung	Kenaf
	- Bumi Etau	Sawit	10	Sangkulirang	
	- Cipta Graha	Sawit		- Karangan Dalam	Sawit, Cokelat, Pisang, Kakao
	- Bukit Makmur	Sawit		- Tp.Terap	Sawit
	- Bukit Permata	Sawit, Kakao		- Pelawan	Sawit
3	Kaubun			- Kerayaan	Sawit, Cokelat, Pisang
	- Bumi Rapak	Sawit		- Mundu Dalam	Sawit
4	Kongbeng			- Saka	Sawit
	- Miau Baru	Cokelat/Lada, Jarak Pagar		- Bt.Lepoq	Sawit, Kakao
5	Muara Ancalong			- Karangan	Sawit
	- Long Tesak	Sawit		- Baay	Sawit, Pisang
	- Senyur	Sawit		- Pengadan	Sawit, Kakao
6	Muara Wahau			- Mandu	Sawit
	- Dabeq	Sawit		- Sempayau	Sawit
	- Nehes Liahbing	Sawit		- Keraitan	Sawit, Kakao
	- Benhes	Sawit		- Tanjung Manis	Sawit, Cokelat
	- Diaklay	Sawit	11	Telen	
7	Muara Bengkal			- Jukayaq	Sawit
	- Batu Ampar	Sawit		- Bt.Redi	Sawit
8	Sandaran			- Muara Halog	Sawit
	- Susuk Dalam	Sawit, Karet		- Marhalog	Sawit
	- Susuk Luar	Sawit			
	- Manubar	Karet			
	- Marukangan	Karet			

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007



1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan yang berada dalam pengawasan Unit Hamparan Pengkajian (UHP) dan hutan rakyat. Sedangkan Hutan Produksi menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dibedakan menjadi 3 macam kawasan yaitu: a) Kawasan hutan produksi terbatas, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikandengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luarkawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dantaman buru, b) Kawasan hutan produksi tetap, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelaslereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikandengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luarkawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dantaman buru, c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secararuang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatankehutanan.

Pengaturan kawasan hutan produksi menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 meliputi: a) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, b) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian di kawasan hutan produksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau koperasi yang telah memperoleh ijin dapat menanam dengan sistem tumpang sari sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan tersebut.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2 bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan



basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi polemik dimasa yang akan datang yang meliputi berkurangnya produktivitas padi yang mengakibatkan goyahnya swasembada pangan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal mungkin pencegahan berkurangnya lahan sawah seminimal mungkin, terutama untuk lahan irigasi teknis dan lahan produktif lainnya.

3. Kawasan Perkebunan

Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan hasil produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan karet.

Hasil produksi perkebunan di Kutai Timur yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri.

4. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kutai Timur, baik peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti: sapi, babi, dll) mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan yang cukup besar kebutuhan lokal kabupaten maupun kebutuhan regional Provinsi Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi. Hal



ini diindikasikan diantaranya dengan adanya surplus produksi unggas dan daging besar.

5. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kutai Timur mencakup perikanan darat, laut dan tambak, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatan potensi, dengan upaya sebagai berikut:

- a) Kawasan darat dikembangkan dengan pola budidaya berbentuk kolam/empang, atau sistem karamba di kali dan waduk.
- b) Kawasan pesisir dikembangkan pola tambak air tawar, air payau dan air laut dengan tetap mempertimbangkan ekosistem pesisir.
- c) Kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut sebagai *outlet* dengan pengembangan dermaga ikan, TPI dan pasar ikan.

Perikanan laut, pesisir dan perikanan darat di kawasan Kutai Timur mempunyai potensi pasar yang cukup baik. Hasil produksi perikanan laut mempunyai peluang pasar ekspor, sedangkan perikanan darat, meskipun ada peluang ekspor, namun lebih dominan peluang pasar dalam negeri.

6. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kutai Timur perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan kawasan lindung, karena potensi kawasan pertambangan yang ada sekarang ini dimasa yang akan datang kemungkinan berada di kawasan lindung. Oleh karena itu mempertahankan kawasan lindung adalah upaya pertama, sedangkan upaya selanjutnya adalah revitalisasi kawasan bekas pertambangan, agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal dikemudian hari.

7. Kawasan Industri

Pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur diorientasikan pada pembentukan kawasan industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan industri kecil dengan membuat sentra-sentra industri. Pengembangan kawasan industri meliputi industri kecil dan industri besar, dengan pertimbangan-pertimbangan potensi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk dikembangkan. Pengembangan industri yang dilakukan mencakup industri hulu maupun hilir yang meliputi industri manufaktur dan industri pendukung pertanian.

Kawasan Industri direncanakan dengan pertimbangan memenuhi syarat zona industri, yaitu :

- a) Terletak pada jalur arteri



- b) Memenuhi syarat secara geografis
- c) Tersedia sumber air baku cukup
- d) Adanya sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah
- f) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif
- g) Menempati wilayah landai atau kemiringan lahan kurang dari 15%
- h) Daya dukung lahan dan potensi air bawah tanah sedang sampai tinggi
- i) Tidak rawan gerakan tanah, banjir dan bencana alam lainnya
- j) Aksesibilitas mudah

Berdasarkan kriteria di atas, maka pengembangan kawasan perindustrian terutama industri menengah besar dapat dilakukan di lokasi kecamatan yang masuk dalam jalur transportasi nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, yang sesuai peruntukannya adalah di Maloy. Sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat dikembangkan di Kota Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kaliorang, Muara Wahau dan Sangkulirang.

Kawasan industri dikembangkan di dekat kawasan pelabuhan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan sistem transportasi yang ada yaitu di Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang. Sehingga lahan yang diperlukan disediakan di sekitar kawasan perkotaan, sebagai bagian pengembangan kawasan perkotaan.

8. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial memberikan masukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur berupa daya tarik kesenian rakyat, bangunan peninggalan sejarah, produksi kerajinan rakyat ataupun atraksi keseharian masyarakat lokal.

9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi



permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan atas perkembangannya mencakup kawasan perkotaan di sekitar muara sungai, kawasan perdesaan di sekitar sungai dan kawasan transmigrasi. Sedangkan perkembangan yang terjadi seiring perubahan perilaku transportasi yang digunakan, maka banyak berkembang kawasan permukiman di sekitar jaringan jalan terutama pada kawasan atau lokasi yang cukup strategis.

Tuntutan perkembangan kawasan yang semakin berkembang maka akan banyak tuntutan pada pengembangan kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan, untuk itu perlu dipersiapkan kawasan-kawasan permukiman baru bagi pengembangan kawasan permukiman yang bisa berupa kawasan kota baru, desa baru dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi.

Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

a) Pemenuhan kebutuhan perumahan

Kebutuhan perumahan yang cukup besar memerlukan upaya penyediaan lahan, sebagai kawasan permukiman. Untuk itu kawasan permukiman bisa dikembangkan disekitar kawasan permukiman yang telah berkembang maupun kawasan baru yang memungkinkan. Permukiman ini bisa dikembangkan di beberapa lokasi terkait dengan kegiatan berikut; kawasan perkebunan sebagai plasma, kawasan hutan sebagai pengelola kehutanan, kawasan pertambangan dan industri serta di kawasan baru sebagai kota baru dan desa baru.

b) Penataan kawasan permukiman liar

Kawasan permukiman liar yang dimaksud adalah kawasan permukiman yang berkembang di kawasan yang bukan atau dilarang untuk permukiman, seperti di Taman Nasional Kutai. Penataan yang dimaksud mencakup pemahaman dan pemberdayaan masyarakatnya baik dari sisi pengetahuan hukum positif, pemberdayaan sosial dan ekonomi serta penyiapan lokasi baru atau tetap dilokasi tersebut tetapi dilakukan pembatasan-pembatasan dengan dilokalisasi terbatas.

c) Revitalisasi permukiman adat

Revitalisasi permukiman adat yang dilakukan merupakan upaya pelestarian bentuk dan fungsi perumahan yang ada, tetapi revitalisasi yang dilakukan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Revitalisasi permukiman adat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap adat dan budaya serta keraifan budaya lokal yang dimiliki oleh suku setempat.

d) Pengembangan permukiman perdesaan

Pengembangan permukiman perdesaan harus mendapat perhatian sebagai upaya mereduksi arus urbanisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi potensi perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, sehingga kawasan perdesaan akan semakin berkembang, jika kawasan pertanian juga diperhatikan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi yaitu rawan bencana banjir dan gerakan tanah.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi kawasan penanggulangan. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian alam yang lebih berorientasi pada masa depan demi kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
- b) Gerakan penghijauan lingkungan
- c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir

Kawasan rawan bencana terutama kawasan dengan kemiringan lahan yang landai seperti kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak



akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan bencana longsor yaitu wilayah yang mempunyai kelereng $>40\%$ terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Busang.

d. Aspek Demografis

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan maupun perencanaan program. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil tambang batu bara dan dengan wilayah hutan yang sangat luas, maka menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh dua faktor. *Pertama*, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. *Kedua*, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah penduduk Kutai Timur sebesar 213.762 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 527.723 jiwa tahun 2012. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak 168.036 jiwa atau sebesar 31,84 persen dari total penduduk Kutai Timur. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 7.961 jiwa atau sebesar 1,51 persen dari total penduduk Kutai Timur.



dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil tambang batu bara dan dengan wilayah hutan yang sangat luas, maka menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh dua faktor. *Pertama*, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. *Kedua*, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah penduduk Kutai Timur sebesar 213.762 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 527.723 jiwa tahun 2012. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak 168.036 jiwa atau sebesar 31,84 persen dari total penduduk Kutai Timur. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 7.961 jiwa atau sebesar 1,51 persen dari total penduduk Kutai Timur.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	213,762	245,817	367,247	430,865	527.723
2	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jiwa	5,100	32,055	121,430	63,619	96.858
3	Pertumbuhan Penduduk	(%)	2.44	15	49.40	17.32	22,47
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	5.98	6,14	7.36	12.05	14,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013,

Sementara itu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio 112,56 pada tahun 2011 menjadi 122,82 pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak daripada penduduk perempuan. Perubahan demografis ini dapat dimungkinkan karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak



didominasi oleh laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Timur berada diatas rata-rata rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 111.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu Kecamatan Sangatta Utara (24,99 persen), Kecamatan Bengalon (8,99 persen), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,28 persen).

Tabel 2.2
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Kecamatan	2008		2009		2010		2011		2012	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Muara Ancalong	6.346	5.880	6.470	6.193	7.286	6.745	8.861	8.061	9.913	9.013
Busang	2.188	1.898	2.307	2.036	3.124	2.790	3.691	3.282	4.286	3.722
Long Mesangat	2.275	1.856	2.454	2.099	3.729	3.157	4.483	3.860	5.236	4.454
Muara Wahau	6.873	5.757	9.674	8.179	11.750	9.752	14.497	11.977	17.688	14.659
Telen	3.058	2.533	3.592	3.044	4.577	3.608	5.780	4.585	7.143	5.671
Kongbeng	7.077	6.180	8.247	7.313	8.791	7.662	10.329	8.891	15.205	12.880
Muara Bengkel	5.836	5.436	6.203	6.276	8.427	7.708	9.620	8.555	11.609	10.353
Batu Ampar	1.583	1.357	2.779	2.641	3.665	3.182	3.724	3.173	4.334	3.627
Sangatta Utara	30.681	25.237	32.016	25.208	63.910	52.300	80.081	64.095	93.935	74.101
Bengalon	8.538	7.194	14.036	10.906	14.882	12.279	15.576	12.682	27.649	22.054
Teluk Pandan	7.514	6.187	6.967	5.540	11.864	9.826	12.364	10.051	15.864	12.515
Sangatta Selatan	3.654	3.087	10.031	8.947	18.667	15.600	21.417	17.708	23.918	19.635
Rantau Pulung	7.978	6.895	3.893	3.356	4.666	4.030	5.426	4.668	6.441	5.573
Kaliorang	3.627	3.109	4.523	3.854	4.980	4.319	7.775	6.614	9.145	7.783
Kaubun	3.962	3.370	4.002	3.363	5.010	4.161	5.518	4.541	7.696	6.282
Sengkulirang	7.701	6.766	8.362	7.369	13.057	11.316	12.691	10.700	13.999	11.755
Karangan	3.531	2.905	3.782	3.071	6.793	4.779	9.016	6.477	10.308	7.467
Sandaran	3.488	2.204	3.793	3.291	5.022	4.227	5.543	4.553	6.518	5.292
Jumlah	115.908	97.851	133.131	112.686	199.990	167.257	236.392	194.473	290.887	236.836
Jumlah L + P	213.759		245.817		367.247		430.865		527.723	
Rasio Jenis Kelamin	118.45		118.14		119.57		112.56		122.82	
Pertumbuhan (%)	2.44		15.00		9.29		17.32		22.47	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara hingga tahun 2012 sebesar 31,84 persen. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Persebaran penduduk di kecamatan lain relatif sedikit karena merupakan kecamatan-kecamatan pemekaran dan aksesibilitas yang masih kurang baik. Selanjutnya Kecamatan Bengalon mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mengingat di kecamatan tersebut juga dibuka perusahaan pertambangan.

Tabel 2.3
Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008–2012

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Ancalong	5,67	5,15	3,82	3,93	3,59
2	Busang	1,90	1,77	1,61	1,62	1,52
3	Long Mesangat	1,93	1,85	1,88	1,94	1,84
4	Muara Wahau	5,86	7,26	5,85	6,14	6,13
5	Telen	2,60	2,70	2,23	2,41	2,43
6	Kongbeng	6,15	6,33	4,48	4,46	5,32
7	Muara Bengkal	5,22	5,08	4,37	4,22	4,16
8	Batu Ampar	1,36	2,20	1,86	1,60	1,51
9	Sangatta Utara	25,89	23,28	31,61	33,46	31,84
10	Bengalon	7,30	10,15	7,36	6,56	9,42
11	Teluk Pandan	6,35	5,09	5,91	5,20	5,38
12	Sangatta Selatan	6,90	7,72	9,32	9,08	8,25
13	Rantau Pulung	3,12	2,95	2,37	2,34	2,28
14	Kaliorang	3,40	3,41	2,53	3,34	3,21
15	Kaubun	2,99	3,00	2,50	2,33	2,65
16	Sangkulirang	6,70	6,40	6,64	5,43	4,88
17	Karangan	3,54	2,79	3,15	3,60	3,37
18	Sandaran	3,13	2,88	2,52	2,34	2,24
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk kecamatan mengalami penurunan jumlahnya dan sebagian kecamatan lainnya mengalami peningkatan seperti Kecamatan Bengalon yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan disbanding dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 2,86 persen atau sekitar 21.445 jiwa dari penduduk Kabupaten Kutai Timur. Pergeseran penduduk antar kecamatan tersebut terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan



ekonomi yang meningkat.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2012 sebagaimana Tabel 2.9, tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 61.964 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 59.003 jiwa dan selanjutnya umur 30-34 tahun sebanyak 53.704 jiwa.

Tabel 2.4
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008-2012

No	Kelompok Umur	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	0 - 4	19,425	21,428	22,501	19,982	47.225
2	5 - 9	24,987	2,699	28,063	45,438	51.713
3	10 - 14	21,183	23,186	24,259	41,464	45.604
4	15 - 19	1,838	20,383	21,455	35,260	48.372
5	20 - 24	10,317	2,132	22,392	43,173	59.003
6	25 - 29	18,198	20,199	21,272	50,591	61.964
7	30 - 34	19,569	21,572	22,644	49,758	53.704
8	35 - 39	20,242	22,245	23,317	40,585	44.019
9	40 - 44	15,709	17,712	18,784	34,285	34.554
10	45 - 49	12,371	14,374	15,447	24,008	24.099
11	50 - 54	9,351	11,354	12,426	17,835	17.968
12	55 - 59	5,889	7,892	8,965	11,413	10.579
13	60 - 64	4,127	613	7,203	7,651	6.721
14	65 - 69	2,808	4,811	5,884	4,343	4.023
15	70 - 74	1,259	3,262	4,335	2,612	2.334
16	75 +	947	2,957	4,025	2,467	1.970
Jumlah		208.662	213.762	245.817	430.865	527.723

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Dari Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari *dependency ratio* sebagai daerah terbuka yang terkenal potensi sumber daya alam yang melimpah, menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama dari mereka yang datang untuk bekerja/mencari kerjake daerah ini, dimana sebagian besar berusia antara 16-40 tahun pada usia produktif.



2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRB juga dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-tiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2008-2012 antara 85,89 persen sampai 88,97 persen dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan Migas.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2008-2012 cenderung meningkat dari Rp24.391.455,20juta di tahun 2008 menjadi Rp50.173.447,91 juta pada tahun 2012. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 24.391.455,20 juta, Rp 27.380.004,69 juta, Rp 34.179.895,99 juta, Rp 41.206.892,30 juta, dan Rp 50.173.447,91. PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasarharga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2008-2012 berturut-



turut sebesar Rp 3.630.633,06 juta, Rp 4.101.439,75 juta, Rp 4.701.103,10 juta, Rp 4.452.869,43 juta, dan Rp 6.379.800,64 juta.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dari (-0,86 persen) tahun 2008 menjadi 12,28 persen pada tahun 2012, tanpa migas dari tahun 2008 (-1,03 persen) menjadi 12,41 persen pada tahun 2012, serta tanpa migas dan batubara dari tahun 2008 sebesar 5,16 persen menjadi 7,61 persen pada tahun 2012. Dari beberapa periode seperti tampak dalam Tabel 2.10 memberikan gambaran bahwa komposisi pembentukan PDRB masih didominasi oleh batubara. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.



Tabel 2.5
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

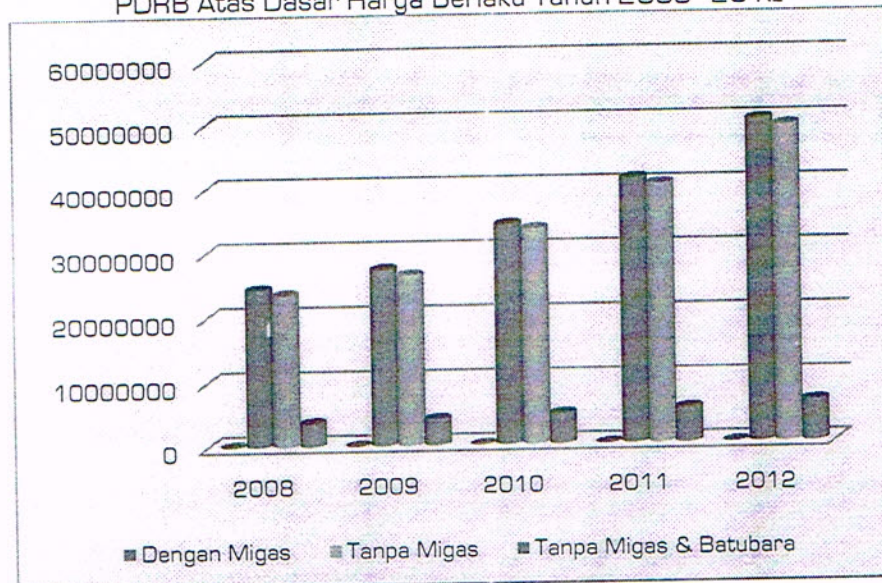
Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2008	24.391.455,20	14.706.782,47	23.521.639,69	14.505.373,10	3.630.633,06	1.936.780,71	-0,86	-1,03	5,16
2009	27.380.004,69	15.530.301,70	26.430.182,46	15.313.671,39	4.101.439,75	2.017.156,18	5,58	5,57	4,15
2010	34.179.895,99	16.972.264,28	33.427.758,31	16.808.371,51	4.701.103,10	2.140.410,93	9,28	9,76	6,11
2011	41.206.892,30	18.906.134,22	40.358.574,95	18.746.104,78	5.452.869,43	2.288.487,23	11,43	11,53	6,92
2012*	50.173.447,91	21.227.122,19	49.212.005,10	21.071.592,15	6.379.800,64	2.462.611,44	12,28	12,41	7,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2013

*) Angka Forecast dengan Regresi Linear

Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara juga relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwasanya potensi batubara merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur. Sektor migas dan sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur, namun bukan berarti sektor migas dan sektor lainnya selayaknya tidak diperhatikan/diurusi melainkan justru sektor migas dan sektor lainnya masih berpotensi untuk dikelola secara lebih maksimal lagi.

Gambar 2. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012



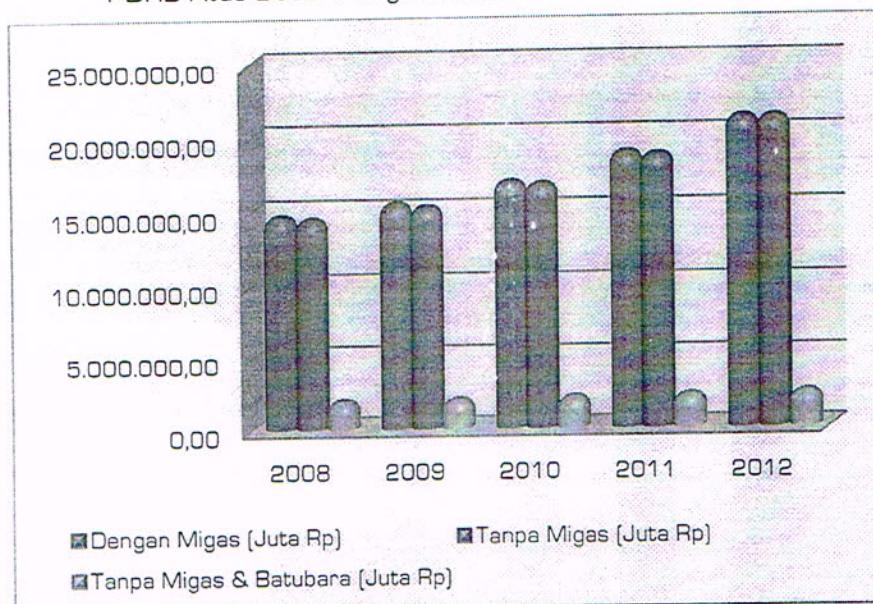
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 menjelaskan betapa peranan sektor migas dan pertambangan [batubara] sangat dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Peranan subsektor pertambangan batubara sangat mempengaruhi besaran PDRB. Kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian bahwa terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang batubara hingga 86 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara.

Oleh karenanya visi Kabupaten Kutai Timur yakni "**Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri**" perlu segera ditindaklanjuti dan dikembangkan dengan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi ketergantungan PDRB terhadap subsektor pertambangan batubara. Penguatan

kualitas SDM yang berkompetensi dalam sektor pertanian serta mengutamakan kebijakan dan program-program yang terkait dengan sektor pertanian menjadi prioritas bagi segenap pemangku kepentingan.

Gambar 2. 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008–2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

a) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan suatu sektor terhadap sektor lainnya di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya cukup besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stabil antara 4,29 persen - 5,04 persen. sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4 persen.

Sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi kurang dari 1 persen. Hal tersebut sekilas memberikan penggambaran bahwasannya Kabupaten Kutai Timur belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder apalagi sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya diantaranya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 3,43 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berpeluang menjadi



sektor penopang bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir. Subsektor perdagangan maupun subsektor Hotel dan Restoran perlu mendapatkan dorongan agar menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan angkatan kerja pada sektor pertambangan.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini:



Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (Juta Rp)

No	Sektor Usaha	2008		2009		2010		2011		2012*	
		Harga berlaku (3)	% (4)	Harga berlaku (5)	% (6)	Harga berlaku (7)	% (8)	Harga berlaku (9)	% (10)	Harga berlaku (11)	% (12)
1	Pertanian	1.066.664,71	4,37	1.196.216,10	4,18	1.292.751,66	3,66	1.490.826,57	3,62	1.752.385,65	3,49
2	Pertambangan dan Penggalian	20.948.875,48	85,89	24.599.820,24	85,97	29.705.414,58	87,34	36.013.593,16	87,40	44.089.901,15	87,87
3	Industri Pengolahan	71.141,18	0,29	86.433,78	0,30	95.255,08	0,27	104.037,21	0,25	112.805,68	0,22
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	27.590,11	0,11	30.068,20	0,11	32.177,87	0,09	36.317,90	0,08	40.490,51	0,08
5	Bangunan dan Konstruksi	561.392,24	2,30	654.900,38	2,29	692.968,40	1,96	776.214,54	1,88	869.461,02	1,73
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	859.215,92	3,52	999.167,91	3,49	1.213.959,94	3,43	1.442.338,05	3,50	1.727.152,66	3,44
7	Pengangkutan dan Komunikasi	461.435,07	1,89	542.403,46	1,90	597.836,41	1,69	712.059,20	1,73	849.551,11	1,69
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	237.952,62	0,98	246.713,83	0,86	259.582,53	0,73	288.514,55	0,70	321.176,36	0,64
9	Jasa jasa	157.187,86	0,64	258.455,07	0,90	289.949,88	0,82	342.991,13	0,83	410.523,76	0,82
	Jumlah	24.391.455,20	100,00	27.380.004,69	100,00	34.179.895,99	100,00	41.206.892,31	100,00	50.173.447,91	100,00

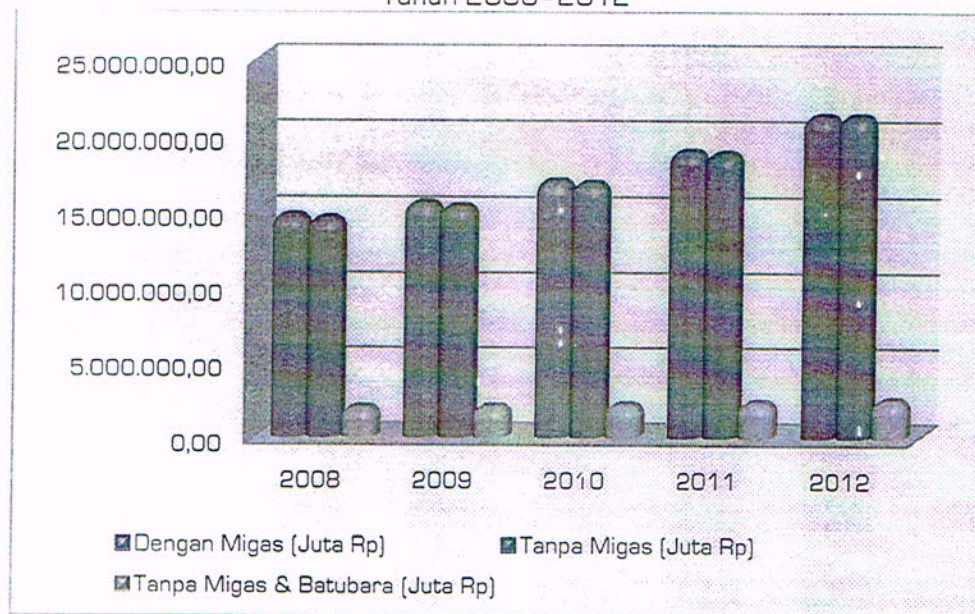
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2012
Keterangan : *) Angka sementara



Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam dua tahun terakhir (2011-2012) masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalan. Bahkan terus mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB dari 87,40 persen meningkat menjadi 87,87 persen. Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya justru mengalami penurunan, tidak terkecuali sektor pertanian yang menjadi tumpuan bagi pengembangan agribisnis Kabupaten Kutai Timur juga mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi bukan karena terjadi penurunan sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan, melainkan masih mendominasi sektor pertambangan dan penggalan di Kabupaten Kutai Timur.

Namun bila nilai PDRB tidak mengikutsertakan migas dan batubara, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian disusul sektor bangunan. Sementara itu subsektor pekebunan merupakan penyumbang terbesar pada sektor pertanian. Oleh karenanya di masa mendatang, sektor pertanian masih berpeluang dan diharapkan menjadi sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada agribisnis.

Gambar 2.3
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013



b) Struktur Perekonomian Tanpa Migas dan Batubara

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, migas dan bahan tambang lainnya, akan tetapi komoditi-komoditi tersebut adalah komoditi SDA yang tidak dapat terbaharui (*unrenewable*). Perubahan yang terjadi pada komoditi tambang tersebut khususnya batubara baik pada produksi maupun harga, pasti berpengaruh terhadap besarnya sumbangan sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan bangunan. Jika komoditi batubara dan migas ini dikeluarkan dari PDRB Kabupaten Kutai Timur maka peranan sektor-sektor lainnya akan lebih nyata terlihat pengaruh dan andilnya.

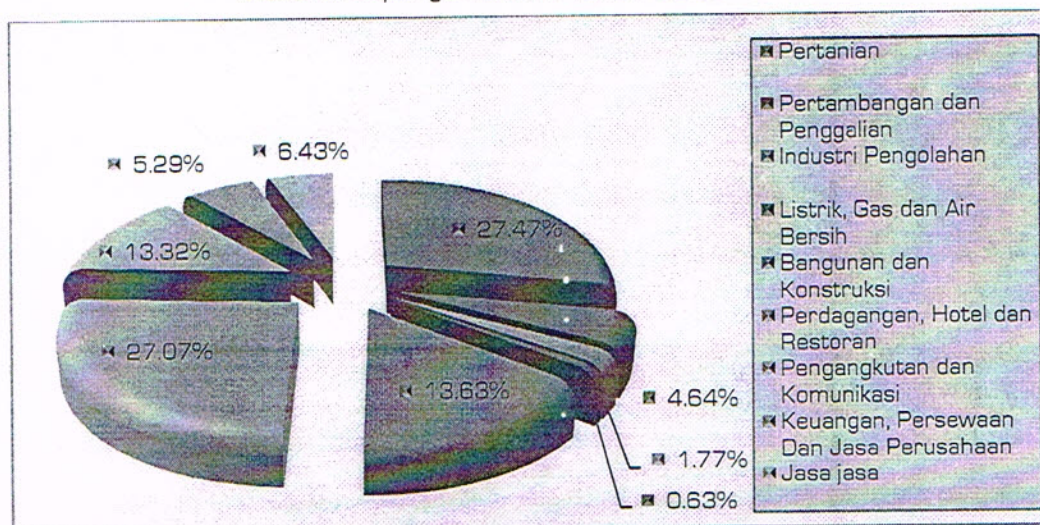
Tabel 2.7
Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2008-2012

No	Sektor Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	29,38	29,17	27,50	27,34	27,47	28,17
2	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,22	4,82	4,76	4,64	4,92
3	Industri Pengolahan	1,96	2,11	2,03	1,91	1,77	1,96
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,76	0,73	0,68	0,67	0,63	0,69
5	Bangunan dan Konstruksi	15,46	15,97	14,74	14,23	13,63	14,81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,67	23,32	25,82	26,45	27,07	25,27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12,71	13,22	12,72	13,06	13,32	13,01
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	6,55	6,02	5,52	5,29	5,03	5,68
9	Jasa jasa	4,33	4,24	6,17	6,29	6,43	5,49
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2008-2012, sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 27,47 persen dengan sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar. Urutan kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan *share* 27,07 persen, kemudian disusul sektor bangunan dan konstruksi sebesar 13,63 persen. Selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,06. Sedangkan sektor lainnya jasa-jasa, keuangan dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan dibawah 7 persen.

Gambar 2. 4
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

c) PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB Per Kapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Sedangkan pendapatan regional per kapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.

Tabel 2.8
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008- 2012

Tahun	Dengan Migas (Rp)		Tanpa Migas		Tanpa Migas dan Batubara	
	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	124.678.382	93.786.458	120.232.268	90.359.086	18.558.198	13.660.882
2009	133.687.480	100.586.075	129.048.113	97.009.737	19.984.304	14.737.057
2010	133.704.808	100.632.986	147.289.796	109.806.734	22.365.470	16.580.640
2011	150.211.374	114.343.403	147.119.005	113.305.620	19.877.330	14.726.711
2012*	190.866.088	139.928.608	187.634.938	138.204.652	22.761.481	16.903.179

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

*] Angka Sangat Sementara



PDRB perkapita pada tahun 2008-2012 cenderung meningkat pada setiap tahunnya, demikian pula halnya dengan pendapatan regional per kapita. Sejalan dengan distribusi PDRB yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, maka akan terlihat besaran PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan. Selisih antara PDRB perkapita yang tidak terpaut begitu jauh dengan pendapatan regional perkapita menunjukkan bahwasanya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur tidak begitu besar. Dengan kata lain, seluruh masyarakat secara mayoritas ikut menikmati dampak adanya pembangunan yang terjadi di daerah. Secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan terjadinya perbaikan taraf hidup masyarakat.

Namun penting untuk diperhatikan bahwa antara PDRB perkapita (dengan migas) dibandingkan dengan PDRB perkapita (tanpa migas dan batubara) selama kurun waktu 2008 hingga 2012, mencerminkan kesenjangan hasil pembangunan yang didapatkan oleh pelaku-pelaku pembangunan antara sektor pertambangan (khususnya) dengan sektor-sektor diluar sektor pertambangan. Dengan kata lain, hasil pembangunan di Kabupaten Kutai Timur masih menggantungkan pada sektor dominan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bila kondisi tersebut tidak diiringi dengan upaya percepatan pembangunan di sektor-sektor lainnya, maka dalam jangka panjang struktur PDRB akan semakin tergantung pada keberadaan sektor pertambangan. Sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang tidak terbarukan.

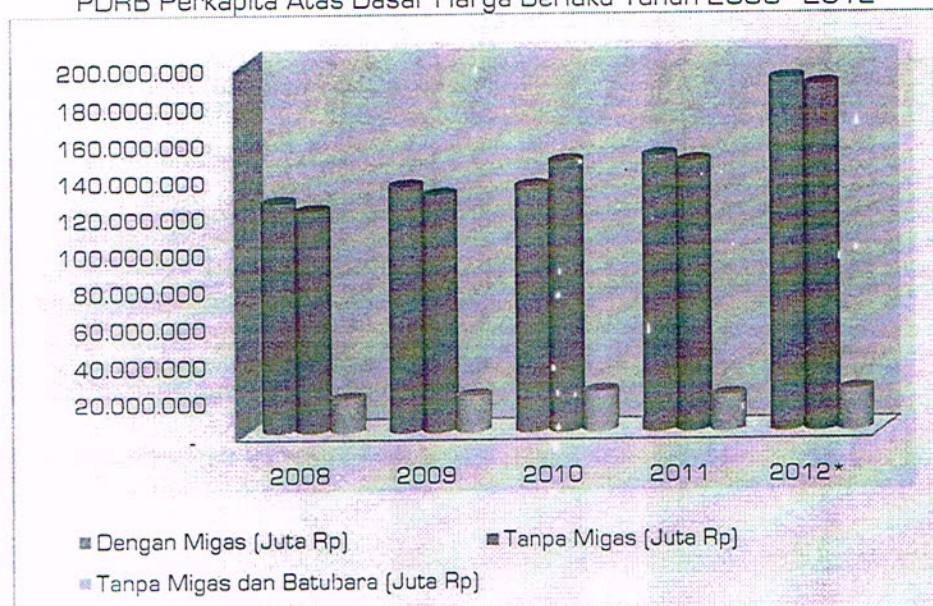
Berdasarkan komposisi PDRB perkapita seperti ini maka diperlukan usaha ekstra keras untuk melepaskan dari ketergantungan terhadap hasil tambang yang demikian dominan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor di luar non migas dan non pertambangan melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Karena hal ini seiring dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa mendatang.

Sementara itu pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka



akan dihasilkan suatu pendapatan regional perkapita. Namun demikian pendapatan regional tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk di daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi dan mengalir ke pihak luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tersebut.

Gambar 2.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 2.6 tampak bahwa pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2008-2012 tetap mengalami peningkatan cukup berarti. Tidak terjadi perbedaan antara pendapatan perkapita total dengan pendapatan regional tanpa migas. Namun bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita tanpa migas dan batubara nampak jelas kesenjangannya. Kondisi ini dapat dimengerti karena kontribusi minyak dan batubara memberi sumbangan terhadap pendapatan regional hingga 87 persen.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 untuk implementasinya pelaksanaan hingga tahun 2012 sesuai dengan prioritas pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2012 maupun evaluasi dengan indikator-indikator RPJMD dapat dijabarkan berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.116 di bawah ini:



Tabel 2.116
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD

Kode (1)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (2)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3)	Satuan (4)	Target RKPD Tahun 2012 (5)	Realisasi RKPD Tahun 2012 (6)	Tingkat Realisasi (%) (7)	Interpretasi (*) (8)	SKPD Penanggung Jawab (9)
1	URUSAN WAJIB							
1.01	Pendidikan							
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka melek huruf	%	97.70	98.25	100.56%	Melampaui	Dinas Pendidikan
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia >15 th melek huruf (tidak buta aksara)	orang	180.000.00	179.721.00	99.85%	Belum Tercapai	
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97.30	99.51	102.27%	Melampaui	
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	76.00	63.93	84.12%	Belum Tercapai	
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	%	55.00	52.01	94.56%	Belum Tercapai	
1.01.24	Program Peningkatan Pendidikan Agama	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD	permil	36.95	6.24	16.88%	Belum Tercapai	
1.01.34	Program Pembinaan dan Pernyayarakatan Olah Raga	Jumlah sekolah dasar yang tersedia	jumlah	200.00	203.00	101.50%	Melampaui	
1.01.40	Program Pengawas Sekolah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP	permil	39.22	6.01	15.34%	Belum Tercapai	
1.01.41	Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Jumlah sekolah menengah pertama yang tersedia	jumlah	80.00	79.00	98.75%	Belum Tercapai	
		Rasio ketersediaan sekolah thd penduduk usia SMA/SMK	permil	40.48	3.46	8.54%	Belum Tercapai	
		Jumlah SMA/SMK yang tersedia	jumlah	50.00	43.00	86.00%	Belum Tercapai	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	90.00				
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	90.00				
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	95.00	65.26	68.69%	Belum Tercapai	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.11	0.28	0.00%	Belum Tercapai	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.23	0.67	0.00%	Belum Tercapai	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.23	0.67	0.00%	Belum Tercapai	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.00	99.83	100.84%	Melampaui	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.00	99.91	100.92%	Melampaui	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89.55	82.66	92.31%	Belum Tercapai	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97.50	92.19	94.55%	Belum Tercapai	
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.42	13.54	160.81%	Melampaui	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98.00	94.11	96.03%	Belum Tercapai	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	97.00	94.11	97.02%	Belum Tercapai	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	66.63	63.93	95.95%	Belum Tercapai	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99.00	99.14	100.14%	Melampaui	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99.50	95.13	95.61%	Belum Tercapai	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-19	%	70.56	63.45	89.92%	Belum Tercapai	
		Rasio guru/murid (SD)	%	99.00	6.81	6.88%	Belum Tercapai	
		Rasio guru/murid (SMP)	%	95.50	6.93	7.25%	Belum Tercapai	
		Rasio guru terhadap murid (SMA/SMK)	%	18.68	8.66	46.38%	Belum Tercapai	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	45.79	59.17	129.22%	Melampaui	
1.02	Kesehatan							
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka usia harapan hidup	%	70.16	68.79	98.05%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.16	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	%	10.87	12.21	112.33%	Melampaui	
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	75.00	53.00	70.67%	Belum Tercapai	
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	16.12	100.00	620.35%	Melampaui	
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%	78.08		0.00%		



Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0.45	0.46	102.22%	Melampaui	
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kelangsungan hidup bayi	permil	911.70	984.35	107.97%	Melampaui	
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	60.55	49.60	81.92%	Belum Tercapai	
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan nifas	%	40.57	47.96	118.22%	Melampaui	
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	22.62	16.15	71.40%	Belum Tercapai	
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan pelayanan anak balita	%	15.09	21.63	143.34%	Melampaui	
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.02	0.03	150.00%	Melampaui	
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan puskesmas	%	105.56	116.67	110.52%	Melampaui	
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan pembantu puskesmas	%	72.15	73.33	101.64%	Melampaui	



Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (2)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3)	Satuan (4)	Target RKPD Tahun 2012 (5)	Realisasi RKPD Tahun 2012 (6)	Tingkat Realisasi (%) (7)	Interpretasi *) (8)	SKPD Penanggung Jawab (9)
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.39	0.28	71.79%	Belum Tercapai	
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Rasio tenaga paramedis /penduduk	%	6.69	1.67	24.96%	Belum Tercapai	
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per penduduk	%	1.74	0.37	21.26%	Belum Tercapai	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	56.00	65.60	117.14%	Melampaui	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	55.00	36.30	66.00%	Belum Tercapai	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	70.00	25.39	36.27%	Belum Tercapai	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	85.00	79.00	92.94%	Belum Tercapai	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	32.00	30.00	93.75%	Belum Tercapai	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	81.00	1.45	1.79%	Belum Tercapai	
		Cakupan kunjungan bayi	%	65.00	79.38	122.12%	Melampaui	



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100.00	5.30	5.30%	Belum Tercapai	
		Tingkat ketersediaan profil kesehatan	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
1.03	Pekerjaan Umum							
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	80.00	80.41	100.51%	Melampaui	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	60.00	58.53	97.54%	Belum Tercapai	
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0.10	0	100.00%	Melampaui	
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio panjang jalan dilalui Roda 4	%	58.00	45.51	78.46%	Belum Tercapai	
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio Jaringan Irigasi	%	60.00				
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	meter	24,591.00	24,591.00	100.00%	Sesuai	
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0.15				



Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	62.00				
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Luas ingasi Kabupaten dalam kondisi baik	m ²	3.450.00	3.450.00	100.00%	Sesuai	
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	49.25	40.50	82.23%	Belum Tercapai	
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	Pembangunan turap baru	meter	590.00	590.00	100.00%	Sesuai	
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	Rasio tempat ibadah per satuan (seribu) penduduk Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersantasi Rasio permukiman layak huni	% % % %	3.00 Sesuai Standar 67.50 90.00 56.80	2.94 Sesuai Standar 90.00 35.00	98.00% 100.00% 133.33% 61.62%	Belum Tercapai Melampaui Belum Tercapai	
1.04	Perumahan							
	Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Rumah tangga pengguna air bersih	%	70.44	13.87	19.69%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan	Memenuhi standart kualitas air bersih		Ya	Ya	100.00%	Sesuai	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rumah tangga pengguna listrik	jumlah	27.453.00	27.453.00	100.00%	Sesuai	
	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Rasio ketersediaan daya listrik	%	84.00	46.81	55.73%	Belum Tercapai	



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	33.00	39.75	120.46%	Melampaui	
		Rasio rumah layak huni	%	85.00	35.00	41.18%	Belum Tercapai	
1.05	Penataan Ruang							
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	40.00	6.44	16.11%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio RTH di lingkungan SKPD yang ditetapkan dengan SK Bup	%	100.00	19.98	19.98%	Belum Tercapai	
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	% Kenakan	10.00	20.00	200.00%	Melampaui	
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	100.00%	Sesuai	
		Ketaatan terhadap RTRW	%	100.00			Belum Tercapai	
1.06	Perencanaan Pembangunan dan Statistik							
1.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
1.06.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	
1.07	Perhubungan							
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis						Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informasi
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Terminal	unit	10.00	12.00	120.00%	Melampaui	
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	jumlah Pelabuhan Laut	unit	2.00	3.00	150.00%	Melampaui	
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat	kali	72.600.00				
1.07.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rasio ijin trayek	%	10.00	8.00	80.00%	Belum Tercapai	
1.07.20	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	kali	1.000.00	3.777.00	377.70%	Melampaui	
	Program Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Angkutan darat	%	59.00				



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kepernikn KIR angkutan umum	%	100.00				
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	hari	1.00				
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Sesuai Standart	Sesuai	Sesuai	100.00%	Sesuai	
		Pemasangan Rambu-rambu	Sesuai Standart	Sesuai	Sesuai	100.00%	Sesuai	
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	1.53				
		Jumlah arus Angkutan Umum Laut/ Udara	kali	515.00				
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
		Jumlah Pelabuhan Udara	unit	11.00	13.00	118.18%	Melampaui	
		Jumlah Penerbangan	PP	876.00	876.00	100.00%	Sesuai	
		Jumlah Penumpang	orang	27.360.00	27.360.00	100.00%	Sesuai	
1.08	Lingkungan Hidup							
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengijinaan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%					Badan Lingkungan Hidup
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	55.00	29.88	54.33%	Belum Tercapai	
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	75.00	66.26	88.35%	Belum Tercapai	



Bab 11 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Penegakan hukum lingkungan	%	35.00	0	0.00%	Belum Tercapai	
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk berakses air minum	%	50.00	13.87	27.74%	Belum Tercapai	
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi laut dan hutan	Pencemaran status mutu air	kelas	II	II	100.00%	Sesuai	
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	%	28.00	44.44	158.73%	Melampaui	
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	%	41.00	44.44	108.40%	Melampaui	
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	Pelaksanaan penetapan status mutu air	%	26.00	44.44	170.94%	Melampaui	
		Persentase penanganan sampah	%	65.00	45.00	69.23%	Belum Tercapai	
		Persentase Luas pemukiman yang tertata	Kenaikan	naik minimal 10%				
		Tempat penbuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	45.00				



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (2)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3)	Satuan (4)	Target RKPD Tahun 2012 (5)	Realisasi RKPD Tahun 2012 (6)	Tingkat Realisasi (%) (7)	Interpretasi (*) (8)	SKPD Penanggung Jawab (9)
1.09	Pertanahan	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	48.00	13.87	28.90%	Belum Tercapai	
1.09.16	Program Penataan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00				Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100.00				
1.09.19	Program Pertanahan	Terkatasnya kegiatan pembebasan tanah bangunan		Ya	Ya	100.00%	Sesuai	
		Persentase penduduk yang memiliki lahan	permil	890.00				
		Luas lahan yang dimiliki penduduk	hektar	87.000.00	86.914.45	99.90%	Belum Tercapai	
		Persentase luas lahan bersertifikat	Kenaikan	Naik Minimal 10%				
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	90.00	71.90	79.89%	Belum Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Bidang Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100.00	46.13	46.13%	Belum Tercapai	
	Program Bidang Pelayanan Penduduk	Rasio pasangan berakte nikah	%	75.00	4.01	5.35%	Belum Tercapai	
	Program Bidang Aplikasi dan Data	Kepemilikan KTP	%	90.00	61.30	68.11%	Belum Tercapai	



Gab II 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi [%]	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	permil	750.00	222.73	29.70%	Belum Tercapai	
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		Ada Lengkap	Ada Lengkap	100.00%	Sesuai	
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	75.00	61.30	81.73%	Belum Tercapai	
1.11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
1.11.26	Program Penguatan KKB	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.00	2.00	100.00%	Sesuai	Badan Pemberdaya an Perempuan dan KKB
1.11.27	Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)/Penyediaan dukungan operasional IMP	Peserta KB Baru	jumlah	3,849.00	5,851.00	152.01%	Melampaui	
1.11.28	Program Pembinaan Kemirraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	Rasio akseptor KB	%	84.55	52.87	62.54%	Belum Tercapai	
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Cakupan peserta KB aktif	%	84.55	63.91	75.59%	Belum Tercapai	
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22.43				
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
1.12.15	Program Keluarga Berencana	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1000				
1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	90.00				



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Satuan	TARGET RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi [%]	Interpretasi *)	SKPD Peninggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.12.17	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio KORT		Menurun	Meningkat	0.00%	Sesuai	
1.12.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ K/R yang mandiri	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	100.00%	Sesuai	
1.12.19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	35.00				
1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100.00				
1.12.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkotika, PMS Termasuk HIV/AIDS							
1.12.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak							
1.12.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga							
1.12.24	Program pengembangan model operasional EKB-Pesyandu- PADU							
1.12.25	Program peningkatan manajemen KB							
1.12.26	Program Kesehatan Ibu dan Anak							



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.13	Sosial							
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan PMKS yg mendapatkan bantuan sosial	%	35.25	12.72	36.09%	Belum Tercapai	Dinas Sosial
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dijamin melalui jaminan sosial	Jumlah	3.605.00	3.605.00	100.00%	Sesuai	
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	66.83				
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah panti sosial	unit	6.00	6.00	100.00%	Sesuai	
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)							
1.13.21	Program Pemberdayaan Keterampilan Kesejahteraan Sosial							
1.13.22	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin							
1.13.23	Program Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial							



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	TARGET RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.14	Ketenagakerjaan							
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	71.07				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Angka Pengangguran	%	4.58				
1.14.17	Program Pertindangan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.50				
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	2.372.17				
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)	Jumlah Paket training Ketramplilan yang diselenggarakan disnaker atau pihak lain	Paket	18.00	7.00	38.89%	Belum Tercapai	
1.15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rasio ketergantungan	rasio	33.45				
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi aktif	Meningkat/ Tidak	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	TARGET RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelenbagaan Koperasi	Jumlah BPR/LKM	Meningkat/ Tidak	Meningkat	Tidak	0.00%	Belum Tercapai	Kecil Menengah
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)	Nilai Kredit BPD untuk UMKM	Juta Rp	34.402.00	34.402.00	100.00%	Sesuai	
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	Posisi Kredit BPD untuk UMKM	Meningkat/ Turun/ Tetap	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit UMKM	unit	645.00	645.00	100.00%	Sesuai	
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri	Posisi Unit UMKM	Jumlah	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saling Koperasi							
1.16	Penanaman Modal							
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat/ Turun/Teta p	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	Badan Penanaman Modal Daerah
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMA	Juta Rp	142.736.00	142.736.00	100.00%	Sesuai	



Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.16.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp	1.521,293.00	1.521,293.00	100.00%	Sesuai	
		Nilai Investasi PMTB	Juta Rp	11,900.00	11,900.00	100.00%	Sesuai	
		Posisi Kredit Bank	Juta Rp	4,633,433.00	4,633,433.00	100.00%	Sesuai	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMMA)	Meningkat/ Turun/ Tetap	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
		Posisi Simpanan Masyarakat di perbankan	Meningkat/ Turun/ Tetap	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
		Nilai Simpanan Masyarakat di perbankan	Juta Rp	2,700,000.00	2,668,133.00	98.82%	Belum Tercapai	
		Jenis dan jumlah bank dan cabang	unit	15.00				
1.17	Kebudayaan							
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah gedung Kebudayaan	unit	2.00	2.00	100.00%	Sesuai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengelolaan dan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	12.00				
1.17.20	Program Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Jumlah komunitas peninat seni	Kelompok	179.00	179.00	100.00%	Sesuai	
1.17.21	Program Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	kali	12.00				
1.17.22	Program Evaluasi Pelaporan Keaneekaragaman Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	



Bag II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan [output]	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.17.23	Program Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah							
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya							
1.17.26	Program Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat							
1.17.27	Program Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah							
1.18	Kepemudaan dan Olahraga							
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah gedung olahraga	unit	2.00	2.00	100.00%	Sesuai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	Sesuai Kondisi				
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	kali	Sesuai Kondisi				
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	Sesuai Kondisi				
1.18.25	Program Pembinaan Olahraga Berbakat	Lapangan olahraga	unit	Sesuai Kondisi	123.00	100.00%	Sesuai	
		Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	Sesuai Kondisi	28.00	100.00%	Sesuai	
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kali	Sesuai Kondisi	4.00	100.00%	Sesuai	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							



Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Peranggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	Minimal Sesuai dg Kondisi Ekisting	2.00	100.00%	Sesuai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.16	Program pemeliharaan kantor/bimas dan pencegahan tindak kriminal	Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	Minimal Sesuai dg Kondisi Ekisting	3.00	100.00%	Sesuai	
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	%	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
1.19.27	Program peningkatan Kewaspadaan Diri Masyarakat Daerah	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/keurahan	% Kenakan	10.00				
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Diri Masyarakat Daerah	Banyaknya peristiwa kejahatan yang terjadi	kasus	<100	128.00	72.00%	Belum Tercapai	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Angka kriminalitas	%	6.50				
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagan Pemerintahan Daerah	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	ada	ada	100.00%	Sesuai	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% Kenakan IKM yang mempunyai ijin usaha.	% Kenakan	40.00	39.00	97.50%	Belum Tercapai	



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Lama proses perijinan	hari	300				
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pertumbuhan PDRB	%	7.00	12.28	175.43%	Melampaui	Setda Bagian Ekonomi
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	PDRB per kapita	Rupiah	169.494.371,47	191.260.034,00	112.84%	Melampaui	
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Pendapatan per kapita	Rupiah	152.357.725,00	152.357.725,00	100.00%	Sesuai	
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	7.63				
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	IPM	%	75.76				
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Tingkat Inflasi	%	6.71	6.71	100.00%	Sesuai	Setda Bagian Ekonomi
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pertumbuhan ekonomi	% Kenaikan	7.00	5.57	79.57%	Belum Tercapai	



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Kemiskinan	%	7,63				
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penegakan PERDA	%	100,00				Sekretariat Daerah, Semua Bagian
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) di Kabupaten	%	100,00				
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100,00				
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	ada	ada		100,00%	Sesuai	
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	90,00				
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintah Daerah	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	7,605,947,21				
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Angka kriminalitas yang tertangani	%	50,00				
1.21	Ketahanan Pangan	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	jenis	27,00	23,00	85,19%	Belum Tercapai	Dinas Pendapatan
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Ketersediaan pangan utama	ton	41,630,00	36,072,00	86,65%	Belum Tercapai	Badan Ketahanan



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Pangung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan	Jumlah Kelompok Tani dan Peternak yang aktif.	Kelompok	148.00	140.00	94.59%	Belum Tercapai	Pangan dan Penyuluhan
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Luas lahan tanaman pangan yang produktif, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ha kw/ha/tahu n	28.806.00 48.00	27.025.00 40.98	93.82% 85.38%	Belum Tercapai	
		Regulasi ketahanan pangan	ada/tidak	Ada	Ada	100.00%	Sesuai	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	jumlah	Sesuai Kondisi				Badan Pemberdaya an
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	PKK aktif	jumlah	Sesuai Kondisi				Masyarakat dan Pemerintah n Desa
1.22.21	Program Peningkatan Kelembagaan Keswadayaan	Posyandu aktif	jumlah	Sesuai Kondisi	244.00	100.00%	Sesuai	
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM							
1.24	Kearsipan							
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	%	19.50				Kantor Perpustakaan n, Arsip dan Dokumentasi Daerah
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	6.00	6.00	100.00%	Sesuai	
1.25	Komunikasi dan Informatika							



Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penanggung Jawab
1.25.09 (1)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah surat kabar nasional	jumlah	3.00	6.00	200.00%	Melampaui	Dinas Pertubangan Kommunikasi dan Informasi
1.25.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah surat kabar lokal	jumlah	1.00	1.00	100.00%	Sesuai	
1.25.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah penyiaran radio lokal	kecamatan	8.00	6.00	75.00%	Belum Tercapai	
1.25.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah penyiaran TV lokal	kecamatan	8.00	5.00	62.50%	Belum Tercapai	
1.25.19	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Kecamatan yang terjangkau komunikasi telepon selular	kecamatan	8.00	6.00	75.00%		
1.25.26	Program Pengembangan Kommunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon kabel	%	3.43	3.43	100.00%	Sesuai	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon selular	%	93.23	93.23	100.00%	Sesuai	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan komputer	%	4.92	4.92	100.00%	Sesuai	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan internet	%	16.19	16.19	100.00%	Sesuai	
		Website milik SKPD	jumlah	53.00	10.00	18.87%	Belum Tercapai	
		Web site milik penda	ada/tidak	ada	ada	100.00%	Sesuai	
		Pameran/expo	kali	4.00	1.00	25.00%	Belum Tercapai	
1.26	Perpustakaan							
1.26.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Jumlah perpustakaan	jumlah	18.00	18.00	100.00%	Sesuai	Kantor Perpustakaan



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (2)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3)	Satuan (4)	Target RKPD Tahun 2012 (5)	Realisasi RKPD Tahun 2012 (6)	Tingkat Realisasi (%) (7)	Interpretasi (*) (8)	SKPD Penanggung Jawab (9)
	Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jumlah	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	n. Arsip dan Dokumentasi Daerah
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah	Meningkat	Meningkat	100.00%	Sesuai	
2 URUSAN PILIHAN								
2.01 Pertanian								
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%	100.00	100.00	100.00%	Sesuai	Dinas Pertanian
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah unit balai penyuluhan kecamatan wilayah kerja	unit	17.00	17.00	100.00%	Sesuai	dan Pemerikan, Dinas Perkebunan
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	produksi padi (ton)	ton	41,630.00	33,640.00	80.81%	Belum Tercapai	
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	5.01	3.10	61.88%	Belum Tercapai	
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	0.97	0.54	55.67%	Belum Tercapai	
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1.63	1.22	74.85%	Belum Tercapai	



Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi *)	SKPD Peninggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rata-rata Pendapatan Petani/Tahun/Kapita	Juta/ Tahun	8.00	7.00	87.50%	Belum Tercapai	
2.01.23	Program peningkatan pemasaan hasil produksi peternakan							
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan							
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan							
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman							
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan							
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia							
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan							
2.02	Kehutanan							
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan krbis	%	41.00	47.16	115.02%	Melampaui	Dinas Kehutanan
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kerusakan Kawasan Hutan	%	28.00	0.01	199.96%	Melampaui	
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1.23	0.60	48.78%	Belum Tercapai	
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan							
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan							



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (2)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3)	Satuan (4)	TARGET RKPD Tahun 2012 (5)	Realisasi RKPD Tahun 2012 (6)	Tingkat Realisasi (%) (7)	Interpretasi *) (8)	SKPD Penanggung Jawab (9)
2.03	Sumber Mineral Energi dan Daya							
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pertambangan liar yang diterbitkan	%	100.00	35.10	35.10%	Belum Tercapai	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pertambangan tanpa ijin	Ha	0	4.61	0.00%	Melampaui	
2.03.19	Perencanaan Motivasi dan Evaluasi	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	82.60	88.96	107.70%	Melampaui	
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT							
2.03.21	Program Penguasaan, Pengembangan Migas, Bakubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi							
2.03.22	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas							
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Bakubara Kabupaten Kutai Timur							
2.03.24	Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur							
2.04	Parwisata							
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Parwisata	Kunjungan wisata	Orang	21,251.00	17,251.00	81.18%	Belum Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Parwisata
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Parwisata	Jumlah objek wisata di daerah	Objek	19.00	15.00	78.95%	Belum Tercapai	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi [%]	Interpretasi *)	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.04.17	Program Pengembangan Keturunan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.21	0.65	309.52%	Melampaui	
2.05	Kelautan Perikanan							
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan	%	73.00	40.10	54.93%	Belum Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Produksi perikanan	ton	100.00				
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Konsumsi ikan	kg/kapita/t ahun	77.41	57.88	74.77%	Belum Tercapai	
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Kemampuan penyediaan konsumsi ikan/tahun	kg/tahun	46.91	47.52	101.30%	Melampaui	
2.05.20	Program pengembangan budaya perikanan	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	77.48				
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
2.05.22	Program pengembangan sistem Perikanan perikanan							
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan							
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar							
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan							



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)	Interpretasi (*)	SKPD Penasung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.05.27	Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan							
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil							
2.06	Perdagangan							
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.97	3.38	68.01%	Belum Tercapai	Dinas Perindustrian Perdagangan
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ekspor Bersih Perdagangan	Ribu USD	4.117.472,22				
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri.	jumlah	1.00				
2.07	Perindustrian							
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	0.32				Dinas Perindustrian Perdagangan
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Penelaahan Kebijakan Nasional

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis.

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah *Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*. Bangsa *mandiri* adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. *Maju*: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. *Adil*: Bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. *Makmur*: Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam kurun waktu 2010-2014, sesuai RPJM Nasional, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi

untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan Global yang meningkat :

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen selama periode 2004-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6 persen per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontiniu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar secara merata, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan

daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Resiko kerusakan lingkungan hidup makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya guncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktifitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya

sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dan setiap daerah dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dalam integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih belum menemukan format yang ideal dalam memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

B. Prioritas Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat dijaga pada kisaran 6,3 persen-6,8 persen per tahun. Jika pemulihan ekonomi



global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejala ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut diharapkan dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7 persen atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 10 s/d 8 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6 s/d 5 persen.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”**dengan penjelasan sebagai berikut:

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim [*climate change*] mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim [*climate change*] tersebut.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten. Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014. Namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Pertama: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera, Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang

sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dalam menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Ketiga: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan.

Di sisi lain, pembangunan daerah tertinggal harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan,

pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang *pro growth, pro poor, pro job dan pro green*. Paradigma tersebut telah menjadi isu global. Masyarakat dunia sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama yakni; pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kerangka dasar tersebut disepakati pula dalam kesepakatan *Millenium Development Goal's (MDG's)*. Kesepakatan tersebut mengikat negara-negara di dunia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bangsa Indonesia, Kabupaten Kutai Timur, tidak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu tema pembangunan Kutai Timur tahun 2013: Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG's.

C. Penelaahan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Penelaahan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Pemerintah Provinsi terpenting, yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dengan mempertimbangkan tantangan lima tahun kedepan dan memperhatikan amanat konstitusional, serta untuk mewujudkan motto, "Kaltim Bangkit 2013", visi untuk pembangunan Kalimantan Timur adalah *"Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera"*.

Untuk mewujudkan visi pembangunan 2013 pemerintah provinsi menterjemahkan visi tersebut kedalam misi sebagai berikut :



Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai *"Island of Integrity"*, adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem demokrasi yang kondusif, adalah membangun interaksi infrastruktur dan supra struktur politik yang demokratis di daerah; peningkatan wawasan kebangsaan; terbangunnya sarana dan prasarana keamanan; mewujudkan komponen-komponen cadangan dan pendukung Hankam.

Ketiga, mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan terpencil adalah mempercepat pembangunan infrastruktur; pemenuhan kebutuhan dasar; tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang layak; melakukan kerjasama pembangunan antar Negara, Provinsi dan Kabupaten; membentuk Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil; mengembangkan perekonomian melalui berbagai sektor unggulan; serta mengembangkan dan meningkatkan sistem pengamanan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

Keempat, mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan ekspor migas dan non migas serta menurunkan impor migas dan non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



Kelima, mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik 600 MW dengan membangun PLTU, PLTG, PLTMG, PLTD, PLTH; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.000 unit; penuntasan dan pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan dermaga penyebarangan.

Keenam, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen; membangun sekolah unggulan berstandar internasional di setiap kab/kota; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap dan UGD minimal satu buah di setiap kecamatan; mendorong kegiatan olah raga, peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha usaha produktif; serta mengembangkan ketransmigrasian melalui pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi peringkat 3.

Ketujuh, mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berusaha.

Sebagai penjabaran visi, misi Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008, ditetapkan 3 agenda pembangunan menuju Kaltim Bangkit 2013 sebagai berikut :

Pertama, menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kedua, mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.

Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok untuk mencapai visi



Kaltim Bangkit 2013. Pembangunan daerah Kalimantan Timur tahun 2009–2013 masih tetap memberikan prioritas pada tiga sektor strategis yaitu Pembangunan infrastruktur, Pembangunan pertanian dalam arti luas, Pembangunan sumber daya manusia.

Adapun tujuan pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan Kaltim Bangkit 2013 serta 7 [tujuh] misi dengan tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip *good government* dan pelaksanaan *e-government*.
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan interaksi infrastruktur dan supra struktur politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari luar negeri.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakkan aturan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah.
5. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mandiri dan meningkatkan taraf hidup.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran nasional maupun internasional.
7. Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.



Tabel. 2. 117
Kebijakan dalam RPJMN, RPJM Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur

No	RPJMN	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	RPJMD Kabupaten Kutai Timur
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)
2	Pendidikan	Pelayanan Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3	Kesehatan	Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4	Penanggulangan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
5	Ketahanan Pangan	Kemandirian dan kedaulatan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6	Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
7	Iklim, Investasi dan Usaha	Daya saing ekonomi daerah	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan sektor riil	
8	Energi	Pemenuhan dayalistrik	Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan hidup
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal	Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)
11	Kebudayaan, ekonomi kreatifitas dan Inovasi Teknologi		Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12	Bidang Politik, hukum dan keamanan		
13	Bidang Perekonomian		Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
14	Bidang Kesejahteraan Rakyat		

Keterkaitan prioritas pembangunan RKPD 2013 Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJMD 2011-2015 Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- 1) **Reformasi birokrasi**, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man on the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat, juga selaras dengan RPJMN yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola.
- 2) **Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu Pengembangan wajib 12 tahun, pendidikan keterampilan/kejuruan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, juga selaras dengan RPJMN yaitu pendidikan
- 3) **Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2016 yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan jamkesmas, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga selaras dengan RPJMN yaitu Kesehatan
- 4) **Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial**, dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu penanganan

kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, juga selaras dengan RPJMN yaitu penanggulangan kemiskinan dan bidang kesejahteraan rakyat.

- 5) **Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah**, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD 2011-2015 yaitu Pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih dan persampahan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur
- 6) **Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM**, dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam, modal, informasi dan pasar), juga selaras dengan RPJMN yaitu iklim investasi dan usaha juga bidang perekonomian.
- 7) **Pengembangan produk unggulan**, dimaksudkan untuk mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dan sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (*comparative advantage*). Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan.
- 8) **Rehabilitasi kerusakan lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana**, dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, juga selaras dengan RPJMN yaitu lingkungan hidup dan bencana.
- 9) **Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan**, dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah desa dengan

wilayah perkotaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

- 10) **Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat**, dimaksudkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pasca diselenggarakannya pemilu. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.
- 11) **Pemantapan kemandirian pangan**, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan.



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah

Tabel 2.118
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Melampaui	Pendapatan riil penduduk Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti
1.2.	Laju inflasi kabupaten		
1.3.	PDRB per kapita	Belum Tercapai	
1.4.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Melampaui	
1.5.	Angka kriminalitas yang tertangani		
1.6.	IPM	Belum tercapai	Masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya UHH
Fokus Kesejahteraan Masyarakat			
1.	Pendidikan		
1.1.	Angka melek huruf	Melampaui	Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Belum tercapai	
1.3.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Melampaui	
1.3.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Melampaui	
1.3.3	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui	
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan		
1.5.	Angka Partisipasi Murni		
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Melampaui	
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Belum Tercapai	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui	
2.	Kesehatan		
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	Melampaui	Distribusi tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) belum merata hingga desa-desa
2.2.	Angka usia harapan hidup	Belum Tercapai	
2.3.	Persentase balita gizi buruk		
3.	Pertanahan		
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan		
4.	Ketenagakerjaan		
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja		Masih relatif rendahnya daya saing penduduk lokal ditunjukkan dengan angka penduduk angkatan kerja yang paling banyak berpendidikan SMA Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan yang ada terutama jenjang SMA Masih tingginya angka penduduk setengah pengangguran
Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1.	Kebudayaan		
1.1.	Jumlah grup kesenian		Tergesernya budaya lokal dengan budaya modern akibat globalisasi
1.2.	Jumlah gedung		
2.	Pemuda dan Olahraga		
2.1.	Jumlah klub olahraga		Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki organisasi olahraga
2.2.	Jumlah gedung olahraga		
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Fokus Layanan Urusan Wajib			
1.	Pendidikan		
1.1.	Pendidikan dasar:		
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui	Belum adanya forum koordinasi bidang penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodir usul/kebutuhan riil tingkat sekolah
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Melampaui	
1.1.3.	Rasio guru/murid		
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
1.2.	Pendidikan menengah:		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui	
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah		Masih terbatasnya daya tampung sekolah menengah dan atas Masih kurangnya sekolah SMK
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	Belum tercapai	Belum optimalnya monitoring implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata		
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
1.3.	Fasilitas Pendidikan:		
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		Terkendalanya pembangunan sekolah karena belum selesainya proses penyelesaian lahan
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik		Lemahnya koordinasi antara Diknas dan sektor terkait (PU, PLTR)
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):		
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Belum tercapai	
1.5.	Angka Putus Sekolah:		
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Belum tercapai	Rentang kendali tinggi karena kondisi geografis wilayah
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Belum tercapai	
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Belum tercapai	
1.6.	Angka Kelulusan:		
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Masih kurangnya jumlah sekolah yang memenuhi standart (akreditasi) Belum adanya SOP aspek pelayanan pendidikan
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Sesuai	
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Melampaui	
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Melampaui	
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Belum tercapai	
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Belum tercapai	Masih belum memadainya jumlah guru berdasarkan kualifikasi bidang studi



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
2.	Kesehatan		
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita		Masih belum memdainya ketersediaan tenaga medis, para medis, dan fasilitas kesehatan
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Sesuai	
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Sesuai	Belum meratanya sebaran tenaga para medis terutama di wilayah pedesaan
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Belum tercapai	
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Melampaui	
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Sesuai	Masih belum memadai dan optimalnya peran puskesmas serta belum adanya biaya operasional ke UPT
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		Masih kurangnya sosialisasi dan promosi bagi kesehatan masyarakat Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
2.13.	Cakupan kunjungan bayi		
2.14.	Cakupan puskesmas	Melampaui	
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	Melampaui	
3.	Pekerjaan Umum		
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		Masih rendahnya kualitas jaringan jalan dan jembatan terutama pada jalur utama
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi		Masih belum memadainya jaringan dan bangunan pelengkapya
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		Masih adanya kesenjangan antara beban kerja dengan kapasitas



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi		organisasi Masih adanya kesenjangan antara ketersediaan SDM aparatur dengan volme/beban kerja/kegiatan Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung beserta fasilitasnya untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		
3.7.	Rasio rumah layak huni		
3.8.	Rasio permukiman layak huni		
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4		Masih belum terhubungnya seluruh akses antar desa dan antar kecamatan
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)		
3.11.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	sesuai	Belum optimalnya pembangunan sistem jaringan irigasi drainase secara kuantitas dan kualitas Masih adanya kesenjangan beban kerja dengan kapasitas organisasi
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		
4.	Perumahan		
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih		Masih terbatas fasilitas dan belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik		Masih terbatasnya kelistrikan
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi		Masih kurangnya jaringan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan Belum adanya pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai [=] Melampaui (>)	Permasalahan
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh		Belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman
4.5.	Rumah layak huni		Belum tersedianya data base perumahan
5.	Penataan Ruang		
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		Masih terjadinya konflik pemanfaatan lahan, konversi lahan serta kepastian peruntukan
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Melampaui	Kurangnya sosialisasi tentang syarat pendirian bangunan dan peruntukan kawasan
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya		Masih belum optimalnya pengendalian lahan dan tata ruang serta penerapannya RTBL
6.	Perencanaan Pembangunan		
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Belum memadainya SDM aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Masih terbatasnya dokumen perencanaan
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Masih kurang optimalnya peran SKPD terkait perencanaan pembangunan Masih belum dioptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai pedoman
7.	Perhubungan		
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum		Masih terbatasnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara
7.2.	Rasio ijin trayek		Masih terbatasnya akses perijinan untuk pengelolaan trayek
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum		Masih rendahnya kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		Masih kurangnya SDM penguji kendaraan bermotor
7.5.	Angkutan darat		
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum		
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu		Masih terbatasnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas
8.	Lingkungan Hidup		
8.1.	Persentase penanganan sampah		Masih belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah Kurangnya sosialisasi pada masyarakat dalam pengelolaan sampah
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum		Masih rendahnya kualitas air baku
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata		Belum optimalnya upaya penyehatan lingkungan dan pemukiman
8.4.	Pencemaran status mutu air		
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air		
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		Masih rendahnya ketaatan terhadap implementasi AMDAL
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	Sesuai	Belum adanya regulasi penetapan kawasan konservasi
9.	Pertanahan		
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat		Masih adanya konflik kepemilikan dan lahan yang tak bersertifikat
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara		
9.3.	Penyelesaian izin lokasi		
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil		
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		Tingginya angka migrasi di ibukota kabupaten dan daerah produktif
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran		Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan Belum optimalnya registrasi kependudukan di tingkat desa
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	Belum tercapai	
10.4.	Kepemilikan KTP	Belum tercapai	
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Belum tercapai	
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Adanya keterbatasan SDM dalam bidang IT kependudukan
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sesuai	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Melampaui	
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		Masih belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder
11.3.	Rasio KDRT		Masih belum optimalnya penanganan KDRT dan perlindungan anak
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		Belum optimalnya pengarusutaman gender dan anak
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Belum tercapai	Masih terbatasnya pendataan tentang perempuan dan perlindungan anak
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		Belum adanya regulasi tentang tenaga kerja usia dibawah umur
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		Masih rendahnya kesadaran masyarakat ber KB dan terbatasnya tenaga pelayanan PLKB
12.2.	Rasio akseptor KB		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	Melampaui	
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Melampaui	
13.	Sosial		
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		Belum adanya panti-panti sosial milik Pemda
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial		Masih belum adanya data base PMKS
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		Belum adanya regulasi dan SPM bidang kesejahteraan sosial
14.	Ketenagakerjaan		
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Melampaui	Masih belum adanya Grand Design tentang Man Power Planning
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Melampaui	Masih rendahnya kompetensi pencari kerja terhadap kualifikasi lapangan kerja yang dibutuhkan
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	Melampaui	Belum optimalnya operasional BLK
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	Melampaui	Masih belum adanya sinkronisasi antara bidang ketenagakerjaan dan



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
			bidang pendidikan
14.6.	Keselamatan dan perlindungan		Belum adanya penerapan pengawasan terhadap tenaga kerja
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
15.1.	Persentase koperasi aktif	Sesuai	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian koperasi
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM		Masih terbatasnya SDM dan sarana rendahnya mobilisasi petugas/penyuluh koperasi
15.3.	Jumlah BPR/LKM		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil		Masih belum optimalnya dukungan permodalan dari BPR/LKM
16.	Penanaman Modal		
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Sesuai	Masih lemahnya koordinasi dalam peningkatan investasi antar sektor
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Melampaui	Masih belum tersusunnya data base PMDN dan PMA
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Melampaui	
17.	Kebudayaan		
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		Berkurangnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Masih belum adanya kawasan cagar budaya
18.	Kepemudaan dan Olahraga		
18.1.	Jumlah organisasi pemuda		Masih kurang optimalnya pengorganisasian pemuda di pedesaan
18.2.	Jumlah organisasi olahraga		Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga oleh organisasi olahraga
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)		



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
18.6.	Lapangan olahraga		
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		Masih belum optimalnya monitoring kegiatan LSM
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah		Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Belum tercapai	Masih terbatasnya jumlah satpol PP dan Linmas dalam penegakan PERDA
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Masih kurangnya partisipasi masyarakat
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	Melampaui	Masih rendahnya kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB
20.5.	Kemiskinan		Masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan riil masyarakat
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah		Masih belum optimalnya penerapan SIMDA
20.7.	Penegakan PERDA	Melampaui	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya jumlah petugas
20.8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten		
20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		Belum memadainya jumlah layanan dalam penanganan bencana
20.10.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Belum dapatnya digunakan dana daerah serta belum tuntasnya masalah TPTGR (Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti rugi)
20.11.	Sistem Informasi Manajemen Pemda		Masih adanya kerancuan dalam struktur organisasi, Masih belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan sistem audit
20.12.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Belum optimalnya penerapan SPM Belum optimalnya penempatan



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
			pegawai berdasarkan standar kompetensi
21	Ketahanan Pangan		
21.1	Regulasi ketahanan pangan		Masih belum jelasnya peruntukan kawasan untuk lahan pertanian Belum optimalnya fungsi kelembagaan pangan dan belum adanya regulasi mutu dan keamanan pangan
21.2	Ketersediaan pangan utama	Melampaui	Masih adanya konversi lahan pertanian, persiapan peruntukan, dengan sector non pertanian, Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan pengairan Masih terbatasnya prasarana dan belum optimalnya system distribusi hasil pertanian
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ADD
22.2	Jumlah LSM		Masih belum teradministrasikan dengan baik data-data desa dan belum optimalnya peran LSM dalam pembangunan desa
22.3	PKK aktif		Berkurangnya partisipasi masyarakat
22.6	Posyandu aktif		
23.	Statistik		
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Masih terbatasnya jumlah SDM aparatur statistik dan kurangnya kemampuan dalam pengolahan data Belum adanya data statistik sektoral yang akurat
23.2	Buku "PDRB kabupaten"	ada	
24.	Kearsipan		
24.1	Pengelolaan arsip secara baku		Belum optimalnya unit kerja dan penataan arsip daerah
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		Masih terbatasnya tenaga arsiparis
25.	Komunikasi dan Informatika		
25.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal		Masih rendahnya kualitas pemberitaan dan visualisasi melalui media cetak dan elektronik
25.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal		
25.3	Web site milik pemerintah daerah		Masih rendahnya pemanfaatan data elektronik pada instansi pemerintah



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
25.4	Pameran/expo		
26.	Perpustakaan		
26.1	Jumlah perpustakaan		Masih minimnya infrastruktur bangunan perpustakaan dan tenaga pustakawan
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		Masih minimnya minat baca masyarakat dan minimnya sosialisasi
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		Masih terbatasnya koleksi buku dan kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait Belum terpasangnya jaringan web dan perpustakaan digital
Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian		
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Belum tercapai	Ketersediaan dan penyebaran teknologi spesifik lokasi belum mampu menjangkau seluruh tipe lahan Belum adanya sarana pendukung pertanian (UPT, laboratorium)
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Belum tercapai	Adanya konversi lahan untuk pembangunan sektor lain Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Belum tercapai	
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		Masih kurangnya regulasi peruntukan lahan pertanian berkelanjutan
1.5.	Cakupan bina kelompok petani	Belum melampaui	Masih belum optimalnya kelembagaan penyuluh pada pembinaan kelompok tani
2.	Kahutanan		
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		Jumlah lahan kritis yang masih sangat luas
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan		Maraknya perambahan hutan dan lahan serta terbatasnya personil dan sarana operasional JAGAWANA
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		Menurunnya produktivitas hasil hutan karena perambahan hutan dan penurunan jumlah HPH
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.1.	Pertambangan tanpa ijin		Masih belum optimalnya monitoring dan pengendalian bidang energy dan mineral
3.2.	Kontribusi sektor		Masih belum baiknya data base



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
	pertambahan terhadap PDRB		pertambahan
4.	Pariwisata		
4.1.	Kunjungan wisata	Belum tercapai	Masih kurangnya upaya promosi
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		Bidang pariwisata masih belum dikelola dan dikembangkan secara profesional
5.	Kelautan dan Perikanan		
5.1.	Produksi perikanan		Manajemen pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang masih kurang
5.2.	Konsumsi ikan		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan		Masih terbatasnya petugas dan sarana operasional penyuluh
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan		Masih terbatas sarana prasarana tangkap dan budidaya kelompok nelayan
6.	Perdagangan		
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		Masih kurang memadainya infrastruktur sektor perdagangan dan pasar (desa dan kecamatan)
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan		Menurunnya nilai ekspor bersih perdagangan
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		Belum adanya lembaga ekonomi desa sebagai penggerak perekonomian dan perdagangan pedesaan
7.	Perindustrian		
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		Produksi IKM masih berorientasi pada pesanan dan belum perluasan pasar
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		Belum optimalnya promosi dan pembinaan IKM
7.3.	Pertumbuhan Industri.		
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin		
8.	Ketransmigrasian		
8.1.	Transmigran swakarsa		Belum optimalnya kerjasama dengan badan usaha dalam TSP (Transmigrasi Swakarsa Perbantuan) dan terbatasnya lahan untuk TSM (Transmigrasi Swakarsa Murni)
8.2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		



BAB III

PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan sekaligus strategi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan urat nadi keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya di wilayah tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan RPJMN 2010-2014 arah kebijakan umum pembangunan nasional salah satunya adalah untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pemulihan perekonomian dunia yang diharapkan terjadi pada tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013 ternyata meleset dari proyeksi semula. Di tahun 2012, perekonomian global tumbuh 3,2 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 3,9 persen. Perekonomian AS dan Jepang pada tahun 2012 relatif tumbuh membaik, namun tidak cukup kuat untuk menahan kontraksi ekonomi dunia yang bersumber dari kawasan Eropa.

Sementara itu, perekonomian di negara-negara *emerging markets* turut mengalami perlambatan sebagai implikasi menurunnya permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Di tahun 2013, meskipun perekonomian global



diperkirakan akan membaik, namun proyeksinya tidak seoptimis perkiraan semula. Laju peningkatan kinerja perekonomian global pada tahun 2013 diperkirakan masih tertahan. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2013 masih akan menghadapi risiko kebijakan konsolidasi anggaran. Di samping itu, perekonomian Eropa juga masih menyimpan risiko ketidakpastian yang tinggi terkait lambatnya implementasi program pengurangan belanja pemerintah (*austerity program*) di beberapa negara. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terkininya (*World Economic Outlook* April 2013) telah menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen.

Dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi selama tahun 2012, telah mempengaruhi perkembangan indikator-indikator ekonomi makro dalam tahun tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar. Selanjutnya, perkembangan berbagai indikator ekonomi global tersebut juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro domestik dalam tiga bulan pertama tahun 2013, dan prospeknya dalam keseluruhan tahun 2013.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor pertambangan penggalian, industri pengolahan dan perdagangan yang mencapai persen dari total ekonomi PDRB. Peranan sektor pertambangan dan penggalian cenderung terus meningkat yaitu dari tahun 2007 sebesar 42,94% menjadi sebesar 50,29% tahun 2011 sedangkan sektor Industri pengolahan justru sebaliknya yaitu cenderung menurun dari sebesar 33,63% tahun 2007 menjadi sebesar 23,36% tahun 2011.

Ekonomi daerah ini terlihat lebih menunjukkan pada "Capital intensive" atau padat modal, dimana sektor padat modal yang memberi kue ekonomi sebesar 73,6 sedikit menyerap tenaga kerja kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor padat karya yang hanya memberi kue ekonomi sebesar 26,35% ternyata mampu menyerap tenaga kerja besar. Informasi yang cukup signifikan adalah perkembangan PDRB pertambangan non migas (Batubara) saat ini sudah melampaui pertambangan Minyak dan gas bumi (Migas) yaitu sebesar 19,10 persen berbanding dengan pertambangan non migas mencapai 30,75 persen. Kondisi ini disebabkan pertumbuhan pertambangan batu bara cenderung memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, karena sebagian besar kab/kota di daerah ini mengeksploitasi tambang batubara kecuali Balikpapan dan Tarakan.

Sementara minyak dan gas bumi justru cenderung menurun atau pertumbuhan negatif akibat semakin terbatasnya ladang minyak baru maupun produktivitas yang



sudah semakin berkurang. Informasi di atas dapat menggambarkan bahwa pembangunan perekonomian di Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang sangat krusial, yaitu seperti kita ketahui bahwa migas dan batubara merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila sektor ini terus yang diandalkan tanpa ada upaya untuk peralihan pada sektor lain, maka bisa diprediksi Kalimantan Timur akan mengalami permasalahan yang kompleks. Disamping tantangan yang dihadapi adalah diketahui bahwa akibat adanya eksploitasi dan eksplorasi yang sangat *massive* pada sumberdaya alam [batubara] tanpa menjalankan amdal secara konsisten, telah menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang tingkat kerusakan lingkungannya bisa dikatakan sangat parah dan dikhawatirkan akan mempunyai dampak bukan hanya dari sisi ekonomi saja tapi juga lingkungan hidup dan sosial pada masa yang akan datang.

Selain dari tantangan tersebut diatas, Provinsi Kalimantan Timur memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja.. Seperti permintaan pasar lokal dan Internasional terhadap produk-produk unggulan dari Kalimantan Timur cukup besar, yang memberikan prospektif bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan dimana trendnya menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Disamping itu pelaku disektor perdagangan, jasa dan industri sangat variatif dan kompetitif, dalam hubungannya dengan prospek persaingan terbuka dalam pasar global seperti sekarang ini. Hal tersebut diatas juga ditunjang dengan trend penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai perwujudan prinsip *Good Governance* nantinya akan menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat maupun masyarakat bisnis untuk kemudahan akses.

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, bahwa visi pembangunan 2011-2015 adalah **"Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.



3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan menetapkan prioritas utama meliputi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, pada tahun 2013 ditargetkan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 7%, sedangkan pendapatan per kapita mencapai Rp 7-9 juta serta tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai asumsi 76,14 %.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012

Secara umum nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan setiap lapangan usahanya, mengalami peningkatan di tiap tahunnya (Tabel 3.1). Hal ini merupakan modal yang positif bagi Kabupaten Kutai Timur yang masih dalam proses membangun. Peningkatan di seluruh sektor ini bisa terjadi karena SDM yang semakin banyak yang didukung pula dengan peningkatan tingkat pendidikan sumberdaya manusianya. Sehingga sumber-sumber daya alam yang semula masih belum bisa dimanfaatkan, dengan adanya peningkatan SDM tersedia, sumber-sumber daya alam tersebut bisa mulai dimanfaatkan.

Dalam kurun waktu 2008-2012 nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan migas cenderung meningkat dari Rp 24.391.455,20



juta di tahun 2008 menjadi Rp 50.173.447,91 juta pada tahun 2012. PDRB [ADHB] *denganmigas dan batu bara* pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 24.391.455,20 juta, Rp 27.380.004,69 juta, Rp 34.179.895,99 juta, Rp41.206.892,30 juta, dan Rp 50.173.447,91. PDRB [ADHB]Kabupaten Kutai Timur *tanpa migas dan batu bara*, pada periode 2008-2012 berturut-turut sebesar Rp 3.630.633,06 juta, Rp 4.101.439,75 juta, Rp 4.701.103,10 juta, Rp4.452.869,43 juta, dan Rp 6.379.800,64 juta.Laju pertumbuhan ekonomi *dengan migas*selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2008 hingga tahun 2012 bergerak dari -0,86 persentahun 2008 menjadi 12,28 persen pada tahun 2012. Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi *tanpa migas*dari tahun 2008(-1,03 persen)menjadi 12,41 persen pada tahun 2012, serta *tanpa migas dan batubara*dari tahun 2008sebesar 5,16 persenmenjadi 7,61 persen pada tahun 2012. Dari beberapa dinamika kinerja ekonomi selama kurun waktu 2008-2012seperti tampak dalam Tabel 3.1 memberikan gambaran bahwa struktur PDRB di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh subsektor batubara. Sama halnya dengan tahun sebelumnya,batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	24.391.455,20	14.706.782,47	23.521.639,69	14.505.373,10
2009	27.380.004,69	15.530.301,70	26.430.182,46	15.313.671,39
2010	34.179.895,99	16.972.264,28	33.427.758,31	16.808.371,51
2011	41.206.892,30	18.906.134,22	40.358.574,95	18.746.104,78
2012*	50.173.447,91	21.227.122,19	49.212.005,10	21.071.592,15

Tahun	Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2008	3.630.633,06	1.936.780,71	-0,86	-1,03	5,16
2009	4.101.439,75	2.017.156,18	5,58	5,57	4,15
2010	4.701.103,10	2.140.410,93	9,28	9,76	6,11
2011	5.452.869,43	2.288.487,23	11,43	11,53	6,92
2012*	6.379.800,64	2.462.611,44	12,28	12,41	7,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2013

*) Angka *Forecast* dengan Regresi Linear



Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur tampak dari besarnya peranan suatu sektor terhadap total PDRB. Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya cukup besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stabil antara 4,29 persen hingga 5,04 persen. Sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4 persen.

Beberapa sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi kurang dari 1 persen. Hal tersebut sekilas memberikan penggambaran bahwasannya Kabupaten Kutai Timur belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder maupun sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya diantaranya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 3,43 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berpeluang menjadi sektor pencampur bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir. Subsektor perdagangan maupun subsektor Hotel dan Restoran perlu mendapatkan dorongan agar menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan angkatan kerja pada sektor pertambangan.

Peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) sangat dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Peranan subsektor pertambangan batubara sangat mempengaruhi besaran PDRB. Kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian bahwa terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang batubara hingga 86 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara. Oleh karenanya visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yakni "*Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri*" perlu segera ditindaklanjuti dan dikembangkan dengan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi ketergantungan PDRB terhadap subsektor pertambangan batubara. Penguatan kualitas SDM yang berkompetensi dalam sektor pertanian serta mengutamakan



kebijakan dan program-program yang terkait dengan sektor pertanian menjadi prioritas bagi segenap pemangku kepentingan.

Secara umum nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan setiap lapangan usahanya, mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini merupakan modal yang positif bagi Kabupaten Kutai Timur yang masih dalam proses membangun. Peningkatan di seluruh sektor ini bisa terjadi karena SDM yang semakin banyak yang didukung pula dengan peningkatan tingkat pendidikan sumberdaya manusianya. Sehingga sumber-sumber daya alam yang semula masih belum bisa dimanfaatkan, dengan adanya peningkatan SDM tersedia, sumber-sumber daya alam tersebut bisa mulai dimanfaatkan.

Dari data pada Tabel 3.1. lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sekalipun terjadi penurunan setiap tahun akan tetapi persentase sektor pertambangan dan penggalian masih paling tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Pertumbuhan PDRB yang tergantung pada lapangan usaha sektor pertambangan memang hal yang wajar bagi daerah yang tergolong berbukit dan memiliki potensi dalam sumberdaya alam. Sektor pertanian menjadi unggulan kedua di Kabupaten Kutai Timur. Nilai produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan setiap tahunnya relatif meningkat dengan komoditi padi, kelapa sawit dan coklat sebagai unggulan. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak krisis ekonomi dan moneter melanda semua sektor usaha, justru minyak sawit/CPO (*crude palm oil*) menjadi produk yang sangat diunggulkan baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri (ekspor). Kebutuhan minyak goreng di dalam negeri juga terus meningkat yang tentunya mendorong bertambahnya kebutuhan bahan baku berupa CPO. Demikian juga dengan pasar luar negeri yang belakangan harga CPO terus meningkat, sehingga mendorong produsen minyak sawit untuk mengeksport produknya ke luar negeri.

Selain itu, sektor industri juga mengalami pertumbuhan yang meningkat, meskipun, pertumbuhannya juga tergolong kecil dibandingkan sektor-sektor lain. Sebab sektor-sektor pendukung, seperti sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor bangunan juga masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendukung sektor industri masih belum siap untuk saat ini. Sehingga sektor industri



masih belum bisa dijadikan harapan atau tumpuan untuk peningkatan APBD maupun perekonomian untuk saat ini.

Sejak tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tanpa migas dan batubara mengalami kenaikan dari 4,15 persen di tahun 2009 menjadi 7,61 di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa sektor diluar migas dan batubara berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur meskipun masih kecil. Namun bila memperhitungkan sektor migas dan batubara maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tumbuh melampaui di atas rata-rata nasional yakni 9 hingga 11 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak ditopang oleh sektor migas dan pertambangan [batubara].

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga tahun 2012, selalu mengalami peningkatan pertumbuhan kecuali tahun 2008. Hal ini bisa dilihat dari hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2012 yang lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,28 persen telah jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar minimal 7 persen. Dari capaian ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika melihat capaian indikator pada tahun 2012, secara umum mengalami peningkatan di berbagai sektor, baik pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan maka pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 7 persen.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 tahun 2014

Berbagai tantangan yang masih akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013 dan tahun 2014, diantaranya adalah:

- **Pengangguran dan Kemiskinan.** Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur diperkirakan akan semakin meningkat, ini secara prosentase angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Jumlah penganggur dan orang miskin di Kabupaten Kutai Timur cenderung meningkat dimungkinkan karena pendatang dari luar (migrasi masuk) yang ingin bekerja baik di sektor formal maupun informal.
- **Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan khususnya dalam rangka pencapaian MDGs 2015** masih memerlukan komitmen yang kuat dari

semua pemangku kepentingan. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting karena kedua sektor ini menentukan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia pada akhirnya dapat dikaitkan dengan pembangunan manusia (sekalius mendongkrak IPM) yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.

- Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas terutama bagi akses wilayah yang sulit terjangkau. Keberadaan infrastruktur merupakan prasyarat agar suatu wilayah dapat mempertahankan dan meratakan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mutlak diperlukan bagi wilayah yang sedang melakukan pembangunan fisik khususnya. Hal ini dikarenakan infrastruktur fisik akan memudahkan kelancaran maupun mobilitas bagi proses masuknya penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur.
- Terwujudnya peningkatan partisipasi swasta atau dunia usaha melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai satu kesatuan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Tantangan ini menjadi sangat penting karena pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan fisik khususnya merupakan wujud kepedulian sekalius partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan.
- **Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah.** Kualitas aparatur pemerintah tampak dalam potensi dan permasalahan aparatur pemerintah itu sendiri. Potensi dan permasalahan aparatur pemerintah merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi SDM aparatur menyangkut jumlah pegawai yang dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan, bidang keahlian, dan termasuk pula persebarannya. Hal ini penting untuk memetakan potensi SDM apartur dengan potensi wilayah untuk menilai derajat kesesuaian persebaran antara potensi SDM dengan potensi wilayah yang ada. Adapun permasalahan aparatur pemerintah sangat bervariasi. Salah satu diantaranya adalah persoalan budaya kerja. Budaya kerja merupakan aspek penting yang menentukan sikap kerja aparatur



pemerita baik itu kinerja, kepuasan kerja, maupun tingkat kemangkirannya [Luthans 1989]. Salah satu aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Selaku aparatur pemerintah, disiplin kerja juga telah diatur oleh pemerintah dalam PP Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat sernua kewajiban, larangan, dan sanksi jika melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban. Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut. Laitener & Levine [dalam Riwukaho 1987] mengindikasikan gejala disiplin itu dengan gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat apabila para pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati sesuai prosedur yang ditetapkan, apabila mereka menghasilkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang ditentukan.

Indikator disiplin kerja aparat pemerintah dapat meliputi : *pertama*, frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan pulang kerja; *kedua*, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan bahan-bahan dan alat-alat kantor; *ketiga*, kualitas dan kuantitas hasil kerja; *keempat*, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang ditentukan; *kelima*, Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Secara umum kondisi perekonomian bergantung pada kondisi internal dan kondisi eksternal dari daerah atau wilayah tersebut. Kondisi internal adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah tersebut yang penyebabnya berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sehingga kondisi internal terbentuk karena kejadian di dalam wilayah itu sendiri. Dengan kata lain kondisi ini terbentuk dari dalam wilayah itu sendiri.

Kondisi internal yang mempengaruhi Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Pertama hasil pertambangan dan penggalian Kabupaten Kutai Timur yang cukup baik. Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertanian menduduki urutan kedua



namun persentasenya masih kecil terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian(agribisnis) dapat diupayakan secara berkesinambungan agar menjadi tumpuan setelah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan) tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga untuk kebutuhan nasional dan internasional. Hasil komoditi berupa kelapa sawit, karet dan coklat menjadi komoditi unggulan. Hal ini mengindikasikan bahwa agribisnis menjadi harapan di masa mendatang mengingat sumber daya alam bersifat tidak terbarukan.

Kedua SDA yang melimpah dan luasnya wilayah baik daratan maupun perairan, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan (pro ekologi) maka hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2013 dan Tahun 2014

Potret ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2013 dan tahun 2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Setelah terjadi resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia termasuk Negara Indonesia telah mulai terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2010. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian serta terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.

Kondisi perekonomian daerah masih sangat rentan terhadap pertumbuhan dan kondisi makro ekonomi nasional. Bila perekonomian nasional menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif, maka akan memberi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya. Dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut maka turut berpengaruh terhadap perekonomian daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur, sehingga pada tahun 2013 dan tahun 2014 perekonomian Kabupaten Kutai Timur diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kondisi internal Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pertambangan batu bara. Sedangkan kondisi eksternal dipengaruhi oleh: *pertama* kondisi perekonomian nasional, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, melambatnya laju perekonomian negara-negara maju dan berkembang, naik-turunnya harga minyak, serta hal-hal lain yang berdampak pada perekonomian global. Sebab seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia sangat terkait dengan negara-negara luar. *Kedua* melihat perkembangan integrasi dunia atau yang lebih dikenal dengan globalisasi, maka hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi persaingan pasar di dalam negeri



maupun persaingan pangsa pasar di luar negeri atas produk Indonesia. *Ketiga*, pemberlakuan AC-FTA (*Asean-China Free Trade Area*) merupakan awal pasar bebas dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu AC-FTA ini harus direspon dengan mempersiapkan produk yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi. Hal ini dikarenakan bukan hanya pasar barang saja yang bersaing, tetapi juga persaingan akan perekrutan tenaga kerja atau tenaga ahli.

Salah satu aspek yang turut mempengaruhi prospek perekonomian lokal diantaranya adalah dunia usaha swasta yang turut memberikan kontribusi yang tidak kecil adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Diperkirakan pada tahun 2013 mendatang menargetkan kapasitas produksi batubara hingga mencapai 70 juta matrik ton. Kondisi produksi KPC tahun lalu telah mencapai 43 juta matrik ton. Tahun ini diperkirakan 56 juta matrik ton, dan 2013 sekitar 70 juta matrik ton. Peningkatan kapasitas ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan royalti 13,5 persen yang diperoleh pemerintah provinsi dan wilayah produksi batu bara yakni Kabupaten Kutai Timur.

Prospek Kabupaten Kutai Timur untuk percepatan pembangunan salah satunya terletak di kawasan industri Maloy. Pengembangan kawasan industri Maloy direncanakan sebagai pelabuhan berskala internasional dengan status zona ekonomi nasional. Kawasan ini diharapkan menjadi klaster industri untuk mengerakkan sektor riil. Percepatan pembangunan ini sesuai dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pada tahun 2011 yang lalu. Dengan dikembangkan kawasan Maloy ini diharapkan kesenjangan pembangunan antar kawasan Indonesia Barat dan Timur umumnya dan kesenjangan antar wilayah dalam koridor Kalimantan akan dapat teratasi.

Sejumlah pembangunan fisik yang terkait dengan infrastruktur perhubungan diharapkan akan dapat membuka prospek pembangunan dan mengurangi keterbelakangan akses. Sejumlah proyek yang masuk MP3EI di Kabupaten Kutai Timur dan sekitarnya antara lain pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, PLTU Mulut Tambang 2 X 100 MW di Sangatta, termasuk pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan rel kereta api dari Muara Wahau hingga Lubuk Tutung (130 km), kemudian dilanjutkan dari Lubuk Tutung - Maloy sepanjang 8 km.



Tabel 3.2
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) di Kabupaten Kutai Timur

NAMA PROYEK/LOKUS	NILAI INVESTASI (Milyar Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
TRANSPORTASI			
A PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN			
Free Way Bontang - Sangatta 40 Km		APBN/APBD Prov	
Free Way Sangatta - Maloy 130 Km		APBN/APBD Prov	
Pembangunan Jalan Ery Suparjan - Kenyamukan	144,2	APBD Prov (Bankeu)	Jalan akses menuju Pelabuhan Sangatta
Pembangunan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung	163,5	APBD Prov (Bankeu)	
Peningkatan Jalan Yos Sudarso I-II-III-IV	180,0	APBN	Ruas Jalan Nasional yang melintasi dalam Kota Sangatta
B PRASARANA PERHUBUNGAN			
PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT			
Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan)			
Pembangunan Causeway	15	APBN	TA. 2011
Pembangunan Trestle	21,3	APBN	TA. 2011
Pekerjaan Reklamasi dan Causeway	271,3	APBN	TA. 2012
Pekerjaan Dermaga	282,2	APBD Kab. dan Prov.	TA. 2012-2014
Pekerjaan Bangunan Penunjang Wilayah Darat	420,4	APBN	TA. 2012-2014
PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA			
Pembangunan/ perluasan Bandara Sangkima di Kabupaten Kutim	350	APBN	Untuk mendukung akselerasi ekonomi daerah dan keg.TNI
Pembangunan Bandara Wahau Di Kabupaten Kutim	350	APBN	
C PENGENDALIAN BANJIR			
Peningkatan Drainase dan pembangunan Folder sepanjang 42,5 Km di kota Sangatta	541	APBN/APBD Prov.	TA. 2012-2014
D IRIGASI			
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier di 3 Bendung sepanjang 58,2 Km	36	APBN/APBD Prov.	Untuk mendukung program Food Estate
KEGIATAN EKONOMI LAINNYA			
A FOOD ESTATE			
Percetakan lahan sawah seluas 4000 Ha	69,3	APBN/APBD Prov	
JUMLAH USULAN	2.844	(tidak termasuk Free Way)	

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhitung sejak 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah



pusat akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Kontribusi BPHTB terhitung 1 Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2014, diharapkan mampu meningkatkan sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Dengan pelimpahan ini, diharapkan pembangunan di daerah akan terbantu dan masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Namun, konsekuensinya, pemerintah kabupaten harus dengan menyediakan [1] sarana dan prasarana, [2] sumberdaya manusia, dan [3] payung hukum berupa Perda yang menjadi landasan hukum bagi pemungutan pajak.

Dilain pihak dengan adanya pelimpahan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah tentunya akan menimbulkan dampak, diantaranya:

1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena pemerintah daerah tentunya lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat;
2. Pemda diharapkan lebih memiliki keberanian dalam melakukan penyesuaian NJOP karena penentuan NJOP yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dinilai masih banyak yang *under value*;
3. Pemberdayaan *local taxing power* melalui kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian perlu juga dicermati bahwa dengan PBBP2 yang akan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maka otomatis pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya baik biaya untuk investasi awal maupun biaya operasional per tahun sehingga perlu dilakukan kajian *cost and benefit* yang optimal.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun



2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011[tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006] tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai bidang.

Kabupaten sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak Kabupaten/kota menjadi 11 jenis meliputi : a) pajak hotel; b). pajak restoran; c). pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f).pajak



mineral bukan logam dan batuan; g) pajak parkir; h) pajak air tanah; i) pajak sarang burung walet; j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k) pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sejak tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB) dan PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: a) retribusi jasa umum ; b) retribusi jasa usaha; c) retribusi perizinan tertentu. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi usaha dan jenis retribusi perizinan tertentu masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) persentasenya sebesar 5,8 % mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain melalui: a). Pajak Hotel dan Restoran; b). peningkatan kinerja retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dan retribusi pasar; c). pajak reklame dan lain-lain.

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2013, maka perlu dilakukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yakni:

- a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi :
 1. Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
 2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.
 3. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun 2013.
 4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan pendekatan sistem.



5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
- b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang lain, melalui :
 1. Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan
 2. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.
 3. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Selain itu perlu menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan melalui :

- a. Penyusunan naskah akademik yang memadai sebelum dilakukan penyempurnaan terhadap perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- b. Evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada.
- c. Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang bersifat *distortif* bagi perekonomian
- d. Reformulasi sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif yang tertuang dalam penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk meridnai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan alokasi dana perimbangan selain diarahkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance* pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan.



Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah, Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah, Proporsi celah fiskal dalam formula DAU harus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.

Sementara itu, reformulasi DAU antara lain dilakukan melalui: (i) penetapan Pendapatan Dalam Negeri (PDN)neto dengan memperhitungkan beban subsidi BBM dan subsidi pupuk sebagai bentuk *sharing the pain* antara Pemerintah dengan pemerintah daerah; (ii) penerapan formula DAU secara murni tanpa pengecualian, sehingga tidak perlu penyediaan dana penyeimbang DAU; dan (iii) peninjauan kembali terhadap bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan pengaturan kembali perhitungan kapasitas fiskal dalam formula DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu



DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka %tase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : a). Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi; e). pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi.

Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2013 dapat di lihat pada tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	(Rp) (5)	% (6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	65.371.900.000,00	67.471.900.000,00	2.100.000.000,00	3,21
1.1.1	Pajak Daerah	23.420.000.000,00	24.920.000.000,00	1.500.000.000,00	6,40
1.1.2	Retribusi Daerah	3.131.000.000,00	3.231.000.000,00	100.000.000,00	3,19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.520.900.000,00	36.020.900.000,00	500.000.000,00	1,41
1.2	Dana Perimbangan	2.179.523.087.000,00	2.341.838.638.321,00	162.315.551.321,00	7,45
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.660.927.508.000,00	1.823.243.059.321,00	162.315.551.321,00	9,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	506.528.289.000,00	506.528.289.000,00	0,00	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	12.067.290.000,00	12.067.290.000,00	0,00	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	395.744.000.000,00	436.108.392.000,00	40.364.392.000,00	10,20
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	272.596.000.000,00	272.596.000.000,00	2.400.000.000,00	0,88
1.3.4	Dana Penyesuaian	0,00	37.964.392.000,00	37.964.392.000,00	100
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah daerah lainnya	123.148.000.000,00	123.148.000.000,00	0,00	0,00
JUMILAH PENDAPATAN DAERAH		2.640.638.987.000,00	2.845.418.930.321,00	204.779.943.321,00	7,75



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2013 Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

a) Belanja Pegawai

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD, Gaji bupati dan wakil bupati dan sebagainya. Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengalokasikan anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan



Pegawai Negeri Sipil (TPP) berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

b) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

c) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan, dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif. Pemberian bantuan langsung harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial.

d) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus



digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

e) **Belanja Tidak Terduga**

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013.

2. **Belanja Langsung**

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi).



Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat [efektifitas]. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan [transparansi], selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku [akuntabilitas].

Oleh karena itu pada tahun 2013 diharapkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian dua belas (12) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, sehingga proporsi belanja langsung dapat terus ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan dapat semakin besar.

Perubahan Target Belanja Daerah Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.4
Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013

NO (1)	URAIAN (2)	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)		%
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	(5)	(6)	
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	892.272.538.211,00	786.852.767.165,60	[105.419.771.045,40]	[11,81]	
2.1.1	Belanja Pegawai	629.057.538.211,00	510.962.767.165,60	[118.094.771.045,40]	[18,77]	
2.1.3	Belanja Subsidi	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	86.965.000.000,00	99.140.000.000,00	12.175.000.000,00	14,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	500.000.000,00	5,88	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	156.000.000.000,00	156.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	Belanja Langsung	2.352.277.300.000,00	2.407.225.874.011,00	54.948.574.011,00	2,34	
2.2.1	Belanja Pegawai	196.792.458.084,00	197.409.779.453,00	617.321.369,00	0,31	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	696.157.134.529,00	675.397.144.764,00	[20.759.989.765,00]	[2,98]	
2.2.3	Belanja Modal	1.459.327.707.387,00	1.534.418.949.794,00	75.091.242.407,00	5,15	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.244.549.838.211,00	3.194.078.641.176,60	[50.471.197.034,40]	[1,56]	



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penyertaan Kembali Pemberian Penyertaan Modal. APBD Kabupaten Kutai Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos pembiayaan.

Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :



Tabel 3.5
Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	(Rp) (5)	% (6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH (2)				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	633.410.851.211,00	374.959.710.856,00	(258.451.140.355,00)	(40,8)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	633.410.851.211,00	374.959.710.856,00	(258.451.140.355,00)	(40,8)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	29.500.000.000,00	26.300.000.000,40	(3.199.999.999,00)	(10,85)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	29.500.000.000,00	26.300.000.000,40	(3.199.999.999,00)	(10,85)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	603.910.851.211,00	348.659.710.855,60	(255.251.140.355,40)	(42,27)

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah **"PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI TIMUR MANDIRI"**

Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai berikut :

1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis.
2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya saing, baik ditingkat regional, nasional maupun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.



9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, maka ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan, sebagaimana berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

Tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sasaran:

- Terwujudnya kerukunan hidup beragama;
- Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual;
- Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni budaya lokal
- Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya
- Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timur
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya
- Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata
- Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana dan prasarana olah raga
- Tercapainya peningkatan pemuda yang berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja, Pergaulan Bebas dan Miras

MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan

Tujuan :

Meningkatkan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran:

- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
- Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis
- Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi
- Terbitnya Perda RTRW
- Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW
- Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan (*Zoning Regulation*)
- Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan hidup
- Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa
- Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA
- Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintah
- Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikat lahan masyarakat
- Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian
- Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan
- Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan
- Terciptanya penegakan hukum lingkungan
- Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup
- Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan
- Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan
- Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan penelitian

MISI3: Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah

Tujuan:

Meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sasaran:

- Terselenggaranya tata kerja dan kelembagaan penyuluhan yang berorientasi kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kebutuhan Petani setempat
- Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (dalam arti luas)
- Terciptanya stabilisasi luasan lahan pertanian produktif
- Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani
- Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama
- Tersedianya beberapa desa mandiri pangan
- Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang
- Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan
- Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energi tingkat berat)
- Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi
- Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung ketahanan pangan
- Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan
- Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap kecamatan
- Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti luas
- Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu
- Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis
- Tersedianya sarana distribusi hasil produksi pertanian
- Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran
- Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani (ternak)
- Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan
- Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat
- Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis hasil perkebunan
- Tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) perkebunan
- Terciptanya iklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif
- Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem tangkap dan ikan olahan



- Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan
- Terpenuhinya kebutuhan produksi ikan untuk konsumsi
- Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan
- Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah lingkungan
- Tewujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/ pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan
- Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara optimal
- Terlaksananya identifikasi dan monitoring potensi terumbu karang Kabupaten Kutai Timur
- Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur
- Terciptanya keamanan dan ketertiban perairan
- Termanfaatkannya potensi sumber daya lahan dan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
- Tercapainya peningkatan jumlah, kompetensi dan penyebaran penyuluh sesuai standar
- Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu dan kemasan terjamin serta berorientasi pasar
- Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif

MISI 4 :Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi

Tujuan :

Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya, serta berupaya lebih pemeratakan pemenuhan energi bagi masyarakat.

Sasaran:

- Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
- Terwujudnya pemerataan perkembangan aksesibilitas darat untuk mendukung mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonomi daerah
- Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika perkotaan



- Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum
- Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan angkutan barang
- Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat
- Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau
- Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara
- Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektor pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah
- Tercapainya peningkatan pengendalian banjir diperkotaan (Menurunnya persentase luasan genangan banjir)
- Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan jaringan drainase
- Tercapainya peningkatan ketersediaan air baku baik secara kualitas maupun kuantitas
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat
- Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan fasilitas kegiatan sosialkemasyarakatan
- Tersedianya listrik pedesaan dan daerah terpencil
- Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengoperasian kelistrikan
- Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
- Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pemerintahan kecamatan
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD



MISI 5 :Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan

Tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada peningkatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Sasaran:

- Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin dalam pembangunan pertanian dalam arti luas
- Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin
- Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis
- Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan
- Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan
- Tercapainya peningkatan kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan usaha
- Tercapainya peningkatan kualitas perumahan bagi rumah tangga sasaran
- Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sasaran (RTS)
- Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan
- Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan
- Tercapainya peningkatan kontribusi program KB dalam kesejahteraan keluarga
- Terbinanya perempuan dan berkembangnya partisipasi dalam pembangunanTerlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan atau Sarana Usaha
- Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar panti sosial
- Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Panti Sosial
- Pelayanan Sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- Bantuan sosial Korban Bencana pada masa tanggap darurat
- Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap darurat

- Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi
- Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

MISI 6 :Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparat pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien

Tujuan:

Meningkatkan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; meningkatkan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog; serta meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat.

Sasaran:

- Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif
- Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugasSKPD
- Terwujudnya tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
- Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor
- Terlaksananya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang Menjamin Peningkatan Profesionalisme Aparatur
- Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- Terwujudnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas, LSM, Paguyuban
- Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
- Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta dalam pembangunan politik
- Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan yang Efektif



- Terwujudnya kemantapan penataan sarana dan Prasarana Kerja Aparatur pada instansi Pemerintah
- Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah
- Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan investor
- Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar
- Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan permintaan masyarakat
- Terwujudnya kemantapan dan pembinaan mental/spiritual
- Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*
- Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan
- Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif
- Terpenuhinya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD
- Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan
- Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
- Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dinamis dan responsive
- Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah yang sudah berkekuatan Hukum
- Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD
- Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pemda
- Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih
- Terwujudnya kerjasama dan komunikasi dengan daerah lain
- Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan para pengusaha
- Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam pemberian ijin dan operasi pasar

- Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi perijinan
- Tercapainya peningkatan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
- Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional
- Tersedianya Data Objek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang Akurat
- Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

MISI 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta mewujudkan adanya pelayanan prima pada pelaksana teknis penyelenggara kesehatan secara berjenjang.

Sasaran :

- Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan dasar
- Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/anak, remaja dan lansia
- Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan
- Tercapainya peningkatan ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
- Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan
- Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin
- Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
- Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSUD yang representatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
- Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemiologis dan penanggulangan KLB

- Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin
- Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
- Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSUD yang representatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
- Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemiologis dan penanggulangan KLB

MISI 8 : Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, adanya pemerataan, adanya penyelenggaraan sarana pendidikan yang berkualitas serta peningkatan akses dan sarana penunjang kependidikan.

Tujuan :

Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah

Sasaran :

- Tercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf
- Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni
- Tercapainya peningkatan sebaran sarana pendidikan
- Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS)
- Tercapainya peningkatan sistem manajemen pengelolaan sekolah
- Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan dan Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif
- Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekolah
- Tercapainya peningkatan Angka Pendidikan Tamatan/ Angka kelulusan
- Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun
- Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang pendidikan

MISI 9: Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya

Tujuan:

Meningkatkan peran lintas sektor terutama swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Serta upaya-upaya langsung dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan bentuk intervensi keuangan pada lembaga pemodal.

Sasaran :

- Tercapainya peningkatan koperasi aktif
- Tercapainya peningkatan koperasi sehat
- Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR
- Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM
- Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem pendukung bagi koperasi dan UMKM
- Terlaksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan investasi sektor perbankan
- Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal yang ditandai berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di kecamatan
- Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutai Timur
- Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja
- Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan
- Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja

IV.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2008-2013, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

IV.2.1 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Keterhubungan program prioritas RPJMD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMD 2011-2015	RKPD 2013
1	Peningkatan kapasitas pemerintahan	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
5	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Peningkatan pembangunan pedesaan
7	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
8	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)
9	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
10	Peningkatan pembangunan perdesaan	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
11	Pengelolaan kawasan perbatasan	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	Pengelolaan kawasan perbatasan (<i>hinterland</i>)

Penentuan *top priority* pembangunan dilakukan dengan cara pembobotan untuk menentukan skor terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan, meliputi : 1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; 3) Dampak yang ditimbulkan terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil penentuan *top priority*, diperoleh 3 program pembangunan dengan dengan skor tertinggi yaitu 1) Penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran; 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas. Selanjutnya dapat dipilih tema pada program pembangunan RKPD tahun 2013 Kabupaten Kutai Timur yaitu: **"Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur"**. Kesepakatan *Millenium Development Goal's* (MDG's) tersebut mengikat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tahun 2013 merupakan momentum yang sangat penting bagi Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan komitmen terhadap kesepakatan global MDGs. Kabupaten Kutai Timur akan bekerja lebih keras dan dukungan alokasi anggaran untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat sehingga dengan sendirinya sasaran MDGs dapat dicapai pada waktunya. Untuk itu, Kabupaten Kutai Timur menyusun strategi **"Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur"**.

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai MDGs adalah mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian MDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Studi yang telah dilakukan oleh Lanjouw, dkk (2001) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia (MDGs) sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena investasi dibidang pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

Alokasi dana dalam APBD Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mendukung pencapaian MDG's pada tahun 2013 akan ditingkatkan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi positif Kabupaten Kutai Timur sebesar 11,39% yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang pada gilirannya menurunkan angka

kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini berkaitan dengan MDGs yang dapat dimonitor dan dievaluasi kemajuannya dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna dalam menyesuaikan perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah diakui oleh Ranis dan Stewart (1998) dan (2005). Studi sejenis telah banyak dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil proses pendidikan.

Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan mengambil data panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002. Berdasarkan studi tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam bidang pembangunan manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Penjelasan tentang masing-masing program menurut prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kutai Timur. Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Oleh karena itu persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu proses pembangunan yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik

Apabila dihubungkan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, maka tingginya tingkat kemiskinan (rendahnya pendapatan riil masyarakat) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatif terhadap IPM. IPM walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia, namun dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang rendah, maka dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga rendah. Oleh karena itu dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan cara peningkatan mutu dari pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/ keluarga miskin agar dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang diarahkan untuk: 1) meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan); 2) Menggali dan mengembangkan kegiatan ekonomi/ usaha produktif berbasis UMKM dan menciptakan peluang kerja dan usaha penduduk/ keluarga miskin berorientasi sektor pertanian; 3) Mengembangkan sarana dan prasarana dasar wilayah secara merata; 4) Meningkatkan kehidupan sosial budaya penduduk/ keluarga miskin dengan menekankan partisipasi aktif pada semua pembangunan, terutama pertanian dalam arti luas; dan 5) Mengembangkan dan memanfaatkan sistem perlindungan sosial.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemasaran maupun perlindungan usaha. Di samping itu, dalam penanggulangan kemiskinan juga memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang kondusif. Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan, etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

Prioritas 2: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warganegara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global, *Millennium Development Goals (MDGs)* yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100 persen.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Aksesibilitas pendidikan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) Penuntasan buta huruf; (2) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah setingkat SD, SMP, SMA/SMK; (3) Pembangunan SMK baru; (4) Pengembangan dan fasilitasi program pendidikan sesuai SOP aspek pelayanan pendidikan; (5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SLTP/SLTA; (6) Beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin (7) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK; (8) Peningkatan kinerja kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah melalui pemberian tunjangan kinerja guru non PNS dan honorarium guru/kepala TK/RA non PNS; (9) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak mampu.

Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Agenda peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif.

Aksesibilitas kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: [a] mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; [b] meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; [c] mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; [d] mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan [e] terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih, melalui fokus kegiatan dengan melanjutkan: (1) Pengembangan dan Optimalisasi Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; (2) Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (Polindes), juga melayani pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis; (3) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya: Puskesmas rawat jalan/inap, Puskesmas pelayanan 24 jam, serta peningkatan jumlah puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu; (4) Peningkatan dan Perbaikan Sarana prasarana Rumah Sakit; (5) Perbaikan gizi masyarakat; (6) Penguatan manajemen kesehatan; dan (7) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas 4: Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman

Masalah kesehatan dan lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional dan layak di setiap wilayah dengan fokus: 1) Pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih/air minum, 2) Penanganan sampah, 3) Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 4) Jalan dan drainase lingkungan serta pemenuhan kebutuhan listrik.

Prioritas 5: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Ketahanan pangan di Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan

yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi [ketersediaan], melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.

Agenda peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah baik ketersediaan maupun kemudahan akses sehingga terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetitif daerah yang berbasis agrobisnis.

Peningkatan ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan fokus: 1) Peningkatan produksi hasil pertanian sesuai potensi agroekologi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna; 2) Meningkatkan peran kelembagaan UMKM pada sektor pertanian; 3) Peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan; 4) Peningkatan ketrampilan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya; 5) Peningkatan SDM bidang pertanian (arti luas) ; 6) Pengembangan kawasan pertanian (arti luas) dengan *One Village One Product* (OVOP) untuk mendorong percepatan *food estate*; 7) Pengembangan kawasan agropolitan; serta 8) Regulasi pangan.

Prioritas 6: Peningkatan pembangunan pedesaan

Penduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar (klastering). Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti karakteristik usahatani atau infrakstruktur (jalan dan komunikasi). Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk yang bermukim berpencar bertambah, sedangkan lahan usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investasi termasuk investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi, pendidikan maupun kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antarwilayah ternyata berkontribusi besar bagi pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran akhir setiap upaya pembangunan.

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala utama yaitu: kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan (SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah desa

dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan:1) meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antardaerah. Kegiatan fokus pada prasarana dan sarana jalan, air bersih, penyehatan lingkungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kemandirian energi, komunikasi serta kemudahan usaha (modal, UMKM, koperasi, pasar).

Prioritas 7: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Agenda peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar memberikan pengaruh berganda dalam pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis agribisnis, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja.

Struktur ekonomi Kutim yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Timur.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur 2008 hingga 2012 memberikan modal yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi [tanpa migas dan batubara] yang cukup baik pada kisaran 5,16%, sampai 6,11%. Sektor yang kontribusinya cukup



meskipun sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian yang sistemnya masih tradisional. Hal ini merupakan modal positif untuk pembangunan di masa mendatang, karena dengan indikator kenaikan di setiap sektor dari PDRB tersebut berarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia sudah mulai bisa dimanfaatkan.

Pada tahun 2013, pembangunan ekonomi masih terpusat pada sektor agribisnis [pertanian]. Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang berpotensi dijadikan sebagai sektor unggulan dibandingkan sektor yang lain di luar sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur bertumpu dan diarahkan pada sektor pertanian dan bertujuan untuk menjadi daerah agribisnis. Hasil-hasil pertanian diupayakan dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, *agrotechno park* [pertanian integratif] dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri. Sebab, masalah pertanian tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pascapanen. Untuk mengoptimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan pengembangan kawasan Agropolitan Malloy.

Sektor Pertanian tanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan hortikultura, padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas unggulan. Sektor perkebunan juga dikembangkan komoditas unggulan yakni kelapa sawit, karet, dan kakau. Sektor peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor kelautan dan perikanan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap. Sedangkan dalam pengembangan sektor pertanian [dalam arti luas] tersebut, perlu didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus diarahkan untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil, koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Untuk mewujudkan sektor agribisnis yang tangguh, maju dan efisien sehingga menjadi *leading sector* dalam pembangunan Kutai Timur, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang maju dan efisien. Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian [*on farm agribusiness*] dan kegiatan lainnya dalam sistem agribisnis secara keseluruhan.

Prioritas 8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)

Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man on the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.

Agenda peningkatan kapasitas pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip *good government* dan pelaksanaan *e-government*. Dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan, kegiatan difokuskan pada: 1) peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya; 2) penerapan *reward and punishment system* yang berkeadilan; 3) peningkatan kesejahteraan aparatur; 4) peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima serta peningkatan integritas dan pengawasan internal dan 5) Sistem kelembagaan organisasi.

Prioritas 9: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin dan penduduk pedalaman (daerah tertinggal) tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur wilayah.

Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan diarahkan adapercepatan pembukaan isolasi wilayah dan sarana kewilayahan untuk: (a) meningkatkan pemeliharaan infrastruktur; (b) mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur jalur ekonomi dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; (c) meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antardaerah.

Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga perlu diperhatikan. Jalan penghubung untuk mempercepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota dan kabupaten, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan

terminal serta angkutan pedesaan juga diutamakan agar mempermudah akses masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.

Prioritas 10: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk 1) menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah; 2) pengaturan zona rencana pola ruang; 3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten serta; 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; h) mengembangkan hutan kota.

Fokus kebijakan dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih, reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Dalam hal penataan ruang disamping

percepatan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), perlu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional.

Prioritas 11 :Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi. Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu, instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah selama ini masih mengalami berbagai hambatan dan kendala. TIK masih dipandang sebagai *cost center* dan bukan sebagai *long term investment* sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya secara jelas. Selain itu, faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan fokus kegiatan untuk: 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan teknologi dan komunikasi di beberapa wilayah; 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya telekomunikasi dan komunikasi aparatur antar SKPD dan di setiap jenjang; 3) Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam perencanaan, pelaporan, maupun dalam sistem pelayanan publik.

Prioritas 12. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)

Kawasan perbatasan menjadi beranda depan daerah. Disisi lain *Hinterland* adalah daerah pedalaman yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai



Timur. Peran daerah *Hinterland* cukup penting dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat lokal. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang sebagian wilayah masih merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah pembukaan isolasi wilayah dan pembangunan sarana kewilayahan.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*), arah kebijakan pada pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas pada informasi dalam hubungan pengembangan kawasan agropolitan, difokuskan pada: 1) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung (transportasi, komunikasi, air bersih dan energi); 2) pemenuhan kebutuhan dasar; penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang layak; 3) melakukan kerjasama pembangunan antar kabupaten perbatasan serta membentuk Badan Pengelola Perbatasan untuk penyelesaian batas administratif wilayah dan 4) pengembangan kawasan agribisnis dan kota satelit di wilayah *hinterland*.

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timurtahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Sosial			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40.25%	Dinsos
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.83%	Dinsos
		Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	Meningkat	Dinsos
		Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan jaminan kesejahteraan sosial	Meningkat	Dinsos



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kecepatan Tanggap darurat :a. Bantuan Sosial korban bencana b. Serana prasarana penanggulangan bencana	Meningkat	Dinsos
		Ketenagakerjaan			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Disnakertrans
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Kesempatan kerja	 %	Disnakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	4,25 %	
			Angka Pengangguran	4,28	
			Rasio penduduk yang bekerja	76,07	
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio serikat buruh/perusahaan		Disnakertrans
		Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	Perjanjian kerja dari perusahaan		Disnakertrans
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)	Jumlah peserta BLK Mandiri	Meningkat	Disnakertrans
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)	Rasio ketergantungan	33,45	Disnakertrans
		Pemberdayaan Masyarakat			
		Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan	Rasio penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk	Menurun	Bapemas
			Jumlah keluarga miskin yang berusaha di agribisnis	Meningkat	
		Ketransmigrasian			
		Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi	Penempatan transmigrasi		Disnakertrans
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS binaan	Meningkat	BPPKB
		Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkat	BPPKB
		Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkat	BPPKB



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) / Penyediaan dukungan operasional IMP	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)	Meningkat	BPPKB
		Ketahanan Pangan			
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		BKPP
			Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	9 - 19 Juta	
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Pendidikan			
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD per kecamatan	Meningkat	Disdik
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga pendidikan non formal	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang lulus uji kompetensi	Meningkat	Disdik
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	akreditasi sekolah	Meningkat	Disdik
		Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	Minimal 99%	Disdik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	70.63%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	minimal 97.30%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Minimal 76%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	60%	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 74.56%	
			Angka melek huruf	97.80%	
			Angka rata-rata lama sekolah	8.62	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	minimal 98%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	minimal 97%	
		Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Jumlah peserta didik inklusi		Disdik
		Perpustakaan			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan	Kantor arsip
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat	
			Jumlah perpustakaan keliling	Meningkat	
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan			
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkat	Dinkes
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	Minimal 0,45	Dinkes
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	kasus keracunan	Menurun	Dinkes
			kasus kadaluarsa obat dan makanan	Menurun	
			obat dan makanan tidak layak edar	Menurun	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	PHBS Masyarakat		Dinkes, RSUD
			Angka usia harapan hidup	70,91	
			Rasio penyandu per satuan balita	11,37	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	Dinkes, RSUD
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah tangga bersanitasi	Meningkat	Dinkes
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA	Minimal 70%	Dinkes
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	84%	RSUD
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jeringannya	Jumlah Puskesmas 24 jam (rawat inap) dan UGD	Meningkat	Dinkes
			Cakupan puskesmas	Minimal 105,56 %	
			Cakupan pembantu puskesmas	74,15%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah sakit terakreditasi dengan 12 jenis pelayanan minimal	Meningkat	RSUD



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Meningkat	RSUD
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan layanan nakes profesional	Meningkat	RSUD
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %	Dinkes
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	
			Angka kelangsungan hidup bayi	92,67	
			Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %	
		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Minimal 55 %	Dinkes
		Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Minimal 0,02	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkat	Dinkes
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74	Dinkes
			Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Jumlah KB mandiri		BPPKB
		Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Bina keluarga Balita	Meningkat	BPPKB
		Program PIK - KRR			BPPKB
		Program Penguatan Kelembagaan Pengerusuteraan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%	BPPKB
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%	
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	35% - 50%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	
			Rasio KDRT	Menurun	
			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	
		Program Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	85.39	BPPKB
			Cakupan peserta KB aktif	85.39	
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/d 3 anak	
		Program Penguatan KKB	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21.93%	BPPKB
		Kependudukan			
		Program Keluarga Berencana			Discapil
4	Peningkatan Sarana dan prasarana Perhubungan	Perhubungan			
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	pembangunan Terminal	11	Dishub
			jembatan timbang		
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rasio panjang jalan rusak/total panjang jalan	2	Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Angkutan Umum Darat	79,860	Dishub
			Angkutan Umum Laut/ Udara	567	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan darat	0.65	Dishub
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan marka jalan, pagar, rambu	1	Dishub
		Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Maksimal 1 hari	Dishub
			Rasio ijin trayek	0.11	
			Jumlah uji kir angkutan umum	317	
			Kepemilikan KIR angkutan umum	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Ketahanan Pangan			
		Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan	Jumlah penerapan TTG	Meningkat	BKPP
			Produktivitas hasil pertanian per satuan luas	Meningkat	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	45,793	BKPP
			Regulasi ketahanan pangan	Ada	
			Daerah rawan pangan	Menurun	
			Lumbung pangan	Meningkat	
			Desa mandiri pangan	Meningkat	
		Pertanian			
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	produksi padi (ton)	45,793	Distan, Disbun
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Nilai tambah hasil pertanian/perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5.73%	Distan, Disbun
			Kontribusi sektor pertanian (pelawija) terhadap PDRB	1.11%	
			Kontribusi sektor perkebunan (tanaman karet) terhadap PDRB	1.86%	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan kapasitas (TOT) SDM penyuluh	Meningkat	Distan, Disbun
			Fasilitas penyuluhan	Meningkat	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	kasus penyakit ternak	Menurun	Distan, Disbun
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi ternak/daging	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	52 kw/ha/tahun	Distan, Disbun
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	TTG peternakan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Perluasan lahan perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Diversifikasi tanaman perkebunan berorientasi pasar	Meningkat	
		Program Peningkatan Perlindungan Tanaman	Hama dan penyakit	Menurun	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan	Rasio lahan produktif	Meningkat	Distan, Disbun
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rasio jumlah SDM pertanian/perkebunan per kecamatan		Distan, Disbun
			Cakupan bina kelompok petani	100%	
		Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan	Tersedianya kecukupan informasi perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
6	Peningkatan Pembangunan Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan tiap desa	Meningkat	Bapemas
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Bapemas
			PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
			Posyandu aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Jumlah dan jenis pelatihan untuk aparatur pemerintah desa	Meningkat	Bapemas
			memiliki APBDes	Meningkat	
			memiliki RPJMDes	Meningkat	
7	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kemudahan pemberian ijin usaha bagi UMKM	Meningkat	Diskop
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Meningkat	Diskop
			Jumlah Koperasi yang menyelenggarakan RAT	Meningkat	
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)	Jumlah pelatihan bagi SDM UKM	Meningkat	Diskop



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	Persentase masyarakat yang menjadi anggota koperasi per kecamatan	Meningkat	Diskop
		Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah		Meningkat	Diskop
		Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri		Meningkat	Diskop
			Jumlah UKM non BPR/LKM UKM		
			Jumlah BPR/LKM		
		Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi	Rasio tenaga pendamping/jumlah usaha kecil dan koperasi	Meningkat	Diskop
		Penanaman Modal Daerah			
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	BPMD
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	BPMD
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Buku panduan investasi daerah	Meningkat	BPMD
			Adanya informasi potensi investasi daerah	Meningkat	
		Pariwisata			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Buku dan brosur panduan wisata daerah	Meningkat	Disparpor
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	Disparpor
			Kunjungan wisatawan	Meningkat	
			Jumlah obyek wisata	meningkat	
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah MOU dengan perusahaan pada industri pariwisata	Meningkat	Disparpor
		Kelautan dan Perikanan		1	
		Program Peningkatan Kerjasama	Jumlah MOU dengan pihak terkait	0.25%	Diskanalaut
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	pendapatan per kapita masyarakat pesisir	65.64%	Diskanalaut



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah tenaga penyuluh di daerah pesisir	77%	Diskanlaut
			Jumlah dan jenis penyuluhan di daerah pesisir	Meningkat	
		Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah peserta sosialisasi tentang kesadaran dalam pendayagunaan sumberdaya laut	80,26%	Diskanlaut
		Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Meningkat	Diskanlaut
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya		Diskanlaut
				Meningkat	
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi ikan tangkap	Meningkat	Diskanlaut
		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Meningkat	Diskanlaut
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi perikanan kelompok nelayan	Meningkat	Diskanlaut
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkat	Diskanlaut
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Jumlah sumberdaya perikanan	Meningkat	Diskanlaut
		Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah ijin usaha perikanan	Meningkat	Diskanlaut
		Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah wilayah pesisir dan pulau yang tertangani	Meningkat	Diskanlaut
		Perdagangan			
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,940,967	Disperindag
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Volume transaksi perdagangan industri kecil dan menengah		Disperindag
		Industri		5,96%	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor IKM terhadap PDRB	Minimal 1	Disperindag



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pertumbuhan Industri kecil dan menengah		
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu USD)	0.35%	Disperindag
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penyuluhan terhadap konsumen	Meningkat	Disperindag
			Diseminasi informasi produk yang aman		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemetaan kawasan industri	Meningkat	Disperindag
		Kebudayaan			
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Meningkat	Disporpar
		Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Kunjungan wisata budaya	Meningkat	Disporpar
			Jumlah obyek wisata budaya	Meningkat	
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Meningkat	Disporpar
		Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya	Laporan evaluasi Keanekaragaman Budaya	Meningkat	Disporpar
		Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	13 kali	Disporpar
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		
			Jumlah gedung Kesenian		
		Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	13 kali	Disporpar
		Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat	Jumlah kekayaan budaya yang dikelola masyarakat	100%	Disporpar
		Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Kerjasama budaya antar daerah	3	Disporpar
		Pemuda dan Olah Raga			
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
			Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
		Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	3	Disporpar
		Pemantauan Kegiatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
			balai remaja per 1000 penduduk remaja	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
		Program Pembinaan Olahraga Berbakat	Jumlah organisasi olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
8	Peningkatan Kapasitas pemerintahan (capacity building)				
		Pendidikan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disdik
		Kesehatan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan nakes	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Perhubungan			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dishub
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Meningkat	Dishub
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan	Meningkat	Dishub
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dishub
		Arsip			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Kantor arsip
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Kantor arsip
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan	Meningkat	Kantor arsip
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Kantor arsip
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	Meningkat	Kantor arsip
		Pemberdayaan Perempuan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan perempuan	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPPKB
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan	Meningkat	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya sertifikasi dan standarisasi mutu kelembagaan	Meningkat	
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah pelatihan dan kunjungan kerja	Meningkat	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Rakor	Meningkat	
			Jumlah kunjungan kerja		
			Inspeksi Kepala Daerah		
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	SPJ lengkap dan tepat waktu	Meningkat	
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Laporan capaian kinerja dan keuangan, entitas akuntansi dan pelaporan	Meningkat	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut temuan inspektorat	Menurun	
		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Sertifikasi pelatihan audit	Meningkat	
		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah aduan yang ditangani	Meningkat	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MOU antar daerah	Meningkat	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah Perda	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah PAD	Meningkat	
			Serapan anggaran		
		Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri	Jumlah MOU dengan lembaga dalam negeri	Meningkat	
		Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	Jumlah MOU dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	Meningkat	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah peserta diklat eselon	Meningkat	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Rasio pengajuan perijinan/ perijinan yang diterbitkan	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Cakupan wilayah program/ kegiatan pemerintahan desa	100%	
		Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jumlah pelanggaran hukum dan HAM	Menurun	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Cakupan wilayah program/ kegiatan pemerintahan daerah	Meningkat	
		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitas dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkat	
			Peningkatan pendapatan per kapita	Meningkat	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Diklat teknis dan tupoksi	Meningkat	
			Tingkat kelulusan sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Meningkat	
		Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan	Peserta Lomba MTQ		
		Program Pengembangan Kediklatan	Jumlah Diklat		
			Jumlah Widyaiswara		
			Jumlah kurikulum		
		Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah riset	Meningkat	
			Jumlah peneliti		
		Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Adanya standarisasi harga satuan dasar		
			Adanya standarisasi harga satuan pokok kegiatan		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM [OUTCOME]	TARGET	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Sosial			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Dinsos
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dinsos
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Dinsos
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dinsos
		Tenaga Kerja			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disnakertrans
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disnakertrans
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Disnakertrans
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disnakertrans
		Perdagangan, Industri			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang industri dan perdagangan	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan ijin usaha	Meningkat	Disperindag
		Perikanan dan Kelautan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disknaut
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disknaut
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perikanan dan kelautan	Meningkat	Disknaut
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disknaut



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		100%	Diskanlaut
		Penanaman Modal			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPMD
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPMD
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	BPMD
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal	Meningkat	BPMD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPMD
		Koperasi dan UKM			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Diskop
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Diskop
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang koperasi dan UKM	Meningkat	Diskop
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Diskop
		Pertanian			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pertanian	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Distan, Disbun
		Ketahanan Pangan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BKPP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BKPP



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan	Meningkat	BKPP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BKPP
		Pemberdayaan Masyarakat			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bapemes
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bapemes
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat	Meningkat	Bapemes
		Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bakesbang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bakesbang
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Bakesbang
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kesbangpol	Meningkat	Bakesbang
		Kependudukan dan Catatan Sipil			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Discepil
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Discepil
		Pekerjaan Umum			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	DPU
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum	Meningkat	DPU
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			DPU
		Perencanaan Pembangunan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bappeda



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bappeda
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan	Meningkat	Bappeda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Bappeda
		Lingkungan Hidup			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BLH
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BLH
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang LH	Meningkat	BLH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BLH
		Pertanahan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPLTR
		Kehutanan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat		Dishut
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan		Dishut
		Energi dan Sumberdaya Mineral			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Distamben
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Distamben
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ESDM	Meningkat	Distamben



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Distamben
		Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat		Disporpar
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disporpar
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata	Meningkat	Disporpar
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disporpar
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program pemeliharaan ketransibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat	Bakesbang
			Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Bakesbang
		Kependudukan dan Catatan Sipil			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %	Discapil
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %	
			Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Lengkap	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	80%	
			Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Minimal 90 %	
			e-KTP		
9	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman	Pekerjaan Umum			
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15	DPU
		Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	58,56%	DPU
			Rasio Jaringan Irigasi	70%	
			Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30,94%	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	68%	DPU
			konservasi air tanah		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kualitas mutu air baku		DPU
		Program Pengendalian Banjir	terbangunnya embung		DPU
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			DPU
		Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,07%	DPU
			Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %	
			Rasio permukiman layak huni	58,80%	
			Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80%	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Cakupan layanan		DPU
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Rasio tempat ibadah per satuan (seribu) penduduk	3	DPU



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai Standart	
		Program Pembangunan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%	DPU
			Rasio panjang jalan dilalui Roda 4	0.0056	
		Program Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Meningkat	DPU
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang diperbaiki	Meningkat	DPU
			Jumlah jembatan yang diperbaiki	Meningkat	
		Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Masterplan pembangunan	Meningkat	DPU
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan	Rumah tangga pengguna air bersih	75.44	DPU
		DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70.00%	DPU
		DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota	Rumah tangga pengguna air bersih	Meningkat	DPU
		Perumahan			
		Program Peningkatan Kesigepan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah mobil pemadam kebakaran	Meningkat	DPU
			Jumlah personil pemadam kebakaran	Meningkat	
			Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Meningkat	
		Penataan Ruang			
		Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB	minimal 40%	BPLTR
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	naik minimal 10%	BPLTR
			Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	
			Ketaatan terhadap RTRW	100%	
		Perencanaan Pembangunan			
		Program Pengembangan data/informasi	Tersusunnya Simreda	Ada	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Bappeda



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Ada	
			Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Ada	Bappeda
		Program perencanaan sosial budaya	Tercapainya kinerja bidang sosial budaya	100%	Bappeda
		Program Perencanaan Tata Ruang	RTRW	Ada	Bappeda
10	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup	Lingkungan Hidup			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	70%	BLH
			Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	44%	BLH
			Penegakan hukum lingkungan	40%	
			Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau		
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan emdal	Minimal 80 %	BLH
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Lokasi eks tambang yang telah direklamasi		BLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penetapan status mutu air	Meningkat	BLH
			Persentase Penduduk beralih ke air minum	Ada	
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	Ada	
		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan	Tersedianya ekowisata	Meningkat	BLH
			kerusakan kawasan konservasi yang terpulihkan	Meningkat	
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	prosentase RTH	Meningkat	BLH
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan emdal	Minimal 80 %	BLH
		Program Pengelolaan Lingkungan Alam	Luasan kawasan konservasi	Meningkat	BLH
		Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola masyarakat	Meningkat	BLH
		Pertanahan			
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Naik Minimal 10%	BPLTR
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	BPLTR
		Program Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi	100%	BPLTR
		Kehutanan			
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1.40%	Dishut
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	44%	Dishut
		Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kerusakan Kawasan Hutan	22%	Dishut
		Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan		Meningkat	Dishut
		Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan		Meningkat	Dishut
		Energi dan Sumberdaya Mineral			
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase Pertambangan tanpa ijin	0%	Distamben
			Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	80.01%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	penggunaan energi listrik alternatif	Meningkat	Distamben
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas	Jumlah peserta pelatihan	Meningkat	Distamben
		Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT	Model pengelolaan geologi dan sumber daya mineral	Meningkat	Distamben
		Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan		Distamben
		Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar	Konversi bahan bakar	Meningkat	Distamben
		Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur	Dokumen hasil evaluasi cadangan Batubara	Meningkat	Distamben
		Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur	Tersusunnya perda pertambangan dan energi	Meningkat	Distamben
11	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terbentuknya komisi informasi publik	Meningkat	Dishub
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkat	Dishub
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkat	
12	Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Penetapan Tapel Batas Kabupaten	Adanya batas wilayah yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku		
		Lingkungan Hidup			
		Pengelolaan Sumber Daya Alam daerah perbatasan	Pemanfaatan SDA oleh masyarakat perbatasan	Meningkat	
		Pekerjaan Umum			
		Peningkatan akses pasar di daerah perbatasan	Terbangunnya pasar di daerah perbatasan	Meningkat	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SKPD PELAKSANA
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan infrestruktur perbatasan	Tersedianya sarana dan prasarana memadai di daerah perbatasan	Meningkat	



BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, dalam rangka mewujudkan 'GERBANG TAMAN MAKMUR' (Gerakan Pembangunan, Pemerataan dan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur) pada tahun 2013 ditetapkan 12 [dua belas] Agenda Pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6. Peningkatan pembangunan pedesaan
7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)
9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
10. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
11. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) Penataan Ruang.



- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) KB dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal Daerah;
- 17) Kebudayaan
- 18) Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Pemerintahan Umum, otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21). Ketahanan Pangan
- 22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 23). Statistik
- 24). Kearsipan;
- 25). Komunikasi dan Informatika
- 26). Perpustakaan

b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Ketransmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk perubahan rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif tahun 2013 diuraikan sebagai sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01	Pendidikan	458,012,378,550.00	458,012,378,550.00	0.00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	458,012,378,550.00	458,012,378,550.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21,455,367,699.00	21,455,367,699.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,620,102,190.00	2,620,102,190.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	406,469,000.00	406,469,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Atas Negeri	665,422,800.00	665,422,800.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	324,855,055.00	324,855,055.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kutai Timur	3,068,931,400.00	3,068,931,400.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32	Pembayaran Gaji PTT/TK2D	6,880,262,254.00	6,880,262,254.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangatta Utara	304,000,000.00	304,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangatta Selatan	205,000,000.00	205,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Teluk Pandan	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Rantau Pulung	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Bengalon	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Ancalong	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Bengkal	167,800,000.00	167,800,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.01.40	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Wahau	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.41	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Long Mesangat	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.42	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Kongbeng	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.43	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Kaubun	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.44	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Kaliorang	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.45	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangkulirang	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.46	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Telen	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.47	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Batu Ampar	205,000,000.00	205,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.48	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Busang	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.49	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Karang	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.50	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sandaran	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,867,525,000.00	2,867,525,000.00	0.00
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,195,567,050.00	6,195,567,050.00	0.00
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	946,237,250.00	946,237,250.00	0.00
1.01.1.01.01.02.37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	471,664,000.00	471,664,000.00	0.00
1.01.1.01.01.02.38	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,777,665,800.00	4,777,665,800.00	0.00
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	205,674,000.00	205,674,000.00	0.00
1.01.1.01.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	205,674,000.00	205,674,000.00	0.00
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	866,864,470.00	866,864,470.00	0.00



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
	Keuangan			
1.01.1.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	666,864,470.00	666,864,470.00	0.00
1.01.1.01.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.07	Program Peningkatan Kerjasama	638,734,000.00	638,734,000.00	0.00
1.01.1.01.01.07.01	Penyelenggaraan Kerjasama Aparatur dan Lembaga	638,734,000.00	638,734,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,996,645,500.00	4,996,645,500.00	0.00
1.01.1.01.01.15.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	199,835,500.00	199,835,500.00	0.00
1.01.1.01.01.15.20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	125,762,500.00	125,762,500.00	0.00
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	123,367,000.00	123,367,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1,616,400,000.00	1,616,400,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15.61	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	198,745,000.00	198,745,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15.62	Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran TK	2,124,535,500.00	2,124,535,500.00	0.00
1.01.1.01.01.15.63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	277,000,000.00	277,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15.65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.15.66	Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	121,000,000.00	121,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	3,508,924,876.00	3,508,924,876.00	0.00
1.01.1.01.01.18.01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	149,253,350.00	149,253,350.00	0.00
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	288,267,000.00	288,267,000.00	0.00
1.01.1.01.01.18.08	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	248,688,226.00	248,688,226.00	0.00
1.01.1.01.01.18.12	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non	440,401,850.00	440,401,850.00	0.00



Bab 4/ Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.18.16	Formal Peningkatan Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kutai timur	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.18.17	Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan	298,303,450.00	298,303,450.00	0.00
1.01.1.01.01.18.18	Pengembangan dan Pembinaan Buta Aksara	693,986,000.00	693,986,000.00	0.00
1.01.1.01.01.18.19	Jambore PTK-PAUDNI	301,740,500.00	301,740,500.00	0.00
1.01.1.01.01.18.20	Porseni PTK-PAUDNI	641,347,500.00	641,347,500.00	0.00
1.01.1.01.01.18.22	Fasi dan Wisuda Santri	296,937,000.00	296,937,000.00	0.00
1.01.1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	231,456,600.00	231,456,600.00	0.00
1.01.1.01.01.19.60	Pengadaan Alat Bantu Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	231,456,600.00	231,456,600.00	0.00
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50,728,975,450.00	50,728,975,450.00	0.00
1.01.1.01.01.20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	631,910,800.00	631,910,800.00	0.00
1.01.1.01.01.20.07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	7,141,758,900.00	7,141,758,900.00	0.00
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,579,741,200.00	3,579,741,200.00	0.00
1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	30,551,307,000.00	30,551,307,000.00	0.00
1.01.1.01.01.20.14	Diklat Sertifikasi untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	926,594,000.00	926,594,000.00	0.00
1.01.1.01.01.20.16	Bimbingan Teknis Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	142,775,000.00	142,775,000.00	0.00
1.01.1.01.01.20.28	Pendampingan Pemberian Insentif Guru (Tambahan Penghasilan)	103,438,000.00	103,438,000.00	0.00
1.01.1.01.01.20.35	Tambahan Penghasilan untuk Guru TKA/TPA/TKG	4,555,256,500.00	4,555,256,500.00	0.00



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.20.36	Pembinaan Guru Sekolah Model Pelaksanaan KTSP Pada Pendidikan Dasar	884,275,900.00	884,275,900.00	0.00
1.01.1.01.01.20.37	Pengembangan dan Pembinaan Pelaksanaan KTSP Melalui Sekolah Model	679,585,400.00	679,585,400.00	0.00
1.01.1.01.01.20.38	Pemberian Penghargaan Terhadap Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.20.39	Pembinaan MKKS dan MGMP SMA/MA dan SMK	782,332,750.00	782,332,750.00	0.00
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	11,025,062,100.00	11,025,062,100.00	0.00
1.01.1.01.01.22.10	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengiriman Olimpiade Sains SMA/MA dan SMK	2,222,023,650.00	2,222,023,650.00	0.00
1.01.1.01.01.22.12	Peringatan Hari-Hari Besar	1,182,652,000.00	1,182,652,000.00	0.00
1.01.1.01.01.22.14	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1,486,547,000.00	1,486,547,000.00	0.00
1.01.1.01.01.22.15	Analisis dan Evaluasi Data Pendidikan	1,477,277,550.00	1,477,277,550.00	0.00
1.01.1.01.01.22.16	Monitoring dan Pembinaan Administrasi SD/MI, SMP/MTs	269,278,800.00	269,278,800.00	0.00
1.01.1.01.01.22.17	Monitoring dan Pembinaan Administrasi SMA/MA, SMK	189,249,900.00	189,249,900.00	0.00
1.01.1.01.01.22.19	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Olimpiade Sains SD-SMP	487,873,700.00	487,873,700.00	0.00
1.01.1.01.01.22.20	Pengembangan Data Base Informasi Pendidikan	1,626,214,000.00	1,626,214,000.00	0.00
1.01.1.01.01.22.21	Humas dan Keprotokolan	345,402,500.00	345,402,500.00	0.00
1.01.1.01.01.22.22	Penyelenggaraan dan Pembinaan Dataadik	589,477,000.00	589,477,000.00	0.00
1.01.1.01.01.22.23	Pembinaan dan Pengembangan Kelengkapan UPTD Pendidikan	1,149,066,000.00	1,149,066,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	355,721,614,555.00	355,721,614,555.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.23.05	Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru	9,851,822,649.00	9,851,822,649.00	0.00
1.01.1.01.01.23.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Tempat Ibadah Untuk Pendidikan Menengah	1,868,622,750.00	1,868,622,750.00	0.00
1.01.1.01.01.23.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	9,245,272,500.00	9,245,272,500.00	0.00
1.01.1.01.01.23.13	Pengadaan Alat-Alat Praktikum dan Praktek Untuk Pendidikan Menengah	4,504,696,500.00	4,504,696,500.00	0.00
1.01.1.01.01.23.20	Pendampingan Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah	764,836,000.00	764,836,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.26	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7,847,852,700.00	7,847,852,700.00	0.00
1.01.1.01.01.23.27	Pengadaan Meubelair Untuk Pendidikan Dasar (Subsidi Provinsi)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.28	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Pendidikan Menengah	15,355,606,000.00	15,355,606,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.29	Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Pendidikan Menengah	18,925,061,500.00	18,925,061,500.00	0.00
1.01.1.01.01.23.30	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir untuk Pendidikan Menengah	6,344,291,000.00	6,344,291,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.32	Pengadaan Meubelair untuk Pendidikan Menengah	4,016,648,500.00	4,016,648,500.00	0.00
1.01.1.01.01.23.33	Pembangunan Kantor dan Laboratorium Sekolah untuk Pendidikan Menengah	17,422,173,000.00	17,422,173,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.34	Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru Untuk Pendidikan Menengah	3,310,968,250.00	3,310,968,250.00	0.00
1.01.1.01.01.23.37	Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI	1,729,758,400.00	1,729,758,400.00	0.00
1.01.1.01.01.23.38	Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs	1,413,706,100.00	1,413,706,100.00	0.00



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.23.39	Kegiatan Pra UNAS, UNAS dan UAS SMA/MA dan SMK	1,153,710,100.00	1,153,710,100.00	0.00
1.01.1.01.01.23.41	Peningkatan Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Adiwiyata	379,875,850.00	379,875,850.00	0.00
1.01.1.01.01.23.47	Verifikasi Pendirian Sekolah Pendidikan Dasar	100,210,300.00	100,210,300.00	0.00
1.01.1.01.01.23.48	Verifikasi Pendirian Sekolah Pendidikan Menengah	132,440,000.00	132,440,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.49	Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Pendidikan Dasar	10,563,000,000.00	10,563,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.50	Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Pendidikan Menengah	10,644,200,000.00	10,644,200,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.51	Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Provinsi	11,853,000,000.00	11,853,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.55	Pelaksanaan Cerdas Cermat SD/MI, SMP/MTs dan Pelatihan UKS	354,381,500.00	354,381,500.00	0.00
1.01.1.01.01.23.57	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Untuk Pendidikan Dasar	25,028,596,798.00	25,028,596,798.00	0.00
1.01.1.01.01.23.58	Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk Pendidikan Dasar	78,617,268,748.00	78,617,268,748.00	0.00
1.01.1.01.01.23.59	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir Untuk Pendidikan Dasar	20,686,113,565.00	20,686,113,565.00	0.00
1.01.1.01.01.23.63	Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru Pada Pendidikan Dasar	267,585,300.00	267,585,300.00	0.00
1.01.1.01.01.23.64	Monitoring Penerimaan Siswa Baru Pada Pendidikan Menengah	111,330,700.00	111,330,700.00	0.00
1.01.1.01.01.23.65	Peningkatan Peranan Tim Pengembangan Kurikulum Pada Pendidikan Menengah	233,218,300.00	233,218,300.00	0.00
1.01.1.01.01.23.67	Sosialisasi Tim Pengembangan Kurikulum	351,538,400.00	351,538,400.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.23.68	Penyempurnaan Sekolah Untuk Pendidikan Menengah	2,506,721,000.00	2,506,721,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.74	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara SD) dan Paket B (Setara SMP)	889,544,200.00	889,544,200.00	0.00
1.01.1.01.01.23.75	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket C (Setara SMA)	852,389,750.00	852,389,750.00	0.00
1.01.1.01.01.23.76	Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP	330,609,800.00	330,609,800.00	0.00
1.01.1.01.01.23.77	Pengelolaan Dapodik, Mutasi Siswa dan Beasiswa SD-SMP	540,617,900.00	540,617,900.00	0.00
1.01.1.01.01.23.78	Pendampingan BOSDA Provinsi dan BOSDA Kabupaten	293,646,895.00	293,646,895.00	0.00
1.01.1.01.01.23.79	Dana Dampingan SD-SMP Sekolah Unggulan	243,407,150.00	243,407,150.00	0.00
1.01.1.01.01.23.80	Monitoring BOS/ BOSDA Pada Pendidikan Dasar	301,297,250.00	301,297,250.00	0.00
1.01.1.01.01.23.81	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	519,152,000.00	519,152,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.82	Pemanfaatan BOS Pada Pendidikan Dasar	278,268,300.00	278,268,300.00	0.00
1.01.1.01.01.23.83	Dana Dampingan Peningkatan Kualitas BOSDA Pada Pendidikan Dasar	1,583,586,600.00	1,583,586,600.00	0.00
1.01.1.01.01.23.84	Pengadaan KIT IPA SD, SMP dan SMA	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.85	Pengadaan KIT IPS SD dan SMP	862,738,600.00	862,738,600.00	0.00
1.01.1.01.01.23.86	Pengadaan Sarana Belajar Teknologi & Informatika (TIK) Pendidikan dan Multimedia SD, SMP dan SMA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.87	Pembarisan Kantor, Laboratorium, Perpustakaan dan UKS Untuk Pendidikan Dasar	6,051,013,300.00	6,051,013,300.00	0.00
1.01.1.01.01.23.90	Pengadaan Buku Teks Pelajaran (BSE) SD dan SMP	3,425,569,900.00	3,425,569,900.00	0.00
1.01.1.01.01.23.91	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Sangatta Utara (Multiyears)	28,768,501,000.00	28,768,501,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.01.1.01.01.23.92	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sangatta Utara (Multiyears)	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.93	Pengadaan Buku Teks Pelajaran (BSE) SMA dan SMK	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.23.94	Dana Pendampingan Sarana Belajar Teknologi & Informatika (TIK) Pendidikan dan Multimedia SD, SMP dan SMA	196,765,500.00	196,765,500.00	0.00
1.01.1.01.01.24	Program Peningkatan Pendidikan Agama	581,039,750.00	581,039,750.00	0.00
1.01.1.01.01.24.01	MGMP Guru Agama	581,039,750.00	581,039,750.00	0.00
1.01.1.01.01.34	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,632,768,500.00	1,632,768,500.00	0.00
1.01.1.01.01.34.02	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah	846,454,500.00	846,454,500.00	0.00
1.01.1.01.01.34.08	Liga Pendidikan Indonesia	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.01.1.01.01.34.09	Penyelenggaraan Olahraga Guru	486,314,000.00	486,314,000.00	0.00
1.01.1.01.01.40	Program Pengawas Sekolah	223,684,000.00	223,684,000.00	0.00
1.01.1.01.01.40.04	Kunjungan dan Pengawasan Sekolah	223,684,000.00	223,684,000.00	0.00
1.02	Kesehatan	85,500,000,000.00	82,708,261,438.00	(2,791,738,562.00)
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	59,500,000,000.00	58,720,536,910.00	(779,463,090.00)
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,748,542,000.00	1,748,542,000.00	0.00
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,840,000.00	75,840,000.00	0.00
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	872,327,500.00	872,327,500.00	0.00
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	115,458,000.00	115,458,000.00	0.00
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43,985,000.00	43,985,000.00	0.00
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	193,736,000.00	193,736,000.00	0.00
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	308,991,000.00	308,991,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.01.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perbaikan Perlengkapan Kantor	138,204,500.00	138,204,500.00	0.00
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,808,645,300.00	1,808,645,300.00	0.00
1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	702,253,000.00	702,253,000.00	0.00
1.02.1.02.01.02.36	Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382,133,300.00	382,133,300.00	0.00
1.02.1.02.01.02.39	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	416,457,000.00	416,457,000.00	0.00
1.02.1.02.01.02.40	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	307,802,000.00	307,802,000.00	0.00
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	451,052,750.00	451,052,750.00	0.00
1.02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	451,052,750.00	451,052,750.00	0.00
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	178,847,600.00	178,847,600.00	0.00
1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25,539,600.00	25,539,600.00	0.00
1.02.1.02.01.06.06	Penyusunan Laporan Aset SKPD	153,308,000.00	153,308,000.00	0.00
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,389,849,350.00	2,389,849,350.00	0.00
1.02.1.02.01.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,009,000.00	50,009,000.00	0.00
1.02.1.02.01.15.07	Biaya Operasional UPTD Gudang Farmasi Kabupaten	253,840,000.00	253,840,000.00	0.00
1.02.1.02.01.15.08	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,086,000,350.00	2,086,000,350.00	0.00
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12,079,965,600.00	12,303,345,600.00	223,380,000.00
1.02.1.02.01.16.29	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Sepaso	671,283,250.00	671,283,250.00	0.00
1.02.1.02.01.16.30	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Muara Wahau II	721,087,550.00	721,087,550.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.16.31	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Teluk Pandan	532,056,250.00	532,056,250.00	0.00
1.02.1.02.01.16.32	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Sangatta Selatan	469,811,000.00	469,811,000.00	0.00
1.02.1.02.01.16.33	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Sangkulirang	710,977,750.00	710,977,750.00	0.00
1.02.1.02.01.16.34	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Muara Bengkal	667,129,000.00	771,709,000.00	104,580,000.00
1.02.1.02.01.16.35	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Karang	532,306,500.00	532,306,500.00	0.00
1.02.1.02.01.16.36	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Long Mesangat	679,221,700.00	679,221,700.00	0.00
1.02.1.02.01.16.37	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Sandaran	537,441,500.00	537,441,500.00	0.00
1.02.1.02.01.16.38	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Busang	772,263,050.00	712,263,050.00	(60,000,000.00)
1.02.1.02.01.16.39	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Muara Ancalong	580,959,250.00	759,759,250.00	178,800,000.00
1.02.1.02.01.16.40	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kallorang	838,956,250.00	838,956,250.00	0.00
1.02.1.02.01.16.41	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Rantau Pulung	590,003,750.00	590,003,750.00	0.00
1.02.1.02.01.16.42	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Muara Wahau I	605,323,750.00	605,323,750.00	0.00
1.02.1.02.01.16.43	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Telen	529,310,750.00	529,310,750.00	0.00
1.02.1.02.01.16.44	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Batu Ampar	551,303,150.00	551,303,150.00	0.00
1.02.1.02.01.16.45	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Teluk Lingga	865,122,600.00	865,122,600.00	0.00
1.02.1.02.01.16.46	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kaibun	611,557,750.00	611,557,750.00	0.00
1.02.1.02.01.16.47	Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kongbeng	613,850,800.00	613,850,800.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	85,305,250.00	35,020,000.00	(50,285,250.00)
1.02.1.02.01.17.02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	85,305,250.00	35,020,000.00	(50,285,250.00)
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,522,160,000.00	1,522,160,000.00	0.00
1.02.1.02.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	45,093,000.00	45,093,000.00	0.00
1.02.1.02.01.19.09	Pengembangan Desa Siaga	181,304,500.00	181,304,500.00	0.00
1.02.1.02.01.19.11	Peningkatan Kemandirian dan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Sehat	257,713,500.00	257,713,500.00	0.00
1.02.1.02.01.19.12	Pengembangan Media dan Promosi Kesehatan	603,372,000.00	603,372,000.00	0.00
1.02.1.02.01.19.13	Pengembangan Kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)	71,208,000.00	71,208,000.00	0.00
1.02.1.02.01.19.17	Peningkatan Stratifikasi Posyandu	214,235,000.00	214,235,000.00	0.00
1.02.1.02.01.19.18	Penjaringan Kesehatan Anak SD dan sederajat	149,234,000.00	149,234,000.00	0.00
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,725,022,000.00	1,725,022,000.00	0.00
1.02.1.02.01.20.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	49,810,000.00	49,810,000.00	0.00
1.02.1.02.01.20.09	Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan Perawatan Balita Gizi Buruk	189,521,100.00	189,521,100.00	0.00
1.02.1.02.01.20.10	Pemantauan Garam Beryodium Tingkat Rumah Tangga	134,866,250.00	134,866,250.00	0.00
1.02.1.02.01.20.12	Pemberian Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Balita, dan Ibu Nifas dan Pemberian Tablet Besi (Fe) kepada Ibu Hamil	222,902,700.00	222,902,700.00	0.00
1.02.1.02.01.20.13	Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin (Subsidi APBD I)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.02.1.02.01.20.19	Penanggulangan Kasus Gizi Buruk pada Balita	141,434,550.00	141,434,550.00	0.00
1.02.1.02.01.20.20	Pemantauan ASI Eksklusif pada anak Usia 0 - 6 bulan	210,766,400.00	210,766,400.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.20.23	Pendampingan manajemen dan operasional dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten	275,721,000.00	275,721,000.00	0.00
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1,592,848,250.00	1,432,169,010.00	(160,679,240.00)
1.02.1.02.01.21.06	Peningkatan Pengawasan Sarana Air Bersih dan Limbah Cair	425,217,750.00	373,807,750.00	(51,410,000.00)
1.02.1.02.01.21.09	Peningkatan Pengawasan Lingkungan Pemukiman (PLP STBM)	895,575,500.00	786,306,260.00	(109,269,240.00)
1.02.1.02.01.21.10	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Institusi Umum	88,419,750.00	88,419,750.00	0.00
1.02.1.02.01.21.11	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Tempat Umum	61,912,500.00	61,912,500.00	0.00
1.02.1.02.01.21.14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Lingkungan	121,722,750.00	121,722,750.00	0.00
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3,696,191,100.00	3,304,458,100.00	(391,733,000.00)
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	712,707,250.00	649,767,250.00	(62,940,000.00)
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	204,260,850.00	193,148,850.00	(11,112,000.00)
1.02.1.02.01.22.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,048,500.00	50,048,500.00	0.00
1.02.1.02.01.22.12	Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah	669,792,500.00	572,575,500.00	(97,217,000.00)
1.02.1.02.01.22.13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	135,542,250.00	113,250,250.00	(22,292,000.00)
1.02.1.02.01.22.14	Penanggulangan dan Pemberantasan HIV dan AIDS	483,873,500.00	403,995,500.00	(79,878,000.00)
1.02.1.02.01.22.16	Penanggulangan TB Paru	310,233,250.00	292,587,250.00	(17,646,000.00)
1.02.1.02.01.22.17	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria	163,721,000.00	90,625,000.00	(73,096,000.00)
1.02.1.02.01.22.19	Pemberantasan Sarang Nyamuk	762,215,750.00	762,215,750.00	0.00
1.02.1.02.01.22.21	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare	49,136,250.00	49,136,250.00	0.00
1.02.1.02.01.22.23	Pencegahan dan penanganan penyakit Filariasis	154,660,000.00	127,108,000.00	(27,552,000.00)
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan	2,940,041,000.00	2,554,090,850.00	(385,950,150.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
	Kesehatan			
1.02.1.02.01.23.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	49,197,000.00	49,197,000.00	0.00
1.02.1.02.01.23.07	Peningkatan pelayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan	186,162,000.00	109,872,000.00	(76,290,000.00)
1.02.1.02.01.23.08	Peningkatan pelayanan puskesmas 24 jam	227,721,000.00	166,771,000.00	(60,950,000.00)
1.02.1.02.01.23.09	Peningkatan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya	340,527,000.00	340,527,000.00	0.00
1.02.1.02.01.23.11	Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas	424,287,500.00	264,950,350.00	(159,337,150.00)
1.02.1.02.01.23.12	Pelayanan kunjungan dokter spesialis di puskesmas	242,485,000.00	242,485,000.00	0.00
1.02.1.02.01.23.13	Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan	98,235,750.00	69,415,750.00	(28,820,000.00)
1.02.1.02.01.23.14	Penyusunan regulasi atau peraturan bidang kesehatan	824,554,000.00	824,554,000.00	0.00
1.02.1.02.01.23.15	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	265,669,500.00	205,116,500.00	(60,553,000.00)
1.02.1.02.01.23.16	Peningkatan Manajemen Mutu Puskesmas	281,202,250.00	281,202,250.00	0.00
1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	15,219,422,000.00	15,219,422,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	469,422,000.00	469,422,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.57	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah (Bantuan Keuangan Provinsi)	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.68	Pengadaan Penunjang Sarana dan Prasarana Kesehatan	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.88	Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi)	1,922,708,000.00	1,922,708,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.99	Perluasan Ruang Pelayanan di Puskesmas	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.25.104	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	483,005,000.00	483,005,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.105	Puskesmas 24 Jam Teluk Lingga (Bantuan Keuangan Provinsi)	3,636,500,000.00	3,636,500,000.00	0.00
1.02.1.02.01.25.106	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan Prasaranan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Bantuan Keuangan Provinsi)	6,357,787,000.00	6,357,787,000.00	0.00
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2,499,997,850.00	2,374,662,850.00	(125,335,000.00)
1.02.1.02.01.32.04	Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan	346,083,750.00	346,083,750.00	0.00
1.02.1.02.01.32.05	Peningkatan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	358,591,500.00	358,591,500.00	0.00
1.02.1.02.01.32.08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	550,561,550.00	550,561,550.00	0.00
1.02.1.02.01.32.13	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana	156,357,350.00	150,683,350.00	(5,674,000.00)
1.02.1.02.01.32.15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	319,793,450.00	200,132,450.00	(119,661,000.00)
1.02.1.02.01.32.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	575,426,300.00	575,426,300.00	0.00
1.02.1.02.01.32.17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	143,660,950.00	143,660,950.00	0.00
1.02.1.02.01.32.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00
1.02.1.02.01.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	1,588,628,950.00	1,411,523,950.00	(177,105,000.00)
1.02.1.02.01.33.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indera	146,305,500.00	130,805,500.00	(15,500,000.00)
1.02.1.02.01.33.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	176,084,150.00	176,084,150.00	0.00
1.02.1.02.01.33.03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	294,968,550.00	294,968,550.00	0.00
1.02.1.02.01.33.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	241,093,900.00	241,093,900.00	0.00
1.02.1.02.01.33.05	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana, Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan	298,176,900.00	177,491,900.00	(120,685,000.00)
1.02.1.02.01.33.08	Peningkatan Pelayanan Olah Raga	80,678,750.00	80,678,750.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.33.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	124,429,150.00	124,429,150.00	0.00
1.02.1.02.01.33.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	177,759,050.00	136,839,050.00	(40,920,000.00)
1.02.1.02.01.33.11	Monitoring dan Evaluasi	49,133,000.00	49,133,000.00	0.00
1.02.1.02.01.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1,101,659,800.00	972,301,700.00	(129,358,100.00)
1.02.1.02.01.34.06	Penyusunan Profil Kesehatan	228,069,300.00	219,421,000.00	(8,648,300.00)
1.02.1.02.01.34.10	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	312,219,950.00	213,110,150.00	(99,109,800.00)
1.02.1.02.01.34.11	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan	347,776,050.00	347,776,050.00	0.00
1.02.1.02.01.34.21	Pertemuan Penyusunan Prioritas dan Masalah Kesehatan Kabupaten	213,594,500.00	191,994,500.00	(21,600,000.00)
1.02.1.02.01.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	6,285,196,750.00	6,878,683,400.00	593,486,650.00
1.02.1.02.01.35.02	Biaya Operasional Satgas Jaminan Kesehatan Daerah	439,953,000.00	323,024,400.00	(116,928,600.00)
1.02.1.02.01.35.03	Sosialisasi Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kutai Timur	191,210,000.00	62,664,750.00	(128,545,250.00)
1.02.1.02.01.35.04	Penyediaan Biaya Jaminan Kesehatan Daerah	5,076,600,000.00	5,976,510,000.00	899,910,000.00
1.02.1.02.01.35.05	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	466,466,000.00	423,466,000.00	(43,000,000.00)
1.02.1.02.01.35.07	Pelatihan Petugas Klaim Puskesmas	110,967,750.00	93,018,250.00	(17,949,500.00)
1.02.1.02.01.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,586,624,450.00	2,410,740,450.00	(175,884,000.00)
1.02.1.02.01.36.01	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan D1 Keperawatan ke D3 Keperawatan	1,457,251,950.00	1,399,753,700.00	(57,498,250.00)
1.02.1.02.01.36.03	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	593,145,800.00	558,577,800.00	(34,568,000.00)
1.02.1.02.01.36.05	Peningkatan Pengawasan Perijinan, Sertifikasi, dan Registrasi Tenaga Kesehatan	250,627,850.00	166,810,100.00	(83,817,750.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.01.36.06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Pelayanan Kesehatan	131,366,550.00	131,366,550.00	0.00
1.02.1.02.01.36.07	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	103,843,300.00	103,843,300.00	0.00
1.02.1.02.01.36.08	Monitoring dan Evaluasi Program	50,389,000.00	50,389,000.00	0.00
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Sangatta	26,000,000,000.00	23,987,724,528.00	[2,012,275,472.00]
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,501,859,340.00	8,383,551,240.00	[118,308,100.00]
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402,974,000.00	402,974,000.00	0.00
1.02.1.02.02.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284,588,000.00	270,153,000.00	[14,135,000.00]
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	995,384,000.00	995,384,000.00	0.00
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,594,663,900.00	1,594,663,900.00	0.00
1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,241,360,000.00	1,194,320,900.00	[47,039,100.00]
1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	194,700,000.00	194,700,000.00	0.00
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187,058,000.00	187,058,000.00	0.00
1.02.1.02.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97,051,540.00	97,051,540.00	0.00
1.02.1.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,486,017,000.00	1,484,183,000.00	[1,834,000.00]
1.02.1.02.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	242,072,000.00	217,072,000.00	[25,000,000.00]
1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Lembur	898,714,000.00	868,714,000.00	[30,000,000.00]
1.02.1.02.02.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	877,276,900.00	877,276,900.00	0.00
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,670,046,300.00	1,592,800,500.00	[77,245,800.00]
1.02.1.02.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	837,854,000.00	760,608,200.00	[77,245,800.00]



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	769,748,300.00	769,748,300.00	0.00
1.02.1.02.02.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	62,444,000.00	62,444,000.00	0.00
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	310,302,000.00	310,302,000.00	0.00
1.02.1.02.02.03.06	Kegiatan Peningkatan dan Penerapan Disiplin Pegawai	310,302,000.00	310,302,000.00	0.00
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,139,937,100.00	2,789,937,100.00	650,000,000.00
1.02.1.02.02.05.05	Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan/Jasa Pelayanan	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
1.02.1.02.02.05.10	Pelatihan, Kursus, Bimtek, Workshop untuk Tenaga Struktural, Medis, Teknis dan Tenaga Penunjang	1,469,347,100.00	1,469,347,100.00	0.00
1.02.1.02.02.05.13	Bimtek Capacity Building RS	289,564,000.00	189,564,000.00	(100,000,000.00)
1.02.1.02.02.05.14	In House Training Nakes Rumah Sakit	381,026,000.00	381,026,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73,017,000.00	73,017,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06.09	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,346,000.00	59,346,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06.10	Penyusunan LAKIP	13,671,000.00	13,671,000.00	0.00
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	490,742,700.00	415,242,700.00	(75,500,000.00)
1.02.1.02.02.16.45	Pengembangan Instrumen Manajemen Mutu	263,648,000.00	218,148,000.00	(45,500,000.00)
1.02.1.02.02.16.48	Pengembangan K3 RS	25,191,700.00	25,191,700.00	0.00
1.02.1.02.02.16.51	Pengembangan Layanan Konseling Kesehatan	70,141,000.00	40,141,000.00	(30,000,000.00)
1.02.1.02.02.16.52	Pengembangan MCU	131,762,000.00	131,762,000.00	0.00
1.02.1.02.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	452,678,900.00	444,278,900.00	(8,400,000.00)
1.02.1.02.02.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	153,378,000.00	144,978,000.00	(8,400,000.00)
1.02.1.02.02.19.15	Penyediaan Media Penyuluhan Di Rumah Sakit	215,226,000.00	215,226,000.00	0.00



Kode	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.1.02.02.19.17	Pengembangan Rencana Pemasaran RS	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.02.1.02.02.19.18	Pengembangan PKMRS	34,074,900.00	34,074,900.00	0.00
1.02.1.02.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,604,888,100.00	1,604,888,100.00	0.00
1.02.1.02.02.20.07	Penyediaan Makan dan Minum Harian Pasien	1,604,888,100.00	1,604,888,100.00	0.00
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	256,937,500.00	256,937,500.00	0.00
1.02.1.02.02.23.07	Pelaksanaan JSA (Sertifikat)	236,428,000.00	236,428,000.00	0.00
1.02.1.02.02.23.08	Redesign Struktur Organisasi RS	20,509,500.00	20,509,500.00	0.00
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	200,672,000.00	200,672,000.00	0.00
1.02.1.02.02.24.11	Penanganan Pasien Gakin (Askes Center)	200,672,000.00	200,672,000.00	0.00
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	8,228,127,256.00	5,945,922,156.00	(2,282,205,100.00)
1.02.1.02.02.26.20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	875,367,000.00	853,367,000.00	(22,000,000.00)
1.02.1.02.02.26.28	Pengadaan Linen RS	425,714,500.00	343,644,400.00	(82,070,100.00)
1.02.1.02.02.26.29	Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran RS	5,623,801,756.00	3,698,801,756.00	(1,925,000,000.00)
1.02.1.02.02.26.32	Pengadaan Laboratorium dan Alat Radiologi RS	1,303,244,000.00	1,050,109,000.00	(253,135,000.00)
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	824,067,700.00	824,067,700.00	0.00
1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	255,094,000.00	255,094,000.00	0.00
1.02.1.02.02.27.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	568,973,700.00	568,973,700.00	0.00
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	398,415,404.00	297,798,932.00	(100,616,472.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.02.28.09	Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi/ Rumah Sakit	398,415,404.00	297,798,932.00	(100,616,472.00)
1.02.1.02.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	848,308,700.00	848,308,700.00	0.00
1.02.1.02.02.34.04	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	565,119,700.00	565,119,700.00	0.00
1.02.1.02.02.34.16	Penyediaan Perijinan Alat dan Kelengkapan Dokumen RS	261,749,000.00	261,749,000.00	0.00
1.02.1.02.02.34.20	Survey Kepuasan Masyarakat	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00
1.03	Pekerjaan Umum	900,091,140,541.00	919,858,114,541.00	19,766,974,000.00
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	900,091,140,541.00	919,858,114,541.00	19,766,974,000.00
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,885,948,881.00	24,205,430,881.00	319,482,000.00
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	362,672,700.00	373,952,700.00	11,280,000.00
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,585,890,500.00	4,401,970,500.00	(183,920,000.00)
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	814,483,000.00	814,483,000.00	0.00
1.03.1.03.01.01.19	Operasional Tim Pemeriksa dan Pengawas Bangunan (IMB)	500,000,000.00	700,000,000.00	200,000,000.00
1.03.1.03.01.01.23	Penyediaan Administrasi Keuangan	3,113,571,000.00	3,295,701,000.00	182,130,000.00
1.03.1.03.01.01.91	Pelayanan Administrasi UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/ Alat Berat	700,000,000.00	788,920,000.00	88,920,000.00
1.03.1.03.01.01.92	Pengadaan Peralatan UPT Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan / Alat Berat	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.01.95	Pengadaan Peralatan Bidang Cipta Karya	8,169,758,731.00	8,169,758,731.00	0.00
1.03.1.03.01.01.96	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat	1,396,858,200.00	1,353,108,200.00	(43,750,000.00)
1.03.1.03.01.01.98	Pengadaan Peralatan Bidang Pengairan	983,826,000.00	981,674,000.00	(2,152,000.00)
1.03.1.03.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,958,888,750.00	3,025,862,750.00	66,974,000.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,010,500,000.00	1,941,500,000.00	(69,000,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,010,500,000.00	1,941,500,000.00	(69,000,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,038,549,000.00	2,038,549,000.00	0.00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	2,038,549,000.00	2,038,549,000.00	0.00
1.03 . 1.03.01 . 09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	677,475,600.00	691,815,600.00	14,340,000.00
1.03 . 1.03.01 . 09 . 05	Pengelolaan Barang Milik daerah	677,475,600.00	691,815,600.00	14,340,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	38,787,124,759.00	38,264,637,259.00	(522,487,500.00)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 15	Peningkatan Drainase Jalan A.W. Syahrani	35,089,253,059.00	35,089,253,059.00	0.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 17	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Selangkau Kec. Kaliorang	674,504,700.00	517,995,700.00	(156,509,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 18	Pembangunan Saluran Drainase	3,023,367,000.00	2,657,388,500.00	(365,978,500.00)
1.03 . 1.03.01 . 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	7,945,523,000.00	7,659,728,000.00	(285,795,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 07	Pembangunan Turap Sungai Lembak Kec.Bengalon	7,945,523,000.00	7,659,728,000.00	(285,795,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6,595,646,950.00	7,861,646,450.00	1,265,999,500.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Kaubun Kecamatan Kaubun	652,276,000.00	593,280,000.00	(58,996,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 41	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Pesap Kecamatan Kongbeng	653,246,000.00	609,222,000.00	(44,024,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Tanah Abang Kec. Long Mesangat	663,017,000.00	625,437,000.00	(37,580,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43	Operasional dan Pemeliharaan (Swakelola)	1,164,362,150.00	2,815,440,650.00	1,651,078,500.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44	Perencanaan Pengairan	1,400,325,800.00	1,273,313,800.00	(127,012,000.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.24.45	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Mukti Lestari Kec. Karangan	517,698,000.00	475,400,000.00	(42,298,000.00)
1.03.1.03.01.24.46	Pembangunan Jaringan Irigasi RT.05 Sungai Merah Desa Susuk Luar Kec. Sandaran	499,068,000.00	473,472,000.00	(25,596,000.00)
1.03.1.03.01.24.47	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal	538,918,000.00	511,407,000.00	(27,511,000.00)
1.03.1.03.01.24.48	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Perupuk Kec. Sangkulirang	506,736,000.00	484,674,000.00	(22,062,000.00)
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	4,427,132,350.00	3,971,567,350.00	(455,565,000.00)
1.03.1.03.01.26.22	Normalisasi Embung Desa Suka Maju Kec. Kongbeng	237,914,000.00	237,276,000.00	(638,000.00)
1.03.1.03.01.26.23	Rehabilitasi Bendung Kec. Telen	303,362,600.00	288,016,600.00	(15,346,000.00)
1.03.1.03.01.26.24	Normalisasi Sungai Redan Desa Danau Redan Kec. Teluk Pandan (Tahap II)	1,200,532,800.00	899,388,800.00	(301,144,000.00)
1.03.1.03.01.26.25	Normalisasi Sungai I	968,199,750.00	853,323,750.00	(114,876,000.00)
1.03.1.03.01.26.26	Normalisasi Sungai II	1,018,500,200.00	1,011,917,200.00	(6,583,000.00)
1.03.1.03.01.26.27	Normalisasi Sungai III	698,623,000.00	681,645,000.00	(16,978,000.00)
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0.00	2,439,382,800.00	2,439,382,800.00
1.03.1.03.01.27.18	Pembangunan Booster Air Bersih Kota Sangatta (Lanjutan)	0.00	2,439,382,800.00	2,439,382,800.00
1.03.1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.30.22	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pendamping Dana PPIP Tahun Anggaran 2013 (Lanjutan)	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	84,254,653,500.00	82,579,278,050.00	(1,675,375,450.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	769,748,300.00	769,748,300.00	0.00
1.02.1.02.02.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	62,444,000.00	62,444,000.00	0.00
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	310,302,000.00	310,302,000.00	0.00
1.02.1.02.02.03.06	Kegiatan Peningkatan dan Penerapan Disiplin Pegawai	310,302,000.00	310,302,000.00	0.00
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,139,937,100.00	2,789,937,100.00	650,000,000.00
1.02.1.02.02.05.05	Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan/ Jasa Pelayanan	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
1.02.1.02.02.05.10	Pelatihan, Kursus, Bimtek, Workshop untuk Tenaga Struktural, Medis, Teknis dan Tenaga Penunjang	1,469,347,100.00	1,469,347,100.00	0.00
1.02.1.02.02.05.13	Bimtek Capacity Building RS	289,564,000.00	189,564,000.00	(100,000,000.00)
1.02.1.02.02.05.14	In House Training Nakes Rumah Sakit	381,026,000.00	381,026,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73,017,000.00	73,017,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06.09	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,346,000.00	59,346,000.00	0.00
1.02.1.02.02.06.10	Penyusunan LAKIP	13,671,000.00	13,671,000.00	0.00
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	490,742,700.00	415,242,700.00	(75,500,000.00)
1.02.1.02.02.16.45	Pengembangan Instrumen Manajemen Mutu	263,648,000.00	218,148,000.00	(45,500,000.00)
1.02.1.02.02.16.48	Pengembangan K3 RS	25,191,700.00	25,191,700.00	0.00
1.02.1.02.02.16.51	Pengembangan Layanan Konseling Kesehatan	70,141,000.00	40,141,000.00	(30,000,000.00)
1.02.1.02.02.16.52	Pengembangan MCU	131,762,000.00	131,762,000.00	0.00
1.02.1.02.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	452,678,900.00	444,278,900.00	(8,400,000.00)
1.02.1.02.02.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	153,378,000.00	144,978,000.00	(8,400,000.00)
1.02.1.02.02.19.15	Penyediaan Media Penyuluhan Di Rumah Sakit	215,226,000.00	215,226,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.02.19.17	Pengembangan Rencana Pemasaran RS	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.02.1.02.02.19.18	Pengembangan PKMRS	34,074,900.00	34,074,900.00	0.00
1.02.1.02.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,604,888,100.00	1,604,888,100.00	0.00
1.02.1.02.02.20.07	Penyediaan Makan dan Minum Harian Pasien	1,604,888,100.00	1,604,888,100.00	0.00
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	256,937,500.00	256,937,500.00	0.00
1.02.1.02.02.23.07	Pelaksanaan JSA (Sertifikat)	236,428,000.00	236,428,000.00	0.00
1.02.1.02.02.23.08	Redesign Struktur Organisasi RS	20,509,500.00	20,509,500.00	0.00
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	200,672,000.00	200,672,000.00	0.00
1.02.1.02.02.24.11	Penanganan Pasien Gakin (Askes Center)	200,672,000.00	200,672,000.00	0.00
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	8,228,127,256.00	5,945,922,156.00	(2,282,205,100.00)
1.02.1.02.02.26.20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	875,367,000.00	853,367,000.00	(22,000,000.00)
1.02.1.02.02.26.28	Pengadaan Linen RS	425,714,500.00	343,644,400.00	(82,070,100.00)
1.02.1.02.02.26.29	Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran RS	5,623,801,756.00	3,698,801,756.00	(1,925,000,000.00)
1.02.1.02.02.26.32	Pengadaan Laboratorium dan Alat Radiologi RS	1,303,244,000.00	1,050,109,000.00	(253,135,000.00)
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	824,067,700.00	824,067,700.00	0.00
1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	255,094,000.00	255,094,000.00	0.00
1.02.1.02.02.27.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	568,973,700.00	568,973,700.00	0.00
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	398,415,404.00	297,798,932.00	(100,616,472.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.02.1.02.02.28.09	Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi/ Rumah Sakit	398,415,404.00	297,798,932.00	(100,616,472.00)
1.02.1.02.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	848,308,700.00	848,308,700.00	0.00
1.02.1.02.02.34.04	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	565,119,700.00	565,119,700.00	0.00
1.02.1.02.02.34.16	Penyediaan Perijinan Alat dan Kelengkapan Dokumen RS	261,749,000.00	261,749,000.00	0.00
1.02.1.02.02.34.20	Survey Kepuasan Masyarakat	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00
1.03	Pekerjaan Umum	900,091,140,541.00	919,858,114,541.00	19,766,974,000.00
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	900,091,140,541.00	919,858,114,541.00	19,766,974,000.00
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,885,948,881.00	24,205,430,881.00	319,482,000.00
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	362,672,700.00	373,952,700.00	11,280,000.00
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,585,890,500.00	4,401,970,500.00	(183,920,000.00)
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	814,483,000.00	814,483,000.00	0.00
1.03.1.03.01.01.19	Operasional Tim Pemeriksa dan Pengawas Bangunan (IMB)	500,000,000.00	700,000,000.00	200,000,000.00
1.03.1.03.01.01.23	Penyediaan Administrasi Keuangan	3,113,571,000.00	3,295,701,000.00	182,130,000.00
1.03.1.03.01.01.91	Pelayanan Administrasi UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/Alat Berat	700,000,000.00	788,920,000.00	88,920,000.00
1.03.1.03.01.01.92	Pengadaan Peralatan UPT Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan / Alat Berat	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.01.95	Pengadaan Peralatan Bidang Cipta Karya	8,169,758,731.00	8,169,758,731.00	0.00
1.03.1.03.01.01.96	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat	1,396,858,200.00	1,353,108,200.00	(43,750,000.00)
1.03.1.03.01.01.98	Pengadaan Peralatan Bidang Pengairan	983,826,000.00	981,674,000.00	(2,152,000.00)
1.03.1.03.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,958,888,750.00	3,025,862,750.00	66,974,000.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,010,500,000.00	1,941,500,000.00	(69,000,000.00)
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,010,500,000.00	1,941,500,000.00	(69,000,000.00)
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,038,549,000.00	2,038,549,000.00	0.00
1.03.1.03.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	2,038,549,000.00	2,038,549,000.00	0.00
1.03.1.03.01.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	677,475,600.00	691,815,600.00	14,340,000.00
1.03.1.03.01.09.05	Pengelolaan Barang Milik daerah	677,475,600.00	691,815,600.00	14,340,000.00
1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	38,787,124,759.00	38,264,637,259.00	(522,487,500.00)
1.03.1.03.01.16.15	Peningkatan Drainase Jalan A.W. Syahrani	35,089,253,059.00	35,089,253,059.00	0.00
1.03.1.03.01.16.17	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Selangkau Kec. Kaliurang	674,504,700.00	517,995,700.00	(156,509,000.00)
1.03.1.03.01.16.18	Pembangunan Saluran Drainase	3,023,367,000.00	2,657,388,500.00	(365,978,500.00)
1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	7,945,523,000.00	7,659,728,000.00	(285,795,000.00)
1.03.1.03.01.17.07	Pembangunan Turap Sungai Lembak Kec.Bengalon	7,945,523,000.00	7,659,728,000.00	(285,795,000.00)
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6,595,646,950.00	7,861,646,450.00	1,265,999,500.00
1.03.1.03.01.24.40	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Kaubun Kecamatan Kaubun	652,276,000.00	593,280,000.00	(58,996,000.00)
1.03.1.03.01.24.41	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Pesap Kecamatan Kongbeng	653,246,000.00	609,222,000.00	(44,024,000.00)
1.03.1.03.01.24.42	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Bendung D.I. Tanah Abang Kec. Long Mesangat	663,017,000.00	625,437,000.00	(37,580,000.00)
1.03.1.03.01.24.43	Operasional dan Pemeliharaan (Swakelola)	1,164,362,150.00	2,815,440,650.00	1,651,078,500.00
1.03.1.03.01.24.44	Perencanaan Pengairan	1,400,325,800.00	1,273,313,800.00	(127,012,000.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.24.45	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Mukti Lestari Kec. Karangan	517,698,000.00	475,400,000.00	(42,298,000.00)
1.03.1.03.01.24.46	Pembangunan Jaringan Irigasi RT.05 Sungai Merah Desa Susuk Luar Kec. Sandaran	499,068,000.00	473,472,000.00	(25,596,000.00)
1.03.1.03.01.24.47	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal	538,918,000.00	511,407,000.00	(27,511,000.00)
1.03.1.03.01.24.48	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Perupuk Kec. Sangkulirang	506,736,000.00	484,674,000.00	(22,062,000.00)
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	4,427,132,350.00	3,971,567,350.00	(455,565,000.00)
1.03.1.03.01.26.22	Normalisasi Embung Desa Suka Maju Kec. Kongbang	237,914,000.00	237,276,000.00	(638,000.00)
1.03.1.03.01.26.23	Rehabilitasi Bendung Kec. Telen	303,362,600.00	288,016,600.00	(15,346,000.00)
1.03.1.03.01.26.24	Normalisasi Sungai Redan Desa Danau Redan Kec. Teluk Pandan (Tahap II)	1,200,532,800.00	899,388,800.00	(301,144,000.00)
1.03.1.03.01.26.25	Normalisasi Sungai I	968,199,750.00	853,323,750.00	(114,876,000.00)
1.03.1.03.01.26.26	Normalisasi Sungai II	1,018,500,200.00	1,011,917,200.00	(6,583,000.00)
1.03.1.03.01.26.27	Normalisasi Sungai III	698,623,000.00	681,645,000.00	(16,978,000.00)
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0.00	2,439,382,800.00	2,439,382,800.00
1.03.1.03.01.27.18	Pembangunan Booster Air Bersih Kota Sangatta (Lanjutan)	0.00	2,439,382,800.00	2,439,382,800.00
1.03.1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.30.22	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pendamping Dana PPIP Tahun Anggaran 2013 (Lanjutan)	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	84,254,653,500.00	82,579,278,050.00	(1,675,375,450.00)



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan SKPD, Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.33.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan I	5,975,000,000.00	4,973,573,000.00	(1,001,427,000.00)
1.03.1.03.01.33.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II	3,800,000,000.00	3,235,786,000.00	(564,214,000.00)
1.03.1.03.01.33.16	Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan	7,380,800,000.00	7,380,800,000.00	0.00
1.03.1.03.01.33.17	Pembangunan Kantor Badan Diklat	25,893,000,000.00	19,954,626,150.00	(5,938,373,850.00)
1.03.1.03.01.33.18	Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	3,891,353,500.00	6,261,831,000.00	2,370,477,500.00
1.03.1.03.01.33.19	Pematangan Lahan Perumahan PNS Simono	5,000,000,000.00	4,264,461,000.00	(735,539,000.00)
1.03.1.03.01.33.20	Penyempurnaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur	10,300,000,000.00	8,368,429,000.00	(1,931,571,000.00)
1.03.1.03.01.33.21	Pembangunan Tempat Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sangatta	1,000,000,000.00	946,544,000.00	(53,456,000.00)
1.03.1.03.01.33.22	Pembangunan Kantor UPTD. Pemadam Kebakaran Sangatta	5,000,000,000.00	4,258,702,000.00	(741,298,000.00)
1.03.1.03.01.33.23	Pembangunan Kantor Badan Kependudukan dan Capil	8,786,000,000.00	10,468,167,200.00	1,682,167,200.00
1.03.1.03.01.33.24	Pembangunan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4,628,500,000.00	7,430,498,000.00	2,801,998,000.00
1.03.1.03.01.33.25	Swakelola Cipta Karya	2,600,000,000.00	4,842,930,000.00	2,242,930,000.00
1.03.1.03.01.33.26	Pembangunan Kantor Camat Sangatta Utara (Lanjutan)	0.00	192,930,700.00	192,930,700.00
1.03.1.03.01.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	142,065,100,000.00	136,443,419,950.00	(5,621,680,050.00)
1.03.1.03.01.34.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum I	3,400,000,000.00	2,982,463,000.00	(417,537,000.00)
1.03.1.03.01.34.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum II	9,350,000,000.00	9,224,839,000.00	(125,161,000.00)



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.34.50	Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II	25,535,600,000.00	30,514,775,000.00	4,979,175,000.00
1.03.1.03.01.34.51	Pembangunan Masjid Agung Tahap III	37,513,200,000.00	37,513,200,000.00	0.00
1.03.1.03.01.34.52	Pembangunan Komplek Graha Expo Center Tahap II	8,678,400,000.00	8,678,400,000.00	0.00
1.03.1.03.01.34.53	Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS)	34,137,900,000.00	28,199,526,150.00	(5,938,373,850.00)
1.03.1.03.01.34.54	Pembangunan Plaza Penghubung GOR - Stadion	3,000,000,000.00	2,646,479,000.00	(353,521,000.00)
1.03.1.03.01.34.55	Pembuatan Landscape STQ	2,900,000,000.00	2,481,053,000.00	(418,947,000.00)
1.03.1.03.01.34.56	Pembangunan Asrama Pelajar Sangkulirang di Sangatta (Tahap II)	2,500,000,000.00	1,676,900,000.00	(823,100,000.00)
1.03.1.03.01.34.57	Penataan dan Rehabilitasi Kampus STIPER	10,000,000,000.00	8,390,356,000.00	(1,609,644,000.00)
1.03.1.03.01.34.58	Pembangunan Gedung KONI Kab. Kutai Timur	5,050,000,000.00	3,814,089,000.00	(1,235,911,000.00)
1.03.1.03.01.34.59	Pembangunan Workshop DPU Tahap I (Lanjutan)	0.00	321,339,800.00	321,339,800.00
1.03.1.03.01.35	Program Pembangunan Jalan	287,465,934,751.00	304,490,297,290.00	17,024,362,539.00
1.03.1.03.01.35.93	Pembangunan Jalan Daeng Masesa'	750,000,000.00	730,233,250.00	(19,766,750.00)
1.03.1.03.01.35.94	Pembangunan Jalan Dayung Tahap II	5,129,265,751.00	4,912,203,050.00	(217,062,701.00)
1.03.1.03.01.35.95	Pembangunan Jalan Terminal Lama - Margo Santoso	3,000,000,000.00	2,957,740,000.00	(42,260,000.00)
1.03.1.03.01.35.96	Peningkatan Jalan Soekarno - Hatza	8,500,000,000.00	8,454,220,000.00	(45,780,000.00)
1.03.1.03.01.35.97	Pembangunan Jalan Syamsul Ma'arif	1,000,000,000.00	749,332,000.00	(250,668,000.00)
1.03.1.03.01.35.98	Pembangunan Jalan 10 Nopember Tahap III	2,000,000,000.00	1,897,294,550.00	(102,705,450.00)
1.03.1.03.01.35.99	Peningkatan Jalan Poros Desa Bangun Jaya - Kaliorang	4,000,000,000.00	3,648,346,000.00	(351,654,000.00)
1.03.1.03.01.35.100	Pembangunan Jalan Ibukota Sangkulirang Tahap II	2,000,000,000.00	1,700,985,250.00	(299,014,750.00)
1.03.1.03.01.35.101	Pembangunan Jalan Rengas Kec. Kaubun	2,000,000,000.00	1,660,955,350.00	(339,044,650.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.35.102	Pembangunan Jalan Antar Desa Kadungan Jaya - Pengedan	2,500,000,000.00	2,119,720,000.00	(380,280,000.00)
1.03.1.03.01.35.103	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Karangan I	2,000,000,000.00	1,729,728,500.00	(270,271,500.00)
1.03.1.03.01.35.104	Pembangunan Jalan Simpang 3 Batu Timbau - Mawai Indah	2,000,000,000.00	1,651,427,900.00	(348,572,100.00)
1.03.1.03.01.35.105	Pembangunan Jalan Juk Ayak - Waduk	1,500,000,000.00	1,295,407,000.00	(204,593,000.00)
1.03.1.03.01.35.106	Pembangunan Jalan Desa Sido Mulyo - Sri Pantun - Kongbeng Indah	3,000,000,000.00	2,335,769,000.00	(664,231,000.00)
1.03.1.03.01.35.107	Pembangunan Jalan Simpang Jembatan Wahau menuju Desa Nehes Lih Bing	2,000,000,000.00	1,582,079,000.00	(417,921,000.00)
1.03.1.03.01.35.108	Pembangunan Jalan Senambah - Malupan Tahap III	1,500,000,000.00	1,483,900,900.00	(16,099,100.00)
1.03.1.03.01.35.109	Pembangunan Jalan Nusantara Desa Kallorang	1,000,000,000.00	775,881,250.00	(224,118,750.00)
1.03.1.03.01.35.110	Pembangunan Jalan Dusun Tanjung Manis - Long Tesak	2,000,000,000.00	1,904,533,550.00	(95,466,450.00)
1.03.1.03.01.35.111	Pembangunan Jalan Desa Tanah Abang	2,000,000,000.00	1,568,379,050.00	(431,620,950.00)
1.03.1.03.01.35.112	Pembangunan Jalan Desa Danau Redan RT. 01	1,500,000,000.00	1,327,209,750.00	(172,790,250.00)
1.03.1.03.01.35.113	Peningkatan Jalan Desa Suka Rahmat	750,000,000.00	679,183,250.00	(70,816,750.00)
1.03.1.03.01.35.114	Pembangunan Jalan Rimba Hijau - Takat Tahap II	5,000,000,000.00	4,457,019,800.00	(542,980,200.00)
1.03.1.03.01.35.115	Pembangunan Jalan Long Less - Mekar Baru	2,000,000,000.00	1,447,697,550.00	(552,302,450.00)
1.03.1.03.01.35.116	Pembangunan Jalan Benua Baru Kac. Ma. Bengkal	2,000,000,000.00	1,541,205,250.00	(458,794,750.00)
1.03.1.03.01.35.117	Pembangunan Jalan Hasanuddin Tahap III	1,000,000,000.00	899,659,700.00	(100,340,300.00)
1.03.1.03.01.35.118	Pembangunan Jalan Ma. Bengalon (Sepaso)	1,400,000,000.00	1,234,924,000.00	(165,076,000.00)
1.03.1.03.01.35.119	Peningkatan Jalan Menuju Expo	1,818,600,000.00	1,768,094,250.00	(50,505,750.00)



Bab V/Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.35.120	Pembangunan Jalan Cendana	1,000,000,000.00	836,689,800.00	(163,310,200.00)
1.03.1.03.01.35.121	Pembangunan Jalan ke Pelabuhan Kenyamukan	7,000,000,000.00	5,590,720,750.00	(1,409,279,250.00)
1.03.1.03.01.35.122	Pembangunan Jalan Sawi (Tahap II)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.35.123	Pembangunan Jalan Tanjung Manis - Susuk	18,000,000,000.00	17,003,837,550.00	(996,162,450.00)
1.03.1.03.01.35.124	Pembangunan Jalan Ery Suparjan - Kenyamukan (Bantuan Keuangan Propinsi)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.35.125	Pembangunan Jalan Akses Malay dari Simpang 4 Teluk Golok - Simpang 3 Malay (Bantuan Keuangan Propinsi)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.35.126	Pembangunan Jalan Rantau Pulung - Tepian Indah (DAK)	13,274,019,000.00	13,649,803,250.00	375,784,250.00
1.03.1.03.01.35.127	Peningkatan Jalan Ery Suparjan - Kenyamukan (MY)	36,039,275,000.00	46,039,275,000.00	10,000,000,000.00
1.03.1.03.01.35.128	Peningkatan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung (MY)	40,875,000,000.00	50,875,000,000.00	10,000,000,000.00
1.03.1.03.01.35.129	Peningkatan Jalan Ring Road II (APT. Pranoto - Sockarno Hatta) MY	34,729,775,000.00	24,729,775,000.00	(10,000,000,000.00)
1.03.1.03.01.35.130	Peningkatan Jalan Yos Sudarso (MY)	45,000,000,000.00	55,000,000,000.00	10,000,000,000.00
1.03.1.03.01.35.131	Pembangunan Jalan Menuju STIE Nusantara	1,000,000,000.00	843,868,150.00	(156,131,850.00)
1.03.1.03.01.35.132	Pembangunan Jalan Simono Tahap II	1,500,000,000.00	1,107,852,000.00	(392,148,000.00)
1.03.1.03.01.35.133	Pembangunan Jalan Awang Long Tahap II	1,500,000,000.00	1,471,561,000.00	(28,439,000.00)
1.03.1.03.01.35.134	Peningkatan Jalan Sepaso Tahap II	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.35.135	Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Ma Bengkal Ruas Benu Muda - Beno Harapan	100,000,000.00	4,100,000,000.00	4,000,000,000.00
1.03.1.03.01.35.136	Pembangunan Jalan Merdeka	1,000,000,000.00	913,602,250.00	(86,397,750.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.35.137	Pembangunan Jalan Desa Karang Seberang	1,500,000,000.00	1,409,458,250.00	(90,541,750.00)
1.03.1.03.01.35.138	Pembangunan Jalan Long Nah - Long Tesak (Lanjutan)	0.00	553,515,400.00	553,515,400.00
1.03.1.03.01.35.139	Pembangunan Jalan 10 Nopember (Lanjutan)	0.00	396,677,650.00	396,677,650.00
1.03.1.03.01.35.140	Peningkatan Jalan Dayung (Lanjutan)	0.00	633,897,290.00	633,897,290.00
1.03.1.03.01.35.141	Pembangunan Jalan Ibu Kota Kec. Sangkulirang (Lanjutan)	0.00	984,230,100.00	984,230,100.00
1.03.1.03.01.35.142	Pembangunan Jalan Susuk Dalam - Susuk Luar (Lanjutan)	0.00	237,404,700.00	237,404,700.00
1.03.1.03.01.36	Program Pembangunan Jembatan	24,000,000,000.00	35,776,951,123.00	11,776,951,123.00
1.03.1.03.01.36.17	Pembangunan Box Culvert Menuju Kantor Camat Rantau Pulung	4,000,000,000.00	3,447,576,000.00	(552,424,000.00)
1.03.1.03.01.36.18	Pembangunan Jembatan Rimba Hijau Tahap III	20,000,000,000.00	19,944,215,000.00	(55,785,000.00)
1.03.1.03.01.36.19	Pembangunan Jembatan Senyur (Lanjutan)	0.00	7,311,481,203.00	7,311,481,203.00
1.03.1.03.01.36.20	Pembangunan Jembatan Karang I Desa Pengadan (Lanjutan)	0.00	1,334,116,345.00	1,334,116,345.00
1.03.1.03.01.36.21	Pembangunan Jembatan Sei Gulang - Gulang (Lanjutan)	0.00	1,480,494,225.00	1,480,494,225.00
1.03.1.03.01.36.22	Pembangunan Jembatan Long Tesak (Lanjutan)	0.00	2,259,068,350.00	2,259,068,350.00
1.03.1.03.01.43	Preservasi Jalan Dan Jembatan	45,287,271,000.00	46,317,230,588.00	1,029,959,588.00
1.03.1.03.01.43.07	Pemeliharaan Jalan Simpang PLN - ADM	15,994,000,000.00	15,626,059,088.00	(367,940,912.00)
1.03.1.03.01.43.08	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Bukit Pelangi Tahap III	8,000,000,000.00	7,457,397,500.00	(542,602,500.00)
1.03.1.03.01.43.09	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Sangatta (Swakelola)	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	500,000,000.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.43.10	Pemeliharaan Jalan Rantau Pulung Sei Benu Muda Tahap II	15,700,000,000.00	15,679,295,000.00	(20,705,000.00)
1.03.1.03.01.43.11	Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Libas Menuju Sei Belwit	2,500,000,000.00	2,339,929,000.00	(160,071,000.00)
1.03.1.03.01.43.12	Pemeliharaan Jalan Di Luar Kota Sangatta (Swakelola)	1,593,271,000.00	1,593,271,000.00	0.00
1.03.1.03.01.43.13	Preservasi Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda (Lanjutan)	0.00	1,621,279,000.00	1,621,279,000.00
1.03.1.03.01.44	Perencanaan Jalan Dan Jembatan	9,000,000,000.00	10,168,726,750.00	1,168,726,750.00
1.03.1.03.01.44.01	Perencanaan Teknis Jalan	2,000,000,000.00	1,694,484,500.00	(305,515,500.00)
1.03.1.03.01.44.02	Perencanaan Teknis Jembatan	1,000,000,000.00	909,415,750.00	(90,584,250.00)
1.03.1.03.01.44.04	AMDAL Pembangunan Jalan Dalam Kota Sangatta	3,000,000,000.00	2,796,046,250.00	(203,953,750.00)
1.03.1.03.01.44.05	Perencanaan Pembangunan Jalan Manubar - Tanjung Mangkalia (Bantuan Keuangan Provinsi)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.44.06	AMDAL Jalan Sangatta - Rantau Pulung	1,000,000,000.00	885,248,250.00	(114,751,750.00)
1.03.1.03.01.44.07	FS Jalan Manubar - Tanjung Mangkalia	500,000,000.00	446,025,000.00	(53,975,000.00)
1.03.1.03.01.44.08	FS Jalan Ring Road I dan II Sangatta	500,000,000.00	437,507,000.00	(62,493,000.00)
1.03.1.03.01.44.09	Perencanaan Jalan & Jembatan	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.03.1.03.01.46	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan	15,150,000,000.00	13,417,109,300.00	(1,732,890,700.00)
1.03.1.03.01.46.03	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan	15,150,000,000.00	13,417,109,300.00	(1,732,890,700.00)
1.03.1.03.01.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial	6,350,000,000.00	5,435,935,000.00	(914,065,000.00)
1.03.1.03.01.47.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial	4,350,000,000.00	3,821,320,000.00	(528,680,000.00)
1.03.1.03.01.47.02	Pembangunan Masjid Baitul Muhibin Jalan Simono	2,000,000,000.00	1,614,615,000.00	(385,385,000.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.48	Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	94,267,712,950.00	94,400,757,149.00	133,044,199.00
1.03.1.03.01.48.01	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona I	13,575,000,000.00	13,575,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.48.02	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona II	11,800,000,000.00	11,800,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.48.03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona III	10,200,000,000.00	10,200,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.48.04	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona IV	10,212,713,000.00	10,212,713,000.00	0.00
1.03.1.03.01.48.05	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona V	11,175,000,000.00	12,525,000,000.00	1,350,000,000.00
1.03.1.03.01.48.06	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona VI	13,605,000,000.00	13,605,000,000.00	0.00
1.03.1.03.01.48.07	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona VII	4,574,999,975.00	4,574,999,975.00	0.00
1.03.1.03.01.48.08	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Perkotaan I	9,750,000,000.00	9,737,645,199.00	(12,354,801.00)
1.03.1.03.01.48.09	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Perkotaan II	9,374,999,975.00	8,170,398,975.00	(1,204,601,000.00)
1.03.1.03.01.49	Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan	80,582,567,800.00	78,612,635,001.00	(1,969,932,799.00)
1.03.1.03.01.49.01	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona I	12,963,921,651.00	12,963,921,651.00	0.00
1.03.1.03.01.49.02	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona II	18,488,501,250.00	18,788,501,250.00	300,000,000.00
1.03.1.03.01.49.03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona III	9,673,959,400.00	9,673,959,400.00	0.00
1.03.1.03.01.49.04	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona IV	13,709,958,600.00	13,809,958,600.00	100,000,000.00



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.03.1.03.01.49.05	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona V	5,146,409,300.00	5,246,409,300.00	100,000,000.00
1.03.1.03.01.49.08	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Pedesaan I	11,985,046,000.00	10,357,978,000.00	(1,627,068,000.00)
1.03.1.03.01.49.09	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Pedesaan II	3,070,447,343.00	2,781,839,450.00	(288,607,893.00)
1.03.1.03.01.49.10	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Pedesaan III	2,890,649,400.00	2,606,540,800.00	(284,108,600.00)
1.03.1.03.01.49.11	Pembangunan Sarana Umum & Infrastruktur Pedesaan IV	2,653,674,856.00	2,383,526,550.00	(270,148,306.00)
1.03.1.03.01.51	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya	12,100,000,000.00	12,250,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.51.01	Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Tahun 2013	12,100,000,000.00	12,250,000,000.00	150,000,000.00
1.03.1.03.01.52	Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi	13,200,000,000.00	10,741,517,000.00	(2,458,483,000.00)
1.03.1.03.01.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA	7,000,000,000.00	5,859,106,000.00	(1,140,894,000.00)
1.03.1.03.01.52.02	Pembuatan Tempat Penampungan Sementara (Pasar Induk)	5,000,000,000.00	3,682,411,000.00	(1,317,589,000.00)
1.03.1.03.01.52.03	Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi I	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
1.04	Perumahan	5,041,111,250.00	4,974,137,250.00	(66,974,000.00)
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	5,041,111,250.00	4,974,137,250.00	(66,974,000.00)
1.04.1.03.01.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5,041,111,250.00	4,974,137,250.00	(66,974,000.00)
1.04.1.03.01.19.12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	2,609,862,100.00	2,672,366,100.00	62,504,000.00
1.04.1.03.01.19.14	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	2,431,249,150.00	2,301,771,150.00	(129,478,000.00)
1.05	Penataan Ruang	635,571,950.00	635,571,950.00	0.00
1.05.1.09.05	Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang	635,571,950.00	635,571,950.00	0.00
1.05.1.09.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	96,460,500.00	96,460,500.00	0.00



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.05.1.09.05.16.05	Survey dan Pemetaan	96,460,500.00	96,460,500.00	0.00
1.05.1.09.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	539,111,450.00	539,111,450.00	0.00
1.05.1.09.05.17.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	265,547,600.00	265,547,600.00	0.00
1.05.1.09.05.17.09	Pengembangan dan Updating Basis Data Tata Ruang dan dengan Aplikasi GIS	273,563,850.00	273,563,850.00	0.00
1.06	Perencanaan Pembangunan	29,304,322,625.00	27,489,004,025.00	(1,815,318,600.00)
1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29,304,322,625.00	27,489,004,025.00	(1,815,318,600.00)
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,020,657,400.00	3,020,657,400.00	0.00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281,920,000.00	281,920,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	663,069,000.00	663,069,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627,821,400.00	627,821,400.00	0.00
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	240,155,000.00	240,155,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.19	Pengelolaan Administrasi Keuangan	217,692,000.00	217,692,000.00	0.00
1.06.1.06.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,759,110,000.00	3,129,110,000.00	(1,630,000,000.00)
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,752,492,000.00	1,022,492,000.00	(730,000,000.00)
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	997,634,000.00	997,634,000.00	0.00
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	627,744,000.00	627,744,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.06.1.06.01.02.33	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1,381,240,000.00	481,240,000.00	(900,000,000.00)
1.06.1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	206,776,000.00	206,776,000.00	0.00
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	206,776,000.00	206,776,000.00	0.00
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	845,963,100.00	845,963,100.00	0.00
1.06.1.06.01.05.04	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	845,963,100.00	845,963,100.00	0.00
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273,039,400.00	273,039,400.00	0.00
1.06.1.06.01.06.05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	78,800,400.00	78,800,400.00	0.00
1.06.1.06.01.06.07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	194,239,000.00	194,239,000.00	0.00
1.06.1.06.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	75,146,500.00	75,146,500.00	0.00
1.06.1.06.01.07.02	Pengelolaan Perpustakaan	75,146,500.00	75,146,500.00	0.00
1.06.1.06.01.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	641,786,125.00	641,786,125.00	0.00
1.06.1.06.01.09.03	Expose Program-program Pembangunan	641,786,125.00	641,786,125.00	0.00
1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	2,360,153,800.00	2,360,153,800.00	0.00
1.06.1.06.01.15.05	Penyusunan Profile Daerah	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.15.06	Penyusunan Data Pokok Daerah	504,000,000.00	504,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.15.16	Penyusunan Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMPEDA)	606,921,400.00	606,921,400.00	0.00
1.06.1.06.01.15.18	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	764,749,400.00	764,749,400.00	0.00
1.06.1.06.01.15.19	Forum Statistik Daerah	234,483,000.00	234,483,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.20.04	Penyusunan Uraian Tugas Pegawai	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.20.05	Penyusunan SOP	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,353,440,900.00	8,151,352,300.00	(202,088,600.00)
1.06.1.06.01.21.11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	192,217,700.00	192,217,700.00	0.00
1.06.1.06.01.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPU)	627,840,100.00	627,840,100.00	0.00
1.06.1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.21.16	Forum Gabungan SKPD	303,077,600.00	303,077,600.00	0.00
1.06.1.06.01.21.18	Koordinasi Bidang Infrastruktur	450,000,000.00	450,592,000.00	592,000.00
1.06.1.06.01.21.19	Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan dan Koordinasi Pengendalian Dana APBN	466,447,600.00	466,447,600.00	0.00
1.06.1.06.01.21.32	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	1,129,889,600.00	1,129,889,600.00	0.00
1.06.1.06.01.21.33	Permutakhiran Data Fasilitas Pemerintah Kecamatan dan Desa Berbasis Spasial	343,500,000.00	337,107,000.00	(6,393,000.00)
1.06.1.06.01.21.35	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan	371,271,000.00	371,271,000.00	0.00
1.06.1.06.01.21.36	Rencana Induk SPAM	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.21.39	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	212,982,900.00	212,982,900.00	0.00
1.06.1.06.01.21.41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	1,552,547,000.00	1,552,547,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.06.1.06.01.21.42	Review Renstra Bappeda	106,785,800.00	106,785,800.00	0.00
1.06.1.06.01.21.43	Review RPJMD	1,010,514,600.00	1,010,514,600.00	0.00
1.06.1.06.01.21.44	Rapat Koordinasi PPSP	211,367,000.00	15,079,400.00	[196,287,600.00]
1.06.1.06.01.21.45	Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3,150,000,000.00	3,150,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.20	Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kutai Timur	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.25	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kutai Timur	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.30	Study Kebijakan Pemanfaatan alokasi sumber daya lahan secara berkeadilan dan berkelanjutan dalam pembangunan sektor pertanian dalam arti luas	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.31	Renstra Kawasan Metropolitan Kutai Timur	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.22.32	Analisis Potensi Pengembangan Industri Kecil/Rumah Tangga Berbasis Pertanian dalam Arti Luas	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	2,941,284,700.00	2,941,284,700.00	0.00
1.06.1.06.01.23.10	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.23.14	Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.23.15	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sabelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.06.1.06.01.23.17	Updating Data Kemiskinan Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.23.18	Updating Data Potensi Sumber Dana Pembangunan Desa	391,284,700.00	391,284,700.00	0.00
1.06.1.06.01.23.19	Evaluasi Capaian Indikator dan Target MDG's Kabupaten Kutai Timur	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.26	Program Perencanaan Tata Ruang	2,026,964,700.00	2,043,734,700.00	16,770,000.00
1.06.1.06.01.26.02	Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	730,499,700.00	747,269,700.00	16,770,000.00
1.06.1.06.01.26.04	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur	1,296,465,000.00	1,296,465,000.00	0.00
1.06.1.06.01.27	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.06.1.06.01.27.01	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.07	Perhubungan	116,300,000,000.00	163,878,538,592.00	47,578,538,592.00
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	116,300,000,000.00	163,878,538,592.00	47,578,538,592.00
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,907,935,300.00	3,734,732,700.00	(173,202,600.00)
1.07.1.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,137,515,800.00	1,113,195,200.00	(24,320,600.00)
1.07.1.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	719,715,500.00	633,175,500.00	(86,540,000.00)
1.07.1.07.01.01.21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	213,699,400.00	193,457,400.00	(20,242,000.00)
1.07.1.07.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,719,011,100.00	1,676,911,100.00	(42,100,000.00)
1.07.1.07.01.01.100	Penyusunan Review rencana Strategis (PENSTRA)	117,993,500.00	117,993,500.00	0.00



Kode	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.07.1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	889,936,300.00	773,899,000.00	(116,037,300.00)
1.07.1.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	737,224,800.00	621,187,500.00	(116,037,300.00)
1.07.1.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	152,711,500.00	152,711,500.00	0.00
1.07.1.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	686,176,700.00	596,086,700.00	(90,090,000.00)
1.07.1.07.01.05.04	Pendidikan dan pelatihan teknis	686,176,700.00	596,086,700.00	(90,090,000.00)
1.07.1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	171,284,900.00	171,284,900.00	0.00
1.07.1.07.01.16.06	Pemeliharaan dan perawatan rambu rambu lalu lintas, trafic light serta RPPJ	171,284,900.00	171,284,900.00	0.00
1.07.1.07.01.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2,135,293,508.00	1,950,864,500.00	(184,429,008.00)
1.07.1.07.01.17.16	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	198,244,100.00	176,571,100.00	(21,673,000.00)
1.07.1.07.01.17.18	Pengadaan Peralatan dan bahan Cetakan UPT PKB	351,364,100.00	351,364,100.00	0.00
1.07.1.07.01.17.19	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Sungai	245,844,200.00	218,766,700.00	(27,077,500.00)
1.07.1.07.01.17.21	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat	151,329,000.00	151,329,000.00	0.00
1.07.1.07.01.17.22	Koordinasi,Sosialisasi,Monitoring Evaluasi Penyuluhan dan Pelaporan Peningkatan Angkutan Lalulintas Perhubungan Udara	439,753,300.00	439,753,300.00	0.00
1.07.1.07.01.17.23	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Laut	144,694,200.00	128,685,200.00	(16,009,000.00)
1.07.1.07.01.17.28	Koordinasi dan Sosialisasi/ Penyuluhan Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lalu Lintas Perhubungan Darat	604,064,608.00	484,395,100.00	(119,669,508.00)
1.07.1.07.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	96,080,310,402.00	144,887,836,402.00	48,807,526,000.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.07.1.07.01.18.04	Pembangunan terminal dan sub terminal	1,005,393,440.00	1,005,393,440.00	0.00
1.07.1.07.01.18.07	Pembangunan Dermaga	2,804,074,262.00	2,804,074,262.00	0.00
1.07.1.07.01.18.08	Pembangunan Pelabuhan Umum Sengata (Kenyamukan)	82,100,000,000.00	132,043,526,000.00	49,943,526,000.00
1.07.1.07.01.18.09	Pembangunan Pelabuhan Umum Sengata (Kenyamukan) Subsidi Provinsi	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
1.07.1.07.01.18.19	Pembangunan Gedung Terpadu Radio RPD, TV Kutim, Pengelolaan Website dan Tower Bersama	2,000,000,000.00	1,714,000,000.00	(286,000,000.00)
1.07.1.07.01.18.20	Perencanaan Pembangunan Bandara	2,845,842,700.00	1,995,842,700.00	(850,000,000.00)
1.07.1.07.01.18.22	Revisi Tatralok Kab. Kutai Timur	325,000,000.00	325,000,000.00	0.00
1.07.1.07.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,814,853,200.00	2,441,420,200.00	(373,433,000.00)
1.07.1.07.01.19.01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	1,126,573,600.00	956,573,600.00	(170,000,000.00)
1.07.1.07.01.19.04	Operasi Penertiban Angkutan Umum dan Alat Berat	624,691,300.00	624,691,300.00	0.00
1.07.1.07.01.19.06	Operasional, Pemeliharaan dan Perawatan (Kapal Patroli)	1,063,588,300.00	860,155,300.00	(203,433,000.00)
1.07.1.07.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	272,399,061.00	272,399,061.00	0.00
1.07.1.07.01.20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	272,399,061.00	272,399,061.00	0.00
1.07.1.07.01.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7,399,069,130.00	7,125,273,630.00	(273,795,500.00)
1.07.1.07.01.26.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengguna Frekuensi Radio, TV Kabel, Warung Internet, Tower dan Jasa Tiupan Kab. Kutai Timur	139,018,800.00	139,018,800.00	0.00
1.07.1.07.01.26.09	Sosialisasi Peraturan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Penyebarluasan Informasi melalui Media	454,280,000.00	404,676,500.00	(49,603,500.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD/Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.07.1.07.01.26.10	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Internet dan Instalasi Internet	1,415,684,480.00	1,237,684,480.00	(178,000,000.00)
1.07.1.07.01.26.16	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	2,717,762,750.00	2,717,762,750.00	0.00
1.07.1.07.01.26.23	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik (Televisi Iklan di Bandara)	2,252,505,000.00	2,252,505,000.00	0.00
1.07.1.07.01.26.24	Pemanfaatan Mobil M-PLIK di 6 Kecamatan, di Kab. Kutim	419,818,100.00	373,626,100.00	(46,192,000.00)
1.07.1.07.01.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,942,741,499.00	1,924,741,499.00	(18,000,000.00)
1.07.1.07.01.27.01	Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui siaran radio	747,691,499.00	747,691,499.00	0.00
1.07.1.07.01.27.02	Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Siaran Televisi	845,050,000.00	827,050,000.00	(18,000,000.00)
1.07.1.07.01.27.09	Cell Plan Menara Telekomunikasi	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00
1.08	Lingkungan Hidup	21,000,000,000.00	20,200,000,000.00	(800,000,000.00)
1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	11,000,000,000.00	11,300,000,000.00	300,000,000.00
1.08.1.03.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,377,642,300.00	4,407,642,300.00	30,000,000.00
1.08.1.03.01.16.17	Pengangkutan Sampah Mandiri	4,377,642,300.00	4,407,642,300.00	30,000,000.00
1.08.1.03.01.29	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	3,419,469,300.00	3,632,859,300.00	213,390,000.00
1.08.1.03.01.29.01	Peningkatan Administrasi Perkantoran UPT,KPP	3,419,469,300.00	3,632,859,300.00	213,390,000.00
1.08.1.03.01.30	Program Peningkatan Operasional Kebersihan UPT, KPP	3,202,888,400.00	3,259,498,400.00	56,610,000.00
1.08.1.03.01.30.01	Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan UPT,KPP	3,202,888,400.00	3,259,498,400.00	56,610,000.00
1.08.1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	10,000,000,000.00	8,900,000,000.00	(1,100,000,000.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,781,287,500.00	1,969,605,205.00	188,317,705.00
1.08.1.08.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	382,176,000.00	382,176,000.00	0.00
1.08.1.08.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	699,871,200.00	858,218,505.00	158,347,305.00
1.08.1.08.01.01.21	Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor	652,470,300.00	643,391,950.00	(9,078,350.00)
1.08.1.08.01.01.22	Pembuatan Laporan dan Evaluasi Program dan Kegiatan	46,770,000.00	85,818,750.00	39,048,750.00
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	718,515,000.00	538,040,000.00	(180,475,000.00)
1.08.1.08.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	426,080,000.00	401,080,000.00	(25,000,000.00)
1.08.1.08.01.02.36	Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292,435,000.00	136,960,000.00	(155,475,000.00)
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	413,476,000.00	396,131,000.00	(17,345,000.00)
1.08.1.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	413,476,000.00	396,131,000.00	(17,345,000.00)
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	715,948,000.00	601,948,000.00	(114,000,000.00)
1.08.1.08.01.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	500,000,000.00	402,000,000.00	(98,000,000.00)
1.08.1.08.01.15.11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	215,948,000.00	199,948,000.00	(16,000,000.00)
1.08.1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,643,601,000.00	2,301,730,350.00	(341,870,650.00)
1.08.1.08.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	150,000,000.00	148,800,000.00	(1,200,000.00)
1.08.1.08.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	300,000,000.00	267,000,000.00	(33,000,000.00)
1.08.1.08.01.16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	300,000,000.00	279,935,000.00	(20,065,000.00)
1.08.1.08.01.16.09	Peningkatan Peningkat Kinerja Perusahaan (Proper)	200,000,000.00	178,000,000.00	(22,000,000.00)
1.08.1.08.01.16.13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	331,130,000.00	240,790,100.00	(90,339,900.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.08.1.08.01.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	375,773,000.00	331,483,000.00	(44,290,000.00)
1.08.1.08.01.16.20	Peningkatan sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	100,000,000.00	65,425,000.00	(34,575,000.00)
1.08.1.08.01.16.21	Pemantauan Kualitas Udara	300,000,000.00	269,079,250.00	(30,920,750.00)
1.08.1.08.01.16.22	Pemantauan Kualitas Air	350,000,000.00	311,500,000.00	(38,500,000.00)
1.08.1.08.01.16.23	Pengawasan Kerusakan Lahan dan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa	236,698,000.00	209,718,000.00	(26,980,000.00)
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,270,903,500.00	891,432,445.00	(379,471,055.00)
1.08.1.08.01.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
1.08.1.08.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	257,020,000.00	230,822,500.00	(26,197,500.00)
1.08.1.08.01.17.08	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	250,000,000.00	221,330,000.00	(28,670,000.00)
1.08.1.08.01.17.10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	520,581,500.00	312,127,945.00	(208,453,555.00)
1.08.1.08.01.17.15	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	143,302,000.00	127,152,000.00	(16,150,000.00)
1.08.1.08.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	450,000,000.00	430,465,000.00	(19,535,000.00)
1.08.1.08.01.18.09	Pelaksanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	225,000,000.00	206,725,000.00	(18,275,000.00)
1.08.1.08.01.18.12	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Kab. Kutim	225,000,000.00	223,740,000.00	(1,260,000.00)
1.08.1.08.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	753,360,000.00	594,920,000.00	(158,440,000.00)
1.08.1.08.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	393,000,000.00	378,330,000.00	(14,670,000.00)



Kode	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.08.1.08.01.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.08.1.08.01.19.06	Pengembangan Kapasitas Materi Pendidikan Lingkungan Hidup	285,360,000.00	141,590,000.00	[143,770,000.00]
1.08.1.08.01.21	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	749,428,000.00	712,541,000.00	[36,887,000.00]
1.08.1.08.01.21.01	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Dikawasan Konservasi	749,428,000.00	712,541,000.00	[36,887,000.00]
1.08.1.08.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	341,871,000.00	301,577,000.00	[40,294,000.00]
1.08.1.08.01.24.03	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH	92,251,000.00	81,957,000.00	[10,294,000.00]
1.08.1.08.01.24.05	Penataan RTH	249,620,000.00	219,620,000.00	[30,000,000.00]
1.08.1.08.01.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	161,610,000.00	161,610,000.00	0.00
1.08.1.08.01.26.02	Penegakan Hidup dan Penyelidikan Kasus Sengketa Lingkungan Hidup	161,610,000.00	161,610,000.00	0.00
1.09	Pertanian	66,964,428,050.00	68,864,428,050.00	1,900,000,000.00
1.09.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1.09.1.03.01.53	Program Pertanian	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1.09.1.03.01.53.03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
1.09.1.09.05	Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang	66,964,428,050.00	67,364,428,050.00	400,000,000.00
1.09.1.09.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,447,937,450.00	4,447,937,450.00	0.00
1.09.1.09.05.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,702,550,000.00	2,702,550,000.00	0.00
1.09.1.09.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	319,210,200.00	319,210,200.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang (5)
		Sabelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.09.1.09.05.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,426,177,250.00	1,426,177,250.00	0.00
1.09.1.09.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	772,334,573.00	772,334,573.00	0.00
1.09.1.09.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	772,334,573.00	772,334,573.00	0.00
1.09.1.09.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	539,320,391.00	539,320,391.00	0.00
1.09.1.09.05.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	358,518,031.00	358,518,031.00	0.00
1.09.1.09.05.05.05	Sosialisasi, Koordinasi dan Bimtek Keuangan	180,802,360.00	180,802,360.00	0.00
1.09.1.09.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	242,829,580.00	242,829,580.00	0.00
1.09.1.09.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	242,829,580.00	242,829,580.00	0.00
1.09.1.09.05.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	909,295,870.00	909,295,870.00	0.00
1.09.1.09.05.16.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemegang Aplikasi Perijinan Lokasi	300,997,450.00	300,997,450.00	0.00
1.09.1.09.05.16.04	Penetapan Lokasi Kegiatan untuk Pembebasan	300,000,300.00	300,000,300.00	0.00
1.09.1.09.05.16.06	Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Pembukaan Lahan (IPL)	308,298,120.00	308,298,120.00	0.00
1.09.1.09.05.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	511,730,026.00	511,730,026.00	0.00
1.09.1.09.05.17.02	Identifikasi Masalah Pertanian	155,847,196.00	155,847,196.00	0.00
1.09.1.09.05.17.03	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pertanian dan Tata Ruang	205,836,970.00	205,836,970.00	0.00
1.09.1.09.05.17.04	Pemanfaatan Tanah Lahan Kosong	150,045,860.00	150,045,860.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.09.1.09.05.19	Program Pertanian	59,540,980,160.00	59,540,980,160.00	400,000,000.00
1.09.1.09.05.19.01	Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan	47,517,809,372.00	47,517,809,372.00	0.00
1.09.1.09.05.19.03	Pengukuran dalam Rangka Pembebasan Tanah	699,999,080.00	699,999,080.00	0.00
1.09.1.09.05.19.05	Pengaturan Tanah Ulayat	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.09.1.09.05.19.07	Pengendalian Tanah Aset Pemerintahan Daerah	173,171,708.00	173,171,708.00	0.00
1.09.1.09.05.19.09	Persertifikatan Tanah Pertanian	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
1.09.1.09.05.19.10	Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan (Subsidi Provinsi)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
1.09.1.09.05.19.11	Persertifikatan Tanah Malay	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	9,900,000,000.00	10,075,000,000.00	175,000,000.00
1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9,900,000,000.00	10,075,000,000.00	175,000,000.00
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,170,025,000.00	3,170,025,000.00	0.00
1.10.1.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,670,025,000.00	2,670,025,000.00	0.00
1.10.1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	137,500,000.00	137,500,000.00	0.00
1.10.1.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137,500,000.00	137,500,000.00	0.00
1.10.1.10.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	207,475,000.00	207,475,000.00	0.00
1.10.1.10.01.17.06	Review Renstra Disdukcapil	207,475,000.00	207,475,000.00	0.00
1.10.1.10.01.18	Program Bidang Pencatatan Sipil	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.10.1.10.01.18.01	Sosialisasi undang-undang no. 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.18.02	Sosialisasi undang-undang no. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.18.03	Peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan pencatatan sipil tentang akta kelahiran	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.19	Program Bidang Pelayanan Penduduk	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.19.08	Program Penataan administrasi kependudukan	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
1.10.1.10.01.20	Program Bidang Aplikasi dan Data	3,385,000,000.00	3,560,000,000.00	175,000,000.00
1.10.1.10.01.20.02	Fasilitas Penyusunan profil perkembangan kependudukan	270,164,160.00	270,164,160.00	0.00
1.10.1.10.01.20.07	Monitoring ke 18 Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penerapan E-KTP	515,127,540.00	515,127,540.00	0.00
1.10.1.10.01.20.08	Pelatihan BIMTEK Pengoperasian SIAK secara terpadu maupun dalam rangka penerapan e-KTP Nasional	652,311,600.00	652,311,600.00	0.00
1.10.1.10.01.20.15	Pemutakhiran data base kependudukan di 18 kecamatan	1,947,396,700.00	1,947,396,700.00	0.00
1.10.1.10.01.20.17	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,109,006,000.00	7,225,054,750.00	(883,951,250.00)
1.11.1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	8,109,006,000.00	7,225,054,750.00	(883,951,250.00)
1.11.1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,413,385,900.00	1,249,930,700.00	(163,455,200.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.11.1.11.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	653,970,000.00	587,678,000.00	(66,292,000.00)
1.11.1.11.01.01.99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	759,415,900.00	662,252,700.00	(97,163,200.00)
1.11.1.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	903,620,100.00	783,076,000.00	(120,544,100.00)
1.11.1.11.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	253,000,000.00	215,659,000.00	(37,341,000.00)
1.11.1.11.01.02.36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650,620,100.00	567,417,000.00	(83,203,100.00)
1.11.1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	642,000,000.00	642,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.05.05	Pelatihan Anggaran Responsif Gender	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.05.06	Pelatihan Penatausahaan Keuangan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	300,000,000.00	255,216,000.00	(44,784,000.00)
1.11.1.11.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	75,000,000.00	30,216,000.00	(44,784,000.00)
1.11.1.11.01.06.07	Review Revisi Renstra	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.07	Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	400,000,000.00	348,256,000.00	(51,744,000.00)
1.11.1.11.01.07.01	Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kabupaten dan Nasional	250,000,000.00	244,444,000.00	(5,556,000.00)
1.11.1.11.01.07.02	Lomba Kelompok IMP Dan UPPKS Tingkat Kabupaten dan Nasional	150,000,000.00	103,812,000.00	(46,188,000.00)
1.11.1.11.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,825,000,000.00	1,529,195,450.00	(295,804,550.00)



Kode	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.11.1.11.01.16.01	Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.16.04	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	65,000,000.00	24,185,450.00	(40,814,550.00)
1.11.1.11.01.16.05	Pembuatan Peraturan Pengarusutamaan Gender	180,000,000.00	89,910,000.00	(90,090,000.00)
1.11.1.11.01.16.13	Peringatan Hari Anak	175,000,000.00	162,005,000.00	(12,995,000.00)
1.11.1.11.01.16.18	Pelatihan Tenaga Pendamping KDRT	125,000,000.00	104,875,000.00	(20,125,000.00)
1.11.1.11.01.16.30	Pemberdayaan Forum Anak	165,000,000.00	131,650,000.00	(33,350,000.00)
1.11.1.11.01.16.32	Peningkatan SDM Pengurus P2TP2A	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.16.33	Rantis KLA dan Penyusunan Perbup ttg percepatan Kutim menuju Kab. Layak anak	200,000,000.00	197,685,500.00	(2,314,500.00)
1.11.1.11.01.16.34	Seleksi Tunas Muda Pemimpin Indonesia	160,000,000.00	131,759,500.00	(28,240,500.00)
1.11.1.11.01.16.35	Sosialisasi KDRT dan P2TP2A	200,000,000.00	173,350,000.00	(26,650,000.00)
1.11.1.11.01.16.36	Peningkatan Pengadaan dan Pelayanan Sekretariat P2TP2A Kab. Kutim	75,000,000.00	52,000,000.00	(23,000,000.00)
1.11.1.11.01.16.37	Kegiatan Peningatan Hari Ibu Ke - 85	300,000,000.00	281,775,000.00	(18,225,000.00)
1.11.1.11.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	475,000,000.00	475,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.17.11	Peringatan Hari Kartini	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.17.12	P2WKSS	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.17.13	Pembinaan dan Penilaian Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	420,000,000.00	387,903,000.00	(32,097,000.00)
1.11.1.11.01.18.04	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Abagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	75,000,000.00	42,903,000.00	(32,097,000.00)



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.11.1.11.01.18.14	Promosi Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.18.15	Pembentukan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.20	Program Keluarga Berencana	287,000,000.00	250,760,000.00	[36,240,000.00]
1.11.1.11.01.20.07	Pertemuan Medis Tehnis	137,000,000.00	119,440,000.00	[17,560,000.00]
1.11.1.11.01.20.08	Pengolahan Dan Penyajian Data Klinik KB	150,000,000.00	131,320,000.00	[18,680,000.00]
1.11.1.11.01.26	Program Penguatan KKB	400,000,000.00	376,710,000.00	[23,290,000.00]
1.11.1.11.01.26.01	Pendataan Keluarga dan Individu data Keluarga	400,000,000.00	376,710,000.00	[23,290,000.00]
1.11.1.11.01.27	Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) / Penyediaan dukungan operasional IMP	100,000,000.00	99,147,100.00	[852,900.00]
1.11.1.11.01.27.01	Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Memiliki Balita, Remaja dan Lansia	100,000,000.00	99,147,100.00	[852,900.00]
1.11.1.11.01.28	Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	80,000,000.00	75,725,000.00	[4,275,000.00]
1.11.1.11.01.28.01	Pembinaan Kemitraan dan Permodalan bagi Kelompok UPPKS	80,000,000.00	75,725,000.00	[4,275,000.00]
1.11.1.11.01.30	Program Peningkatan Pembinaan Teknis, Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Sejahtera	175,000,000.00	110,500,000.00	[64,500,000.00]
1.11.1.11.01.30.01	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Bidang Usaha	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.30.04	Pengembangan Jejaring Kerja/Pengelolaan Program Dan Pemberdayaan Keluarga	125,000,000.00	60,500,000.00	[64,500,000.00]
1.11.1.11.01.31	Program Pelayanan Kontrasepsi	338,000,000.00	291,635,500.00	[46,364,500.00]
1.11.1.11.01.31.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	338,000,000.00	291,635,500.00	[46,364,500.00]



Kode (1)	Urusan-SKPD-Program-Kegiatan (2)	Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang (5)
		Sebelum Perubahan (3)	Setelah Perubahan (4)	
1.11.1.11.01.32	Program Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.32.01	Fasilitasi Dan Program PKBR Bagi Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling Di Kabupaten	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.33	Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.33.01	Sosialisasi dan Pembentukan Satgas GSI Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.11.1.11.01.33.02	Pembinaan Satgas Dan Lomba GSI	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	690,994,000.00	606,967,000.00	[84,027,000.00]
1.12.1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	690,994,000.00	606,967,000.00	[84,027,000.00]
1.12.1.11.01.15	Program Keluarga Berencana	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
1.12.1.11.01.15.10	Temu Kerja Pengelola KB Tingkat Kabupaten	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
1.12.1.11.01.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	50,000,000.00	41,135,000.00	[8,865,000.00]
1.12.1.11.01.19.02	Monitoring dan Evaluasi GSI	50,000,000.00	41,135,000.00	[8,865,000.00]
1.12.1.11.01.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	150,000,000.00	126,498,000.00	[23,502,000.00]
1.12.1.11.01.20.07	Kegiatan Jambore PIK Kabupaten	150,000,000.00	126,498,000.00	[23,502,000.00]
1.12.1.11.01.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	150,000,000.00	100,000,000.00	[50,000,000.00]
1.12.1.11.01.21.02	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.12.1.11.01.21.03	Monitoring dan Evaluasi Kelompok PIK KRR	50,000,000.00	0.00	[50,000,000.00]
1.12.1.11.01.26	Program Pelaksanaan Pendampingan dan Magang bagi anggota Kelompok UPPKS	165,994,000.00	164,334,000.00	[1,660,000.00]
1.12.1.11.01.26.01	Pelaksanaan Pendampingan dan Magang bagi anggota Kelompok UPPKS	165,994,000.00	164,334,000.00	[1,660,000.00]

BAB VI PENUTUP

6.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2013 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2013. Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan program-program dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a) gambaran pelayanan SKPD;
 - b) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - d) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - e) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2013.

6.2 KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN PEMBANGUNAN

Aspek pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan.

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2013 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan.



- b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor.
- c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.
- d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
- e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR